



"KFR" KAJIAN FISKAL REGIONAL



TRIWULAN II 2025
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tim Penyusun



Rahmat Mulyono



Hery Yulianto



Samsul Falah



Gunawan Setiono



Houlwan



Heru Ismiraldi

Pengarah
Rahmat Mulyono

Ketua Tim
Hery Yulianto

Penulis & Penyaji Data

Samsul Falah
Gunawan Setiono
Houlwan
Heru Ismiraldi
Dinda Arin Kinantya
Satri Wiranti
Ega Putri Idam



Dinda Arin



Satri Wiranti



Ega Putri

Sekapur Sirih

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat yang diberikan sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat dapat menyusun dan menyelesaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2025. KFR merupakan output pelaksanaan tugas Kanwil DJPb yang memiliki fungsi pembinaan, koordinasi, supervisi, dan representasi Kementerian Keuangan di daerah selaku pengelola fiskal dan *Regional Chief Economist*.

Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2025 terdiri atas beberapa analisis diantaranya analisis ekonomi regional yang berisi data kondisi dan analisis perekonomian serta kesejahteraan regional seperti PDRB berdasarkan pengeluaran dan sektor/lapangan usaha, kontribusi dan pertumbuhan sektor/lapangan usaha terhadap PDRB dan fiskal, inflasi, serta indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan (rasio gini), Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Pada KFR ini juga memaparkan analisis fiskal regional yang terdiri dari ringkasan dan analisis atas realisasi APBN, realisasi APBD, realisasi anggaran pendapatan dan belanja konsolidasian, dan Progres Implementasi MBG di Daerah.

Analisis tematik yang diangkat dalam KFR Triwulan II Tahun 2025 yaitu **“Mengukur Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih: Analisis Indikator Di Kalimantan Barat”**. Penyusunan KFR ini telah melalui proses pengumpulan data dan informasi dari berbagai pihak sehingga kami berharap substansi KFR yang disusun telah memuat informasi kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Barat yang komprehensif dan berguna kepada *stakeholders* regional Provinsi Kalimantan Barat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan KFR ini, terutama berkaitan dengan penyediaan data yang diperlukan. Sebagai upaya menyempurnakan KFR di masa yang akan mendatang, kami terbuka atas masukan dan saran untuk perbaikan KFR.

Pontianak, 29 Agustus 2025

Rahmat Mulyono

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar



PESONA SI BUMI BORNEO



Eweh manjala ie maneser

Siapa menjala, dia juga menyelam

**Jika ingin sesuatu, maka
harus bekerja keras untuk
mendapatkannya.**

Source: Peribahasa Suku Daya Ngaju

Daftar Isi

DASHBOARD.....	x
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xiii
BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	1
1.1. Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi.....	1
1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto.....	1
1.1.2. Kontribusi Fiskal (Pengeluaran Pemerintah)	5
1.1.3. Tingkat Inflasi	5
1.1.4. Neraca Perdagangan.....	7
1.2. Analisis Indikator Kesejahteraan	8
1.2.1. Tingkat Kemiskinan	8
1.2.2. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini).....	9
1.2.3. Tingkat Pengangguran	10
1.2.4. Nilai Tukar Petani (NTP)	12
1.2.5. Nilai Tukar Nelayan (NTN).....	12
1.2.6. Indeks Pembangunan Manusia.....	13
BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL	15
2.1. Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi	15
2.1.1. Pendapatan Negara	16
2.1.2. Belanja Negara.....	19
2.1.3. Capaian <i>Output</i> Sektoral dan/atau Program-Program Strategis Pemerintah	25
2.1.4. Prognosis APBN.....	26
2.1.5. Rekomendasi Kebijakan Belanja	27
2.2. Analisis Laporan Realisasi Anggaran APBD Konsolidasi Kalimantan Barat.....	28
2.2.1. Pendapatan Daerah	29
2.2.2. Belanja Daerah.....	33
2.2.3. Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi	36
2.2.4. Surplus/Defisit APBD	37
2.2.5. Pembiayaan Daerah.....	37
2.2.6. Prognosis APBD Kalimantan Barat.....	38
2.2.7. Rekomendasi Kebijakan Belanja Daerah.....	38
2.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian Triwulan II 2025.....	40
2.3.1. Pendapatan Konsolidasian	40
2.3.2. Belanja Konsolidasian.....	40
2.3.3. Surplus/Defisit.....	41
2.3.4. Pembiayaan Komsolidasian	41
2.4. Progres Implementasi Program Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG).....	42
2.4.1. Perkembangan Program MBG di Provinsi Kalimantan Barat.....	42
2.4.2. Dampak Implementasi Program MBG.....	45
2.4.3. Isu dan GAP Capaian dalam Program MBG	49
2.4.4. Kesimpulan dan Rekomendasi atas Pelaksanaan Program MBG	50
BAB III ANALISIS TEMATIK.....	52
3.1. Pendahuluan	52

Daftar Isi

3.2.	Implementasi Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat	52
3.3.1.	Dukungan Regulasi	52
3.3.2.	Gambaran Umum Perkembangan Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat	55
3.3.	Indikator Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih	58
3.3.1.	Akta Pendirian Koperasi	59
3.3.2.	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Struktur Organisasi	60
3.3.3.	Pelatihan dan Pembinaan	60
3.3.4.	Anggota Aktif	61
3.3.5.	Sumber Modal Selain Simpanan Anggota	61
3.3.6.	Kantor atau Gedung Koperasi	61
3.3.7.	Dukungan Teknologi	62
3.4.	Kondisi Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih Provinsi Kalimantan Barat	62
3.4.1.	Identifikasi Faktor Kendala Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Kalbar	64
3.5.	Rekomendasi dan Strategi	65
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		67
4.1.	Kesimpulan	67
4.1.1.	Analisis Ekonomi Regional	67
4.1.2.	Analisis Fiskal Regional	68
4.1.3.	Analisis Tematik : Mengukur Kesiapan Koperasi Merah Putih (Analisa Indikator Di Kalimantan Barat)	71
4.2.	Rekomendasi	72
4.2.1.	Kinerja Ekonomi dan Fiskal Kalimantan Barat	72
4.2.2.	Kesiapan Koperasi Merah Putih Di Kalimantan Barat	74

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Tingkat Kontribusi Komponen PDRB Kalbar Menurut Pengeluaran	3
Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Barat Menurut Pengeluaran	3
Tabel 1. 3 Tingkat Kontribusi Komponen PDRB Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha	4
Tabel 1. 4 Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha	4
Tabel 1. 5 Tingkat Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Kalimantan Barat Periode Juni 2025	6
Tabel 1. 6 Garis Kemiskinan Kalimantan Barat	8
Tabel 1. 7 Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Yang Di Tamatkan	11
Tabel 2. 1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kalbar s.d Triwulan II	15
Tabel 2. 2 Tingkat Kontribusi dan Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan Berdasarkan Sektor Triwulan II 2024 dan 2025	17
Tabel 2. 3 Top 5 Komoditi Dengan Devisa Ekspor dan Impor Terbesar di Kalimantan Barat s.d. Triwulan II 2025	18
Tabel 2. 4 Pagu dan Realisasi 10 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar 2025	22
Tabel 2. 5 Belanja Negara Berdasarkan Fungsi s.d. Triwulan II 2024 dan 2025	23
Tabel 2. 6 Pagu dan Realisasi Belanja Terkait Pendidikan, Kesehatan Infrastruktur Berdasarkan Prioritas Nasional s.d. Triwulan II 2025	25
Tabel 2. 7 Prognosis Realisasi APBN Regional Kalimantan Barat Tahun 2025	27
Tabel 2. 8 Laporan Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2025	29
Tabel 2. 9 Capaian PAD Pemerintah Daerah Lingkup Kalimantan Barat s.d. Triwulan II	30
Tabel 2. 10 Tax Ratio Kalimantan Barat s.d. Triwulan II	32
Tabel 2. 11 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	32
Tabel 2. 12 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	33
Tabel 2. 13 Kontribusi Belanja Daerah Terhadap PDRB ADHB Triwulan II	35
Tabel 2. 14 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Triwulan II	36
Tabel 2. 15 Proyeksi Realisasi APBD Konsolidasi Kalimantan Barat Tahun 2025	37
Tabel 2. 16 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II	39
Tabel 2. 17 Data Sebaran Pelaksanaan MBG per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar	42
Tabel 2. 18 Realisasi Program MBG di Regional Kalimantan	43
Tabel 2. 19 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kalimantan Barat tahun 2024	43
Tabel 2. 20 Sebaran Jumlah Sekolah Regional Kalimantan Tahun Ajaran 2023/2024	44
Tabel 2. 21 Sebaran Jumlah Siswa Regional Kalimantan Tahun Ajaran 2023/2024	44
Tabel 2. 22 Data Harga Bahan Pokok Makanan	46
Tabel 2. 23 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada Lima Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat	47
Tabel 2. 24 Data Rank atau Peringkat Tiap Kelompok	47
Tabel 2. 25 Hasil Analisis Deskriptif	47
Tabel 2. 26 Hasil Uji Kruskal-Wallis	47
Tabel 2. 27 Data NTP Per Subsektor	48
Tabel 2. 28 GAP Analisis Capaian Terhadap Target Program MBG	49
Tabel 2. 29 GAP Analisis Jumlah Siswa di Kalbar yang menerima Program MBG	50

Daftar Tabel

Tabel 3. 1 Matriks Relevansi Indikator terhadap Literatur.....	59
--	----

Daftar Grafik

Grafik 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dan Nasional Secara (Y-On-Y).....	2
Grafik 1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dan Nasional (q-to-q).....	2
Grafik 1. 3 PDRB Menurut Pengeluaran Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2025	3
Grafik 1. 4 Kontribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembentukan PDRB.....	5
Grafik 1. 5 Tingkat Inflasi Kalimantan Barat dan Nasional Secara Year On Year	5
Grafik 1. 6 Tingkat Inflasi Kalimantan Barat dan Nasional Secara Month To Month	6
Grafik 1. 7 Neraca Perdagangan Kalimantan Barat Tahun 2023 s.d. 2025	7
Grafik 1. 8 Nilai Ekspor dan Impor Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Grafik 1. 9 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin.....	8
Grafik 1. 10 Rasio Gini Kalimantan Barat dan Nasional.....	9
Grafik 1. 11 TPT Kalimantan Barat dan Nasional.....	10
Grafik 1. 12 Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT Kalimantan Barat	11
Grafik 1. 13 Presentase Kontribusi Lapangan Pekerjaan Utama Di Kalimantan Barat	11
Grafik 1. 14 TPT Regional Kalimantan dan Nasional	11
Grafik 1. 15 Perkembangan NTP Kalimantan Barat.....	12
Grafik 1. 16 NTP Regional Kalimantan Dan Nasional Triwulan II Tahun 2025	12
Grafik 1. 17 Perkembangan NTN di Kalimantan Barat.....	12
Grafik 1. 18 NTN Regional Kalimantan dan Nasional Triwulan II Tahun 2025.....	13
Grafik 1. 19 Capaian IPM Kalimantan Barat, Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2022-2024	13
Grafik 1. 20 IPM Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Tahun 2024.....	14

No table of figures entries found.

No table of figures entries found.

Daftar Gambar

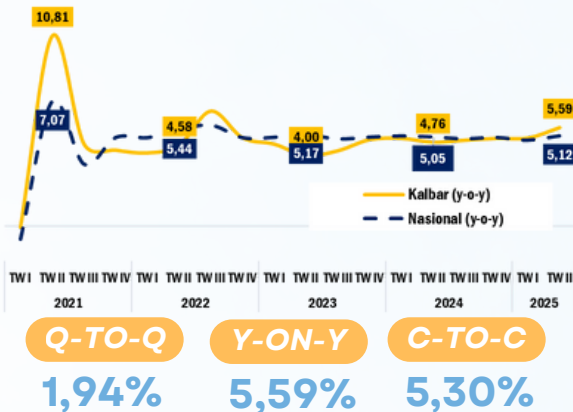
Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan	2
Gambar 2. 1 Data Sebaran SPPG dan Penerima	43
Gambar 2. 2 Hasil Uji Repeated Measures ANOVA	46
Gambar 2. 3 Hasil Uji Analisis Repeated Measures ANOVA.....	48
Gambar 3. 1 Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar.....	63
Gambar 3. 2 Etalase Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar	63
Gambar 3. 3 Beberapa Gerai Lain di Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar	64
Gambar 3. 4 Kegiatan Pelatihan Koperasi oleh Dinas Koperasi UKM Kalbar.....	66

DASHBOARD

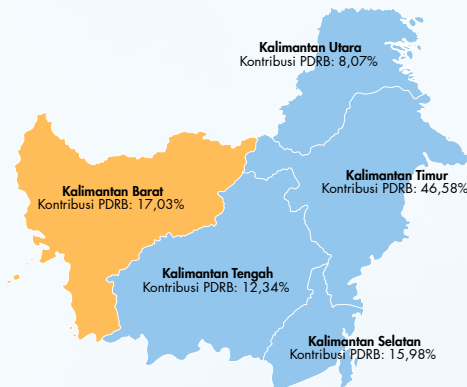
Perkembangan Ekonomi Regional

Indikator Ekonomi Makro

Pertumbuhan Ekonomi



Kontribusi PDRB Menurut Regional Kalimantan



Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha



NERACA PERDAGANGAN

Neraca Perdagangan



129,43
17,51%
▲ m-to-m

Nilai Impor



34,16
15,72%
▼ m-to-m

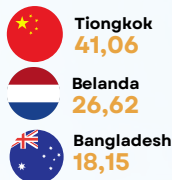
Nilai Ekspor



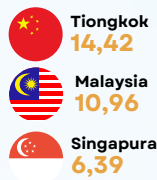
163,59
0,28%
▲ m-to-m

(Juta USD)

Negara Ekspor



Negara Impor



INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Tingkat Kemiskinan



6,16%

330,95 Ribu orang penduduk miskin di Kalimantan Barat

P1 Indeks Kedalaman Kemiskinan
▼ 0,864
P2 Indeks Keparahan Kemiskinan
▼ 0,177

(Data Maret 2025)

Rasio Gini

(Data Maret 2025)

0,316



Perkotaan

0,348

▲ Naik 0,007 poin dari September 2024



Pedesaan

0,267

▼ Turun 0,009 poin dari September 2024

Tingkat Pengangguran



TPT Februari 2025
4,23%

▲ Naik 0,03 persen poin dibanding Februari 2024

INFLASI, NTP, & NTN

Tingkat Inflasi



1,20%
(y-on-y)
▲ 0,32%
(m-to-m)

Andil Inflasi



Makanan, Minuman, Tembakau



Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya



Transportasi



Penyediaan Makanan & Minuman

Nilai Tukar Petani



167,54
▼ 0,64%

It Indeks Harga Diterima Petani
▼ 0,46%
lb Indeks Harga Dibayar Petani
▲ 0,19%

Nilai Tukar Nelayan



101,44
▼ 0,22%

It Indeks Harga Diterima Nelayan
▼ 0,08%
lb Indeks Harga Dibayar Nelayan
▲ 0,14%

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM

Kalimantan Barat Tahun 2024

71,19



Harapan Hidup
73,94 Tahun



Harapan Lama Sekolah
12,68 Tahun



Pengeluaran Perkapita
10.321 Ribu

DASHBOARD

Kinerja Fiskal Regional

PAGU & REALISASI APBN

Pendapatan APBN

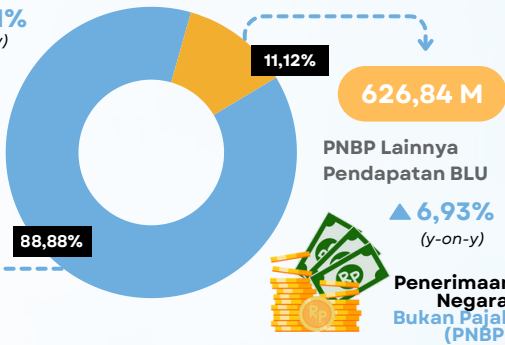
Pagu 12.393,29 M
Realisasi 5.639,23 M
▲ 5,75% (y-on-y)

Penerimaan Perpajakan

▲ 5,61% (y-on-y)

Pajak Dalam Negeri
Pajak Internasional

5.012,39 M



PNBP Lainnya
Pendapatan BLU
▲ 6,93% (y-on-y)
Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP)

Defisit

7.868,73 M

Belanja APBN

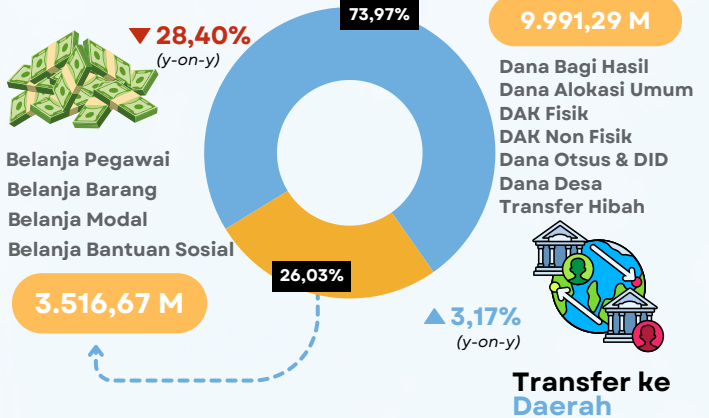
Pagu 31.635,59 M
Realisasi 13.507,96 M
▼ 7,45% (y-on-y)

Belanja Pemerintah Pusat

▼ 28,40% (y-on-y)

Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Bantuan Sosial

3.516,67 M



9.991,29 M
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
DAK Fisik
DAK Non Fisik
Dana Otsus & DID
Dana Desa
Transfer Hibah



Transfer ke Daerah

PAGU & REALISASI APBD

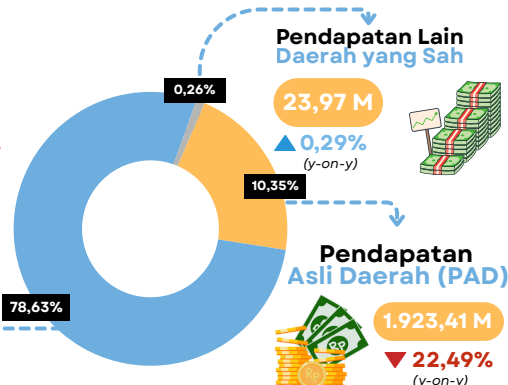
Pendapatan APBD

Pagu 28.638,69 M
Realisasi 9.111,20 M
▼ 12,39% (y-on-y)

Pendapatan Transfer

▼ 9,26% (y-on-y)

7.163,82 M



Pendapatan Lain
Daerah yang Sah

23,97 M

▲ 0,29% (y-on-y)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.923,41 M

▼ 22,49% (y-on-y)

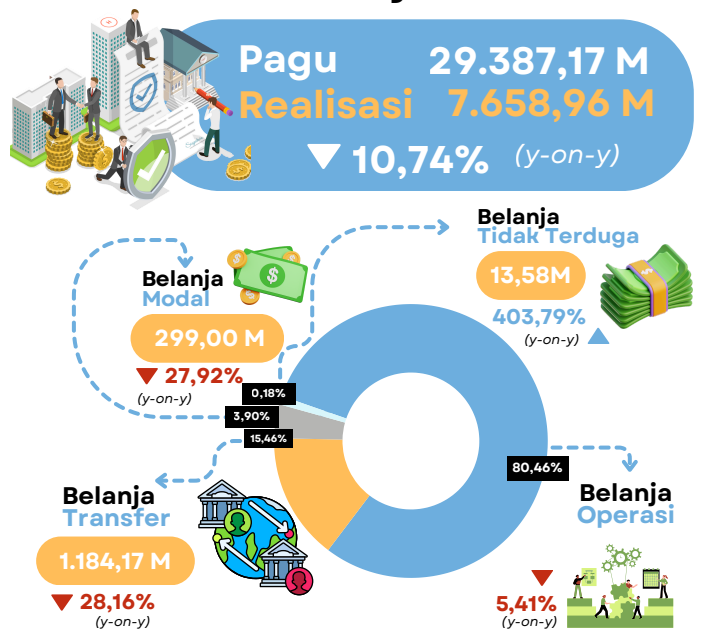
Surplus

1.452,24 M

SILPA

Belanja APBD

Pagu 29.387,17 M
Realisasi 7.658,96 M
▼ 10,74% (y-on-y)



Belanja Modal

299,00 M

▼ 27,92% (y-on-y)

Belanja Transfer

1.184,17 M

▼ 28,16% (y-on-y)

Belanja Tidak Terduga

13,58 M

403,79% (y-on-y)



Belanja Operasi

6.162,21 M

5,41% (y-on-y)

Pembiayaan

52,11 M

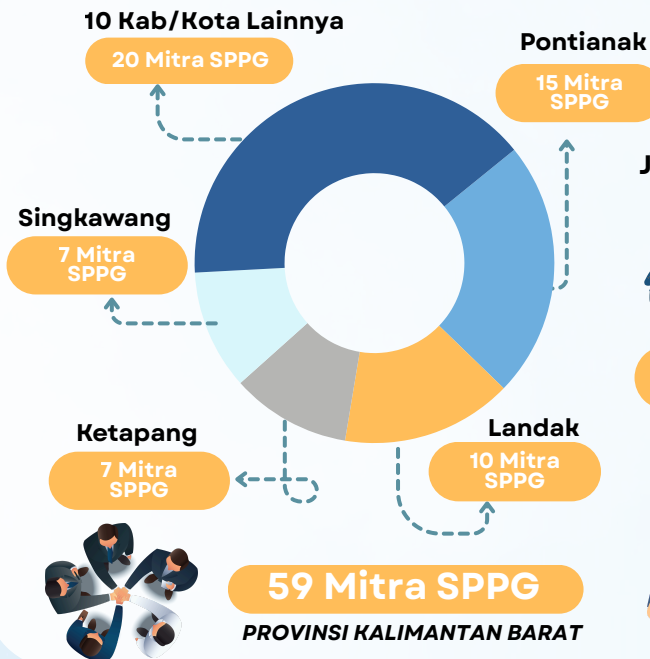
1.504,35 M

DASHBOARD

Analisis Tematik

Implementasi MBG

SEBARAN SPPG KALBAR



Jumlah Sekolah di Kalbar



6.529 Sekolah

Jumlah Siswa di Kalbar



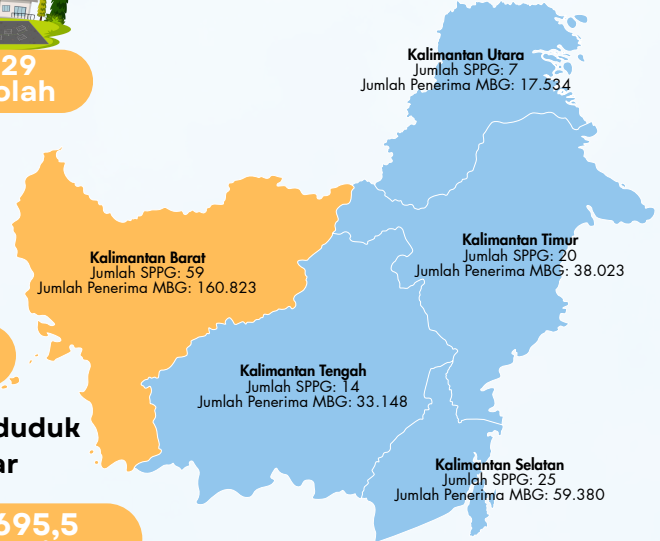
1.004 Siswa/i

Jumlah Penduduk di Kalbar



5.695,5 Ribu Jiwa

Mitra SPPG & Jumlah Penerima di Regional Kalimantan



PERKEMBANGAN KDMP KALBAR

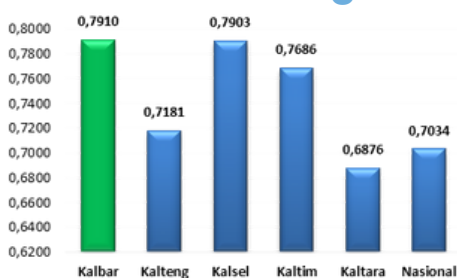
KDMP KALBAR

Jumlah Desa

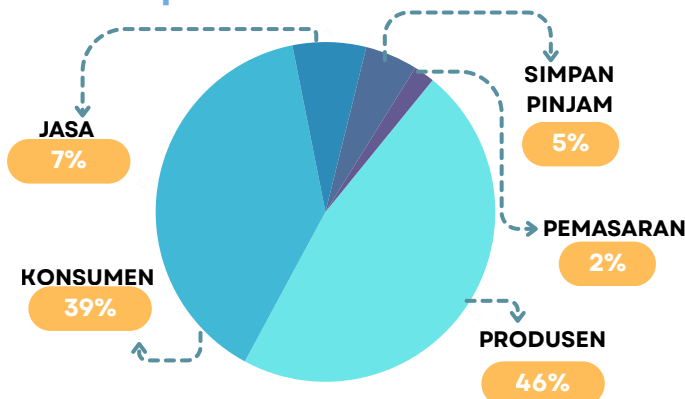
2.145

Seluruhnya telah sepakat untuk membentuk KDMP

Indeks Desa Membangun



KOMPOSISI BIDANG USAHA Koperasi Kalbar 2024



Perkembangan Koperasi Aktif



*Data 2025 merupakan data triwulan I

RINGKASAN EKSEKUTIF

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

: Pada triwulan II tahun 2025, ekonomi Kalimantan Barat tumbuh 5,59% secara *y-on-y*. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi secara *q-to-q* tumbuh sebesar 1,94%. Laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional, di samping itu capaian pada triwulan II tahun 2025 berada di atas capaian nasional. PDRB ADHB Kalimantan Barat triwulan II tahun 2025 sebesar Rp81.108,71 miliar, sedangkan PDRB ADHK mencapai Rp42.463,86 miliar. Inflasi Kalimantan Barat pada Juni 2025 mencapai 0,83% secara *year to date* (*y-to-d*) dan secara *year on year* (*y-on-y*) sebesar 1,20%. Tingkat inflasi Kalimantan Barat tersebut, baik secara *year to date* dan *year on year* berada di bawah tingkat inflasi nasional yang mencapai 1,38% (*ytd*) dan 1,87% (*yoy*). Kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil inflasi terbesar secara *y-on-y*. Nilai neraca perdagangan Kalimantan Barat secara akumulatif mencapai surplus US\$380,51 juta pada April-Juni 2025. Angka ini mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 17,51% dibandingkan nilai akumulatif pada Triwulan II 2024 yang hanya mencapai US\$323,81 juta.

Persentase penduduk miskin Kalimantan Barat pada Maret 2025 sebesar 6,16% turun 0,09% poin terhadap September 2024. Koefisien Gini Ratio Kalimantan Barat sebesar 0,314 pada Maret 2025 dan berada di bawah rata-rata nasional. TPT Kalimantan Barat pada Februari 2025 sebesar 4,23% dan berada di bawah TPT Nasional sebesar 4,76%. Namun, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di regional Kalimantan, TPT Kalimantan Barat tergolong tinggi yakni menempati posisi tertinggi nomor dua setelah Kalimantan Timur yang mencapai 5,33%. Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat bulan Maret 2025 mencapai 167,54 Poin, mengalami penurunan namun menempati posisi tertinggi se-regional Kalimantan sepanjang triwulan II tahun 2025. NTN Kalimantan Barat selama tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan tren fluktuatif dengan kondisi NTN terendah sepanjang tahun 2024 dan capaian NTN 100,77 pada April 2025. IPM Di Kalimantan Barat pada tahun 2024 mencapai 71,19 (Kategori Tinggi), namun masih berada di bawah capaian IPM nasional.

ANALISIS FISKAL REGIONAL

: Sampai dengan akhir triwulan II 2025, kinerja APBN di regional Kalimantan Barat tetap solid dan dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk menghadapi gejolak perekonomian. Pendapatan Negara dan Hibah terealisasi Rp5.639,23 miliar atau 45,50% dari target, tumbuh 5,75% (*yoy*) yang ditopang oleh menguatnya PPN, Cukai, Bea Keluar dan PNBK. Masih sama dengan periode sebelumnya, Pendapatan Negara dan Hibah didominasi oleh penerimaan PPh dan PPN. *Tax ratio* mengalami sedikit perlambatan menjadi 3,13% seiring pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibanding penerimaan pajak yang berhasil dihimpun. Dari sisi Belanja Negara telah mencatatkan realisasi Rp13.507,96 miliar atau 42,70% dari pagu, berkontraksi 7,45% (*yoy*) akibat

kebijakan efisiensi belanja dan pencadangan TKD. Belanja Negara masih didominasi oleh TKD (73,97%). Sementara itu, APBN per fungsi menunjukkan kontraksi di hampir seluruh fungsi, kecuali Pertahanan serta Ketertiban dan Keamanan yang masih tumbuh secara pagu. Defisit APBN di regional Kalimantan Barat berhasil menyempit 15,06% (yoy), mencerminkan perbaikan kualitas belanja yang lebih efisien, terukur dan terarah.

Berdasarkan data dari SIKRI atas LRA konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat sampai dengan triwulan II 2025, Pendapatan Daerah telah terealisasi Rp9.111,20 miliar atau 31,81% dari target, namun terkontraksi 12,39% (yoy). Seluruh komponen Pendapatan Daerah mengalami kontraksi secara yoy kecuali pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang mampu tumbuh 0,29%. Belanja Daerah terealisasi 26,06% atau Rp8.752,26 miliar juga mengalami kontraksi sedalam 10,74% (yoy). Struktur Belanja Daerah tersebut masih didominasi oleh pos Belanja Operasi dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Daerah Kalimantan Barat pada triwulan II 2025 di dominasi oleh empat fungsi yakni Pelayanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Kesehatan serta Pendidikan. Posisi Pendapatan Daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan Belanja Daerah mengakibatkan APBD Konsolidasi Kalimantan Barat berada pada kondisi surplus Rp1.504,35 miliar. Kondisi surplus pada APBD Konsolidasi Kalimantan Barat mampu menyempit 35,37% (yoy).

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat disusun sebagai sumber informasi bagi para pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pengambilan keputusan. LKPK ini merupakan hasil konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian. Hingga triwulan II 2025, pendapatan konsolidasian pemerintah pusat dan daerah di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp7.707,01 miliar, terkontraksi 6,07% (yoy). Pada sisi belanja, realisasi mencapai Rp13.507,92 miliar, terkontraksi 13,68% (yoy), sehingga Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Daerah di Kalimantan Barat berada dalam kondisi defisit sebesar Rp5.766,31 miliar.

Dari sisi program, implementasi MBG di Kalimantan Barat merupakan yang terbesar di regional Kalimantan. Hingga Juni 2025, terdapat 59 mitra SPPG dengan total penerima manfaat mencapai 160.823 jiwa. Besarnya cakupan implementasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kondisi geografis, (2) jumlah dan karakteristik penduduk, serta (3) jumlah sekolah dan siswa. Hasil uji statistika menunjukkan bahwa implementasi program MBG di Kalimantan Barat belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap harga bahan pokok dan NTP. Kendati demikian, program ini telah berkontribusi nyata dalam menciptakan perbedaan signifikan pada inflasi komponen makanan, minuman, dan tembakau.

ANALISIS TEMATIK : Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah dalam upaya memperkuat basis ekonomi kerakyatan melalui kelembagaan ekonomi desa. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat sangat didukung oleh kondisi Kalimantan Barat yang telah memiliki ekosistem koperasi *eksisting* yang bergerak pada berbagai bidang usaha seperti, produsen, konsumen, jasa, simpan pinjam, dan pemasaran. Hal ini praktis menjadi landasan yang relevan dan kuat untuk implementasi program ini sehingga perlu adanya pemetaan kesiapan koperasi agar dapat berkembang secara optimal.

Terdapat tujuh indikator kesiapan yang dapat digunakan untuk menilai Koperasi Desa Merah Putih, yaitu Akta Pendirian, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Struktur Organisasi, Pelatihan dan Pembinaan, Anggota Aktif, Sumber Modal selain Simpanan Anggota, Kantor atau Gedung, serta Dukungan Teknologi. Indikator-indikator ini bersumber dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan diperkuat oleh literatur akademis baik internasional maupun nasional, sehingga dapat dijadikan instrumen evaluasi yang aplikatif.

Sampai dengan saat kajian ini disusun, kondisi menunjukkan bahwa hampir seluruh Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat telah memenuhi indikator dasar berupa akta pendirian dan AD/ART. Namun, indikator lanjutan seperti pelatihan, partisipasi anggota aktif, diversifikasi modal, penyediaan kantor, serta dukungan teknologi masih sangat terbatas. Hingga Agustus 2025, hanya Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar yang berhasil memenuhi seluruh indikator kesiapan dan ditetapkan sebagai koperasi percontohan nasional. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan kesiapan antar desa yang wajar mengingat program masih berada pada tahap awal.

Sejumlah kendala utama yang teridentifikasi antara lain keterbatasan waktu persiapan, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang belum merata, rendahnya partisipasi anggota, serta belum optimalnya akses pembiayaan koperasi yang salah satunya sesuai dengan amanat pada PMK No. 49 Tahun 2025.

Untuk merespon kendala-kendala dimaksud, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi strategis, yaitu: (1) penyusunan *roadmap* implementasi kesiapan koperasi, (2) penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM, (3) percepatan implementasi pembiayaan melalui PMK No. 49 Tahun 2025, dan (4) peningkatan partisipasi anggota koperasi. Rekomendasi ini diharapkan dapat mempercepat kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat sehingga mampu menjadi pilar pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.



BAB I

Analisis Ekonomi Regional

Sub Bab Pembahasan:

Analisis Perkembangan
Indikator Makro Ekonomi

Analisis Perkembangan Indikator
Kesejahteraan/Pembangunan



Humas Kanwil DJPb Kalbar
Tugu Digulis

TUGU DIGULIS

Monumen Sebelas Digulis Kalimantan Barat, disebut juga sebagai **Tugu Digulis** atau **Tugu Bambu Runcing**. Monumen ini didirikan sebagai peringatan atas perjuangan sebelas tokoh Sarekat Islam di Kalimantan Barat

Source: Wikipedia

BAB I

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1. Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki visi "Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan". Dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, penyediaan infrastruktur yang memadai guna mengurangi ketimpangan antar wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penegakan hukum.

Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, dan pengurangan angka kemiskinan, merupakan cerminan dari capaian kinerja pembangunan yang berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator makro ekonomi daerah berperan penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Selain itu, indikator-indikator tersebut juga menjadi dasar dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan, khususnya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.

1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian dalam suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga PDRB dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah. APBN merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara regional maupun nasional. APBN juga berfungsi

sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi karena dapat diarahkan untuk merespon perubahan yang terjadi. APBN memberikan dukungan dari berbagai aspek (investasi, pendidikan, infrastruktur, dst) untuk mendorong produktivitas yang berdampak positif pada PDB maupun PDRB

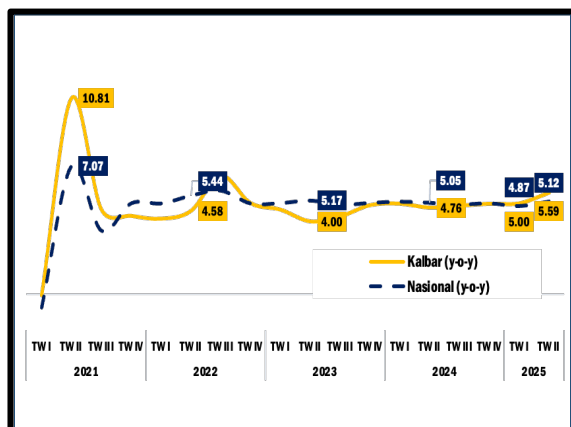
Di tengah berbagai tantangan perekonomian global sampai dengan pertengahan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan kemampuan untuk bertahan pada lajur yang solid. Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan Barat yang tetap tumbuh dengan konsisten.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kalimantan Barat pada Triwulan II Tahun 2025 tumbuh 5,59% secara *y-on-y* dan tumbuh sebesar 1,94% secara *q-to-q*

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan dalam periode waktu tertentu. Pada Triwulan II tahun 2025 perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi dengan angka capaian pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% (*y-on-y*) atau secara kumulatif 4,99% (*c-to-c*). Sejalan dengan ekonomi di tingkat Nasional yang tumbuh konsisten di atas 4%, ekonomi Kalimantan Barat mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,59% (*y-on-y*) lebih tinggi secara tahunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Angka tersebut mencerminkan penguatan ekonomi Kalimantan Barat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

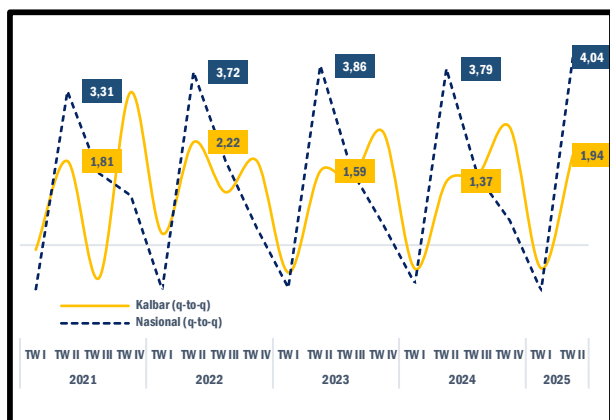
Grafik1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dan Nasional Secara (Y-On-Y)



Sumber: BPS (diolah)

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat secara *q-to-q* pada Triwulan II tahun 2025 mencapai angka 1,94% dibandingkan dengan periode Triwulan I 2025.

Grafik1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dan Nasional (*q-to-q*)

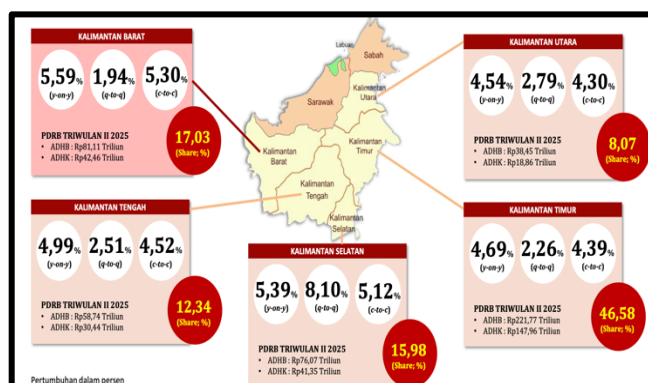


Sumber: BPS Kalbar dan BPS Pusat (diolah)

Pertumbuhan tertinggi dialami oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebesar 39,24% yang sejalan dengan produksi bauksit yang tumbuh sebesar 269,25% secara tahunan. Sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yakni sebesar 12,3%, hal tersebut sejalan dengan mulai beroperasinya Kawasan industri di Kalimantan Barat utamanya di Ketapang dan Kayong Utara. Sementara itu jasa Pendidikan mengalami kontraksi terdalam sebesar 0,96% seiring dengan belanja Pendidikan yang berkontraksi sebesar 21,49% secara tahunan.

Ekonomi Kalimantan Barat secara *q-to-q* memiliki pola yang sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi di Kalimantan Barat sejalan dengan nasional serta saling memiliki keterkaitan dan berpengaruh satu sama lain.

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan



Sumber: BPS Kalbar

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan yang mencapai 4,95% (*y-on-y*) pada Triwulan II 2025, Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 5,59%. Dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat memberikan andil sebesar 17,03% menempatkannya di urutan kedua setelah Kalimantan Timur yang mendominasi dengan kontribusi sebesar 46,58%. Capaian ini menunjukkan bahwa Kalimantan Barat tidak hanya tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata kawasan tetapi juga menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi regional yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan dan alokasi kebijakan fiskal di tingkat sub-nasional.

b. PDRB Kalimantan Barat

Pada Triwulan II Tahun 2025 PDRB ADHB Kalimantan Barat adalah Rp81.108,71miliar, sementara PDRB ADHK adalah sebesar Rp42.463,86 miliar

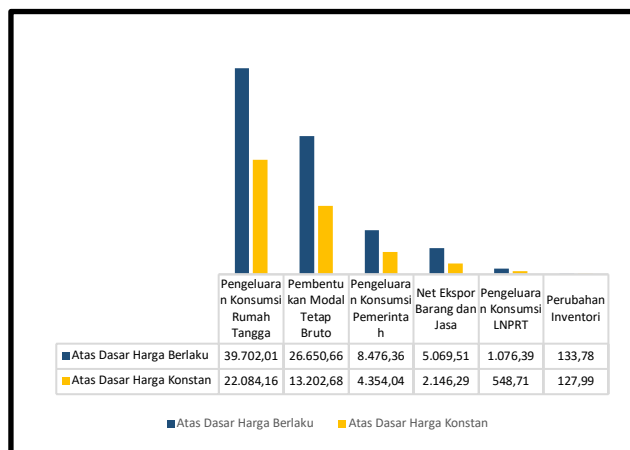
Kondisi ekonomi Provinsi Kalimantan Barat dipengaruhi oleh berbagai indikator perekonomian.

Salah satu indikator utama yang mencerminkan kemajuan perekonomian Kalimantan Barat adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini memberikan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Kalimantan Barat. Menurut Sadono Sukirno (2006), PDRB merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu daerah dalam periode tertentu baik dari sektor primer, sekunder, maupun tersier.

1) PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah jumlah seluruh pengeluaran akhir atas barang dan jasa yang diproduksi oleh unit-unit ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Pendekatan ini menggambarkan tingkat permintaan akhir dalam perekonomian daerah.

Grafik1. 3 PDRB Menurut Pengeluaran Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2025



Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Triwulan II Tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti jika dibandingkan dengan triwulan I. Perekonomian Kalimantan Barat masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup hampir separuh PDRB Kalimantan Barat yaitu sebesar 48,95%; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 32,86%; Komponen PKP sebesar 10,45%; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 18,89%; Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai

pengurang sebesar 12,64%; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,33%.

Tabel 1. 1 Tingkat Kontribusi Komponen PDRB Kalimantan Barat Menurut Pengeluaran

Komponen	Triwulan II 2024	Triwulan II 2025
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	49,91	48,95
PMTB	31,7	32,86
Ekspor	15,78	18,89
Impor	9,53	12,64
Konsumsi Pemerintah	11,31	10,45
Konsumsi LNPRT	1,32	1,33
Perubahan Inventori	-	0,16

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Barat Menurut Pengeluaran

Komponen	Pertumbuhan (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,44
PMTB	8,6
Ekspor	54,76
Impor	104,24
Konsumsi Pemerintah	-0,31
Konsumsi LNPRT	10,47
Perubahan Inventori	-

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Pertumbuhan ekonomi terjadi pada tiga komponen pengeluaran diantaranya Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang yang menyumbang laju pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 104,24%; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 54,76%; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) yang menyumbang laju pertumbuhan sebesar 10,47%; Komponen PMTB sebesar 8,6%; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,44%. Satu komponen mengalami kontraksi yaitu Komponen

Pengeluaran Pemerintah sedalam 0,31%. Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan yang signifikan salah satunya disebabkan oleh mulai beroperasinya Kawasan Industri di Kalimantan Barat yang membutuhkan sejumlah bahan baku impor. Sementara itu, Komponen Pengeluaran Pemerintah terkonsentrasi yang disebabkan oleh normalisasi belanja pemerintah, yang mengacu pada penghilangnya anggaran besar terkait pemilihan umum (Pemilu) di tahun sebelumnya. Sehingga belanja pemerintah kembali pada level yang lebih stabil.

Sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat terbesar berdasarkan pengeluaran yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yakni sebesar 2,83% dari total pertumbuhan. Hal tersebut salah satunya didorong oleh momen hari raya keagamaan dan libur sekolah yang terjadi sepanjang triwulan II.

2) PDRB Menurut Lapangan Usaha

Sejalan dengan PDRB menurut pengeluaran, struktur PDRB Provinsi Kalimantan Barat menurut lapangan usaha pada Triwulan II Tahun 2025 tidak mengalami perubahan berarti yakni masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 20,91% dan Industri Pengolahan sebesar 15,66%.

Tabel 1. 3 Tingkat Kontribusi Komponen PDRB Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha

Komponen	Triwulan II 2024	Triwulan II 2025
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,81	20,91
Industri Pengolahan	15,38	15,66
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,94	14,3
Konstruksi	12,1	12,5
Pertambangan dan Penggalian	4,99	6,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,95	6,46
Transportasi dan Pergudangan	4,92	4,49
Informasi dan Komunikasi	4,08	3,97
Jasa Pendidikan	3,6	3,34
Jasa Keuangan	3,27	3,14
Real Estate	2,76	2,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,57	2,58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,14	2,07
Jasa Lainnya	0,81	0,82
Jasa Perusahaan	0,44	0,41
Pengadaan Listrik, Gas	0,13	0,13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan I tahun 2025 secara *year on year* adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 39,24%, diikuti Konstruksi sebesar 12,13%. Pertumbuhan yang signifikan pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dipengaruhi oleh peningkatan penggalian bauksit. Di Kalimantan Barat, proyek *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR) di Mempawah menjadi tonggak penting. Selain itu, Pemerintah Daerah juga didesak untuk melakukan penyidikan terhadap pertambangan ilegal dengan kebijakan setiap penambang harus memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Tabel 1. 4 Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha

Komponen	Pertumbuhan (%)
Pertambangan dan Penggalian	39,24
Konstruksi	12,13
Jasa Lainnya	9,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,39
Informasi dan Komunikasi	6,41
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,94
Jasa Perusahaan	3,58
Industri Pengolahan	3,31
Jasa Keuangan	3,27
Pengadaan Listrik, Gas	2,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,89
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,67
Real Estate	1,87
Transportasi dan Pergudangan	1,41
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,79
Jasa Pendidikan	-0,96

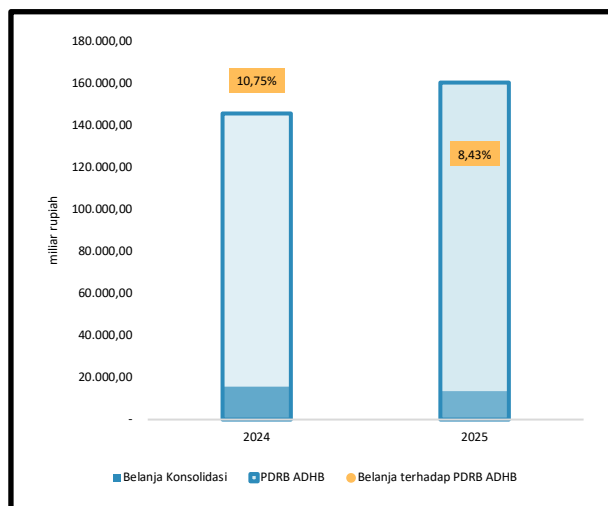
Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar Kalimantan Barat Triwulan II 2025 berdasarkan lapangan usaha yaitu sektor pertambangan yakni sebesar 1,68% dari total pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada Triwulan II Tahun 2025 dan diikuti sektor konstruksi yang menyumbang 1,22% dari total pertumbuhan.

1.1.2. Kontribusi Fiskal (Pengeluaran Pemerintah)

Kontribusi fiskal khususnya melalui komponen pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan PDRB. Komponen ini berfungsi sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana peran belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor di suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah yang efektif, efisien dan tepat sasaran (tercermin dari realisasi belanja pemerintah) akan memberi dampak yang signifikan terhadap pembentukan PDRB serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Meskipun dampak positif dari pengeluaran tersebut tidak langsung dirasakan oleh masyarakat atau memerlukan jeda waktu sebelum efeknya terlihat jelas. Total pengeluaran pemerintah di Kalimantan Barat merupakan akumulasi dari realisasi belanja APBN dan belanja APBD atau disebut dengan belanja konsolidasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Grafik1. 4 Kontribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembentukan PDRB



Sumber: GFS dan BPS Kalbar (diolah)

Tingkat kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB ADHB di Kalimantan Barat pada Triwulan II 2025 mengalami penurunan yang semula 10,75% menjadi 8,43%. Penurunan tersebut disebabkan karena pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHB) lebih cepat dibandingkan dengan belanja pemerintah konsolidasi. Oleh sebab itu, pemerintah pada

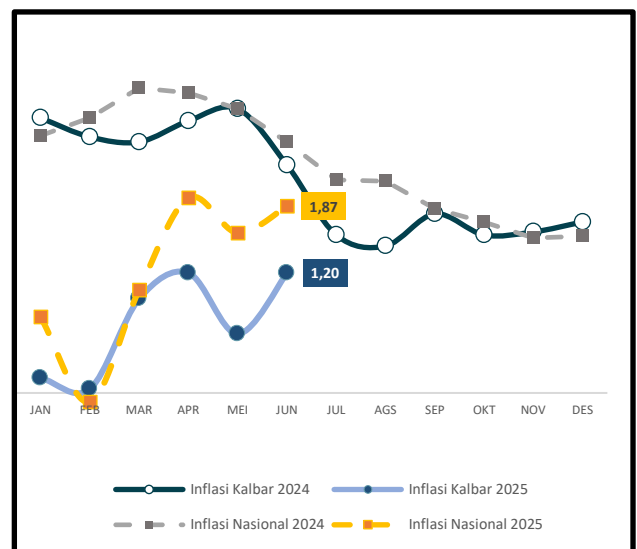
tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mengakselerasi penyerapan belanja seefisien dan seefektif mungkin terkhususnya belanja modal sebagai belanja produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di regional Kalimantan Barat

1.1.3. Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi Kalimantan Barat pada Triwulan II Tahun 2025 terkendali pada angka 1,20% (y-on-y) dan berada di bawah tingkat inflasi nasional yaitu sebesar 1,87% (y-on-y).

Inflasi merupakan kondisi dimana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Tingkat inflasi yang terkendali akan memberikan dampak yang positif karena mendorong perkembangan ekonomi di daerah. Namun, apabila terjadi tingkat inflasi yang terlalu tinggi (tidak terkendali) maka akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Grafik1. 5 Tingkat Inflasi Kalimantan Barat dan Nasional Secara Year On Year

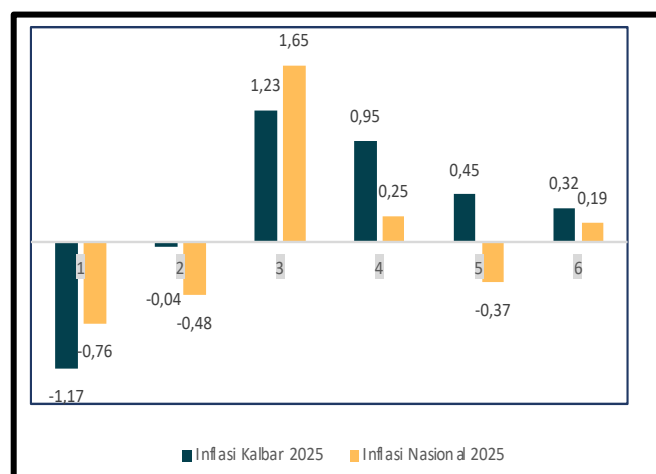


Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Inflasi Kalimantan Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 masih terus terkendali dan berada pada target inflasi nasional yaitu sebesar 1,20%. Inflasi tahunan Juni 2025 lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan bulan sebelumnya, namun lebih rendah apabila dibandingkan dengan inflasi Juni 2024 yang mencapai angka 2,28%. Secara *year-to-date*

(*y-to-d*) Inflasi Kalimantan Barat pada Juni 2025 mencapai 0,83%. Tingkat inflasi Kalimantan Barat tersebut, baik secara *year to date* dan *year on year* berada dibawah tingkat inflasi nasional yang mencapai 1,38% (ytd) dan 1,87% (yoy). Sepanjang periode Triwulan II 2025, inflasi secara *y-on-y* mengalami tren yang cukup fluktuatif. Inflasi tertinggi mencapai angka 1,20% yang terjadi pada bulan April dan Juni. Keduanya dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *year-on-year* pada Juni tahun 2025, antara lain minyak goreng, ikan kembung, udang basah, kopi bubuk, dan ikan baung. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *year-on-year* pada Juni tahun 2025 adalah harga telepon seluler. Tingkat inflasi Kalimantan Barat pada Juni 2025 secara *month to month* sebesar 0,32% dan berada di atas tingkat inflasi nasional yang mencapai 0,19% (*m-to-m*). Sampai dengan triwulan II 2025, inflasi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi dengan tingkat inflasi tertinggi pada bulan Maret 2025 secara *m-to-m*. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* pada Juni 2025, antara lain bawang merah, ikan tongkol, wortel, beras, dan udang basah.

Grafik1. 6 Tingkat Inflasi Kalimantan Barat dan Nasional Secara Month To Month



Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi terbesar secara *y-on-y*. Hal ini bisa terjadi sebab hari raya keagamaan dan momen libur sekolah yang mendorong meningkatnya permintaan beberapa bahan pangan. Hal tersebut mengartikan bahwa menjaga harga dan stok bahan makanan harus menjadi fokus utama dalam mengendalikan inflasi di Kalimantan Barat. Disisi lain, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil inflasi kedua terbesar secara *y-on-y* pada Juni 2025 dengan komoditas emas perhiasan, pasta gigi, sampo, dan parfum. Komoditas udang basah selalu menyumbang inflasi

Tabel 1. 5 Tingkat Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Kalimantan Barat Periode Juni 2025

Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi (v-on-v)	Andil Inflasi (v-on-v)	Tingkat Inflasi (m-to-m)	Andil Inflasi (m-to-m)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,33	0,47	0,36	0,14
Pakaian dan Alas Kaki	1,72	0,08	0,04	~0
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,2	0,03	0,07	0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,02	~0	0,06	~0
Kesehatan	1,04	0,03	0,07	~0
Transportasi	1,05	0,12	1,03	0,12
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,57	-0,03	0	0
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,84	0,03	0,14	~0
Pendidikan	2,6	0,1	0,12	~0
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,27	0,11	0,32	0,03
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,91	0,26	0,29	0,02
Umum	1,20	1,20	0,32	0,32

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

setiap bulan selama 5 bulan sampai dengan Juni 2025 dan secara kumulatif menyumbang 0,13%. Hal tersebut dapat disebabkan oleh fluktuasi harga yang terus-menerus terhadap udang basah terutama karena faktor permintaan dan pasokan yang tidak stabil di pasar lokal. Karakteristik udang sebagai komoditas makanan laut segar bergantung pada banyak faktor terutama faktor alam dan logistik.

Kendala yang dihadapi Kalimantan Barat dalam pengendalian inflasi diantaranya pengelolaan pasokan di beberapa sentra produksi diluar Kalimantan Barat (yaitu ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas sayuran yang berasal dari Pulau Jawa), distribusi pasokan BBM (terjadinya bencana banjir pada jalur distribusi), masuknya siklus musim tanam di sentra produksi, peningkatan harga pangan global, serta gangguan cuaca. Berbagai kendala tersebut diperkirakan dapat memengaruhi pencapaian inflasi periode selanjutnya. Terdapat upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh TPID dalam mengendalikan inflasi seperti dengan memotong rantai pasokan, menyelenggarakan "Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah", serta rutin mengecek secara langsung harga dan ketersediaan komoditas di pasar

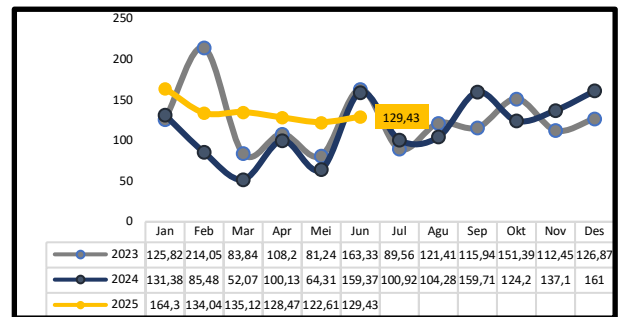
1.1.4. Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor pada suatu wilayah dalam periode tertentu.

Neraca Perdagangan Kalimantan Barat Periode Triwulan II Tahun 2025 Berada pada Kondisi Surplus US\$129,43 juta

Nilai neraca perdagangan Kalimantan Barat secara akumulatif mencapai surplus US\$380,51 pada April s.d. Juni 2025. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 17,51% dibandingkan nilai akumulatif pada Triwulan II Tahun 2024 yang mencapai US\$ 323,81 juta.

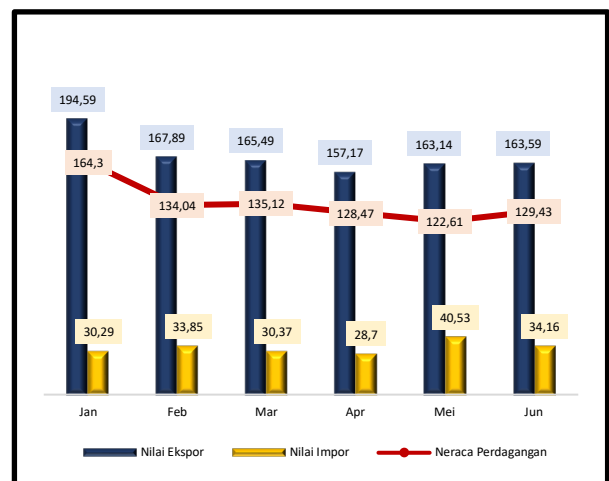
Grafik1. 7 Neraca Perdagangan Kalimantan Barat Tahun 2023 s.d. 2025



Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Nilai ekspor Kalimantan Barat pada Juni 2025 meningkat 0,28% dibanding Mei 2025 yaitu dari US \$ 163,14 juta menjadi US \$ 163,59 juta sementara nilai impor Kalimantan Barat Juni 2024 turun 15,72% dibanding Mei 2025 yaitu dari US \$ 40,53 juta menjadi US \$ 25,19 juta.

Grafik1. 8 Nilai Ekspor dan Impor Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2025



Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah selain memperhatikan sisi ekonomi juga harus menekankan pada pertumbuhan, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Secara umum, kinerja ekonomi publik ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam beberapa indikator diantaranya tingkat kemiskinan,

tingkat pengangguran, rasio gini, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

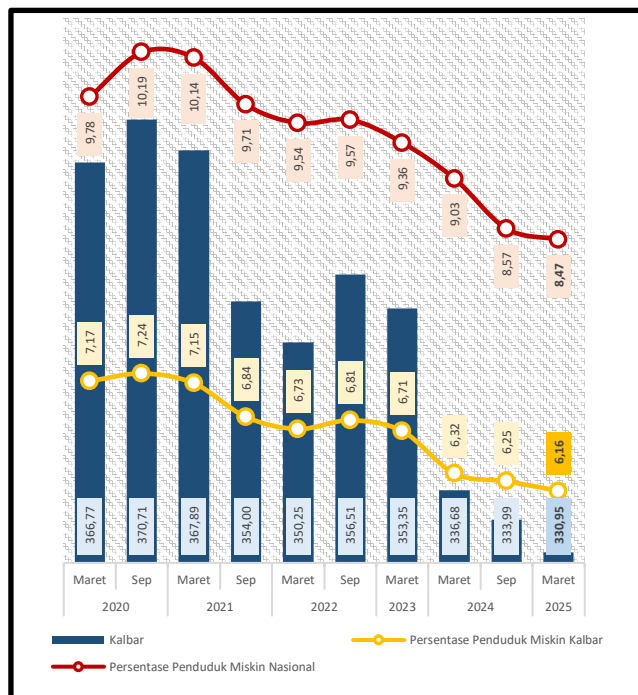
1.2. Analisis Indikator Kesejahteraan

1.2.1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kalimantan Barat di Bawah Presentase Nasional dari Tahun 2020-2025

Pembangunan di satu sisi meningkatkan kesejahteraan, namun di sisi lain ketidakmerataannya dapat menyebabkan lahirnya keterbelakangan dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi standar hidup yang layak.

Grafik1. 9 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kalbar & Nasional Tahun 2020 s.d. 2025



Sumber: BPS Pusat dan BPS Kalbar (diolah)

Persentase penduduk miskin Kalimantan Barat pada Maret 2025 sebesar 6,16%, turun 0,09% poin dibandingkan dengan September 2024. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sejumlah 330,95 ribu orang turun sekitar 3,04 ribu orang dibandingkan dengan September 2024. Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, pada

periode September 2024–Maret 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,14 persen poin sementara persentase kemiskinan di pedesaan turun sebesar 0,04 poin.

Tabel 1. 6 Garis Kemiskinan Kalimantan Barat

Tahun	Garis Kemiskinan			Sumbangan Garis Kemiskinan		
	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total
Maret 2024	450.558	144.951	595.509	75,66	24,34	100,00
September 2024	460.485	150.835	611.320	75,33	24,67	100,00
Maret 2025	468.496	154.386	622.882	75,21	24,79	100,00
Perubahan September 2024-Maret 2025 (%)	1,74	2,35	1,89	-	-	-

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Adapun Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Selama September 2024 – Maret 2025, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,89 persen yaitu dari Rp611.320 per kapita per bulan pada bulan September 2024, menjadi Rp622.882 per kapita per bulan pada Maret 2025. Pada Maret tahun 2025 Garis Kemiskinan Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp622.882/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp468.496 (75,21%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp154.386 (24,79%). Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM), dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan.

Apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional, kemiskinan di Kalimantan Barat tergolong masih cukup baik dibuktikan dengan tingkat kemiskinan yang selalu berada di bawah rata-rata nasional sejak tahun 2022 s.d. Maret 2025. Pemerintah pusat maupun daerah terus melakukan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin secara bertahap khususnya pada masa pandemi tahun 2020-2022.

Terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan diantaranya rendahnya tingkat pendidikan,

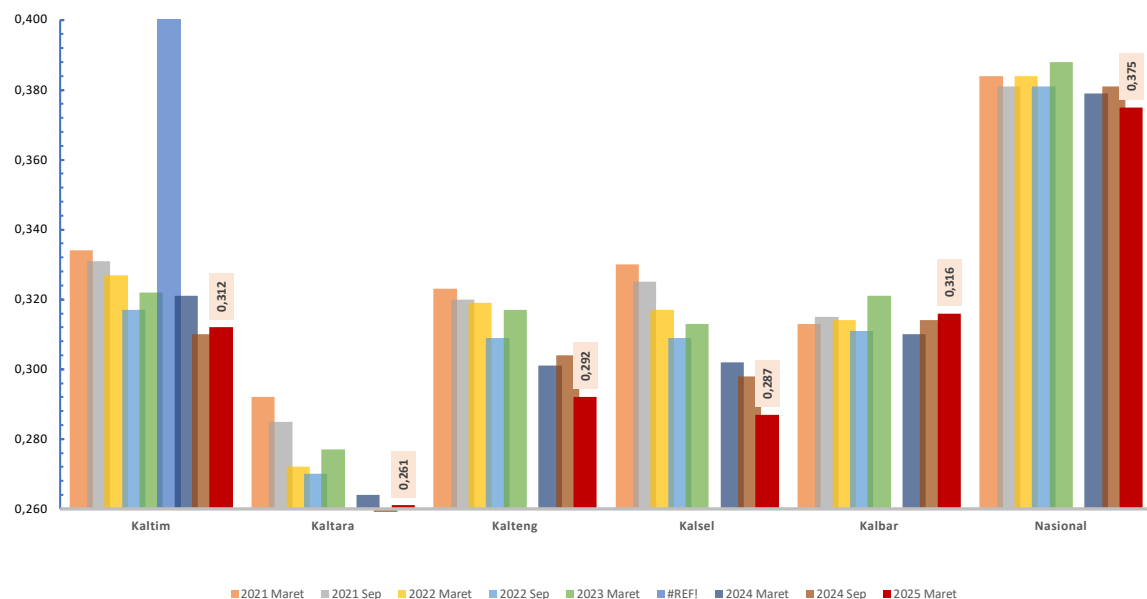
rendahnya derajat kesehatan, lapangan kerja yang rendah dan terisolasinya suatu penduduk. Beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Kalimantan Barat guna mengurangi angka kemiskinan melalui beberapa langkah diantaranya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro, serta peningkatan akses permodalan untuk keluarga miskin. Selain itu, pemerintah setempat juga berusaha menguatkan layanan dasar yaitu melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, dan sanitasi yang memadai untuk masyarakat di wilayah miskin ekstrem. Selain itu pemerintah dapat melakukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal untuk menciptakan solusi

1.2.2. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Koefisien *Gini Ratio* Kalimantan Barat Sebesar 0,316 Pada Maret 2025 Dan Berada di Bawah Rata-Rata Nasional

Indeks Gini (*Gini Ratio*) yang merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Koefisien Gini memiliki indeks yang memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal. Distribusi pendapatan suatu daerah dikatakan sangat timpang bila angka koefisien gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan

Grafik1. 10 Rasio Gini Kalimantan Barat dan Nasional



Sumber: BPS Pusat dan BPS Kalbar (diolah)

berkelanjutan yang sesuai kebutuhan masyarakat, memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan program-program pemerintah dapat diakses dengan mudah dan transparan oleh masyarakat miskin ekstrem.

relatif merata bila angka koefisien gini terletak antara 0,2 sampai 0,35.

Pada Maret 2025, koefisien rasio gini di Kalimantan Barat terpantau lebih baik karena masih terjaga di bawah rata-rata nasional. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Barat yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,316. Angka ini naik 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini

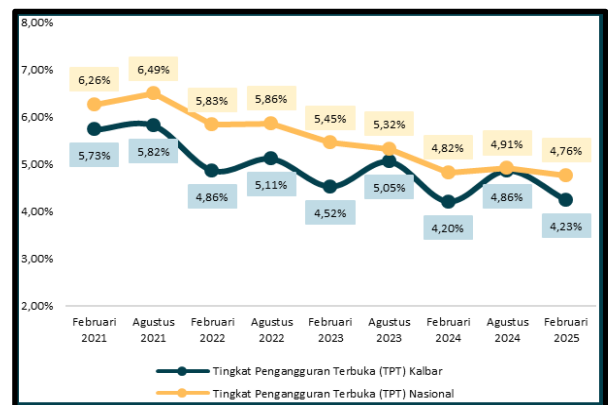
Ratio September 2024 yang sebesar 0,314. *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,348, naik 0,007 poin dibanding *Gini Ratio* September 2024 yang sebesar 0,341. *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,267, naik 0,009 poin dibanding *Gini Ratio* September 2024 yang sebesar 0,258. Ketimpangan di Kalimantan Barat menurut kriteria Bank Dunia tergolong sebagai ketimpangan rendah dengan persentase pengeluaran kelompok penduduk Provinsi Kalimantan Barat 40% berpengeluaran rendah adalah sebesar 21,39%. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,11%. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 23,27%. Meskipun koefisien *Gini Ratio* Kalimantan Barat sudah berada dibawah rata-rata nasional terus dilakukan berbagai upaya melalui pembangunan yang diprioritaskan pada daerah relatif tertinggal. Terutama dalam hal penyediaan pelayanan publik agar kesenjangan antar daerah kota dan kabupaten tidak semakin lebar. Orientasi pembangunan tidak semata berorientasi pada mengejar pertumbuhan yang tinggi tetapi juga harus mempertimbangkan pemerataan dan kesejahteraan.

1.2.3. Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah nasional dan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga dalam penanggulangannya harus dilakukan oleh semua *stakeholders* terkait secara bersama dan terintegrasi antar lintas sektor dan masyarakat, dengan cara mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat pada Februari Tahun 2025 sebesar 4,23% dan Berada di Bawah TPT Nasional Sebesar 4,76%

Grafik1. 11 TPT Kalimantan Barat dan Nasional

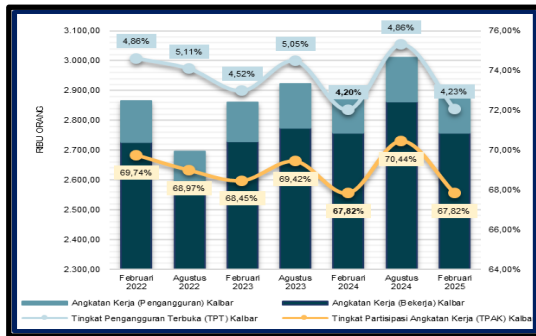


Sumber: BPS Pusat dan BPS Kalbar (diolah)

Pada Februari 2025, jumlah Penduduk Usia Kerja di Kalimantan Barat sebanyak 4,31 juta orang dan mengalami kenaikan 66,24 ribu jiwa jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penduduk Usia Kerja di Kalimantan Barat didominasi oleh angkatan kerja sebesar 67,64% atau 2,91 juta orang, dan sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2025 meningkat 37,04 ribu orang jika dibandingkan Februari 2024. Namun, TPAK Kalimantan Barat mengalami penurunan 0,18% poin karena tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan kerja di Kalimantan Barat didominasi oleh penduduk yang bekerja sebesar 95,77% atau 2,79 juta orang dan sisanya merupakan pengangguran (TPT) sebesar 4,23% atau 123,37 ribu orang.

Sesuai dengan grafik 1.12 TPT hasil Sakernas pada Februari 2025 mencapai sebesar 4,23%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat pengangguran. Pada Februari 2025, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,03% poin dibandingkan dengan Februari 2024.

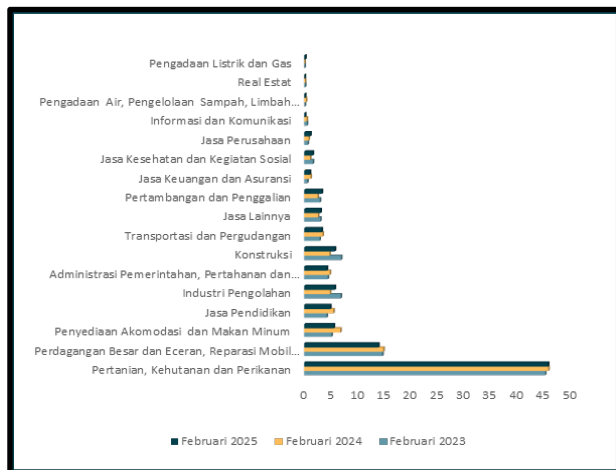
Grafik1. 12 Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT Kalimantan Barat



Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Pada Februari 2025, tingkat pekerja paruh waktu perempuan 38,17% lebih tinggi dibanding pekerja paruh waktu laki-laki 20,75%. Dibandingkan Februari 2024, tingkat pekerja paruh waktu laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,35% poin. Sementara itu, tingkat pekerja paruh waktu perempuan mengalami penurunan sebesar 1,18% poin. Lapangan pekerjaan utama yang menyerap tenaga kerja terbesar di Kalimantan Barat masih berada pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 45,81%. Hal ini sejalan dengan sektor lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Kalimantan Barat sampai dengan saat ini. Apabila dilihat dari segi pendidikan, penduduk yang bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah. Sementara yang terendah terdapat pada tamatan Diploma I/II/III sebesar 2,82%.

Grafik1. 13 Presentase Kontribusi Lapangan Pekerjaan Utama Di Kalimantan Barat



Sumber: BPS Kalbar (diolah)

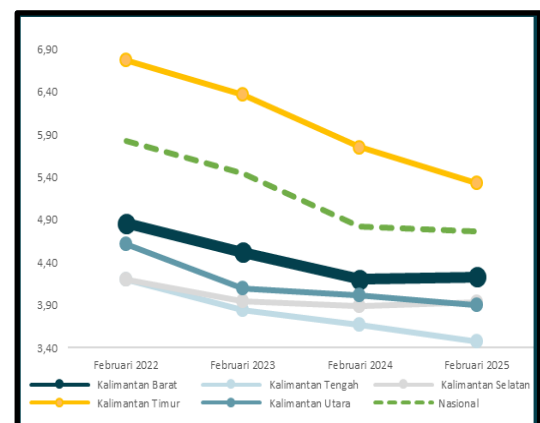
Tabel 1. 7 Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Yang Di Tamatkan

Jenis Pendidikan	Februari 2023 (%)	Februari 2024 (%)	Februari 2025 (%)
SD ke Bawah	48,96	42,55	42,08
Sekolah Menengah Pertama	17,63	16,73	17,07
Sekolah Menengah Atas	17,76	21,90	21,77
Sekolah Menengah Kejuruan	5,76	6,66	6,69
Diploma I/II/III	2,39	2,24	2,82
Universitas	7,50	9,92	9,57
JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Penyerapan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang cenderung rendah dan bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk yang bekerja di Kalimantan Barat merupakan *unlabor skill*. Pekerjaan pada sektor perikanan, kehutanan dan perikanan sering kali tidak memerlukan tingkat pendidikan atau keterampilan tertentu untuk bekerja didalamnya.

Grafik1. 14 TPT Regional Kalimantan dan Nasional



Sumber: BPS Kalbar (diolah)

TPT Kalimantan Barat pada Februari 2025 berada di bawah capaian nasional. Namun, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di regional Kalimantan, TPT Kalimantan Barat tergolong tinggi yakni menempati

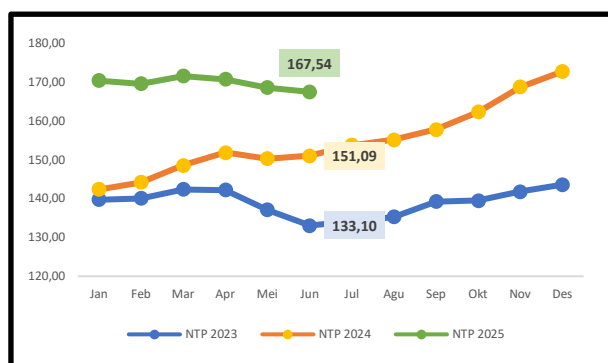
posisi tertinggi nomor dua setelah Kalimantan Timur yang mencapai 5,33%.

1.2.4. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP Kalimantan Barat Bulan Juni 2025 Mencapai 167,54 Poin Mengalami Penurunan 0,64% dan Menempati Posisi Tertinggi di Wilayah Kalimantan

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani yang mengukur kemampuan tukar produk yang dihasilkan atau dijual petani (It) dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib) untuk proses produksi dan konsumsi rumah tangga. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produk.

Grafik1. 15 Perkembangan NTP Kalimantan Barat

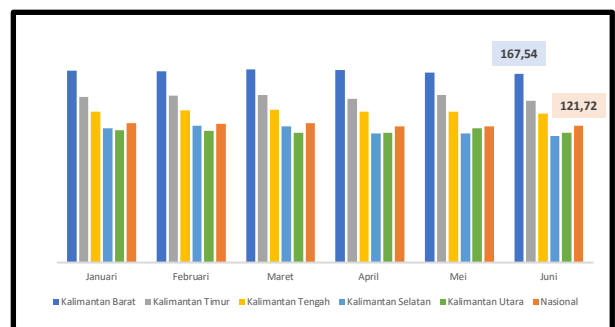


Sumber: BPS Kalbar (diolah)

NTP di Kalimantan Barat mengalami tren penurunan selama Triwulan II Tahun 2025. Meskipun angka tersebut masih relatif tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya pada bulan yang sama, arah pergerakannya mengalami penurunan secara bertahap, menandakan tekanan terhadap daya beli petani. Komoditas yang berperan signifikan dalam penurunan NTP antara lain adalah kelapa sawit, karet, cabe rawit, dan babi. Tren penurunan NTP di Kalimantan Barat pada triwulan II tahun 2025 juga dipengaruhi oleh penurunan NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,10%.

Pada Juni 2025, It turun sebesar 0,46% dibanding It Mei 2025, yaitu dari 207,34 poin menjadi 206,40 poin. Capaian NTP Kalimantan Barat sepanjang triwulan I tahun 2025, selalu lebih besar dari 100. Secara umum, jika $NTP > 100$ maka petani mengalami surplus yang mengartikan bahwa harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya.

Grafik1. 16 NTP Regional Kalimantan Dan Nasional Triwulan II Tahun 2025

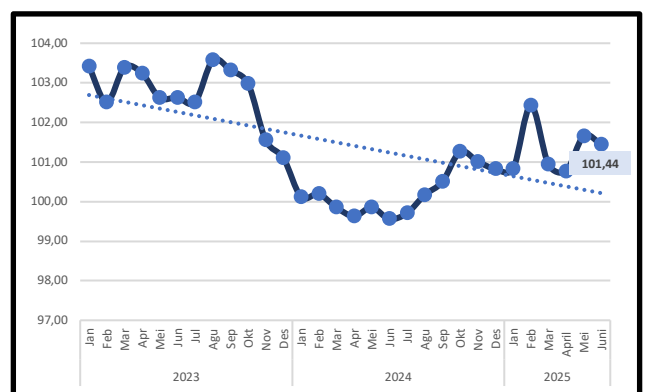


Sumber: BPS (diolah)

1.2.5. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang/jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dan keperluan nelayan dalam menghasilkan produk perikanan tangkap.

Grafik1. 17 Perkembangan NTN di Kalimantan Barat



Sumber: BPS Kalbar (diolah)

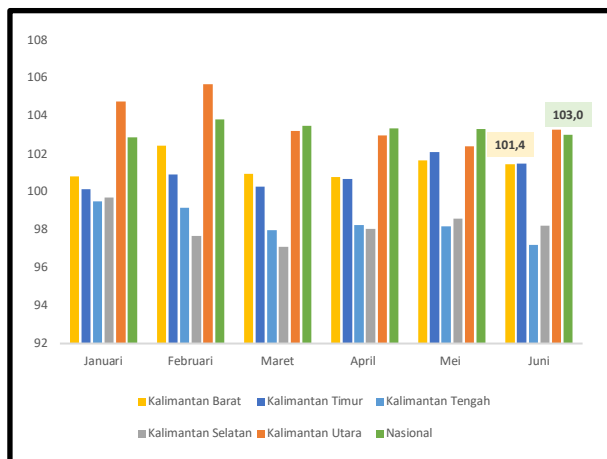
NTN di bawah 100 mengartikan bahwa kenaikan harga produksi nelayan lebih rendah daripada kenaikan harga konsumsi mereka, sehingga

mencerminkan penurunan kesejahteraan nelayan.

NTN Kalimantan Barat Bulan Juni 2025 Mencapai 101,44 Poin Mengalami Penurunan 0,22% dan Berada di Bawah Capaian Nasional sebesar 103,0

Pada Juni 2025, NTN mengalami penurunan 0,22% jika dibandingkan dengan bulan Mei 2025. Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, capaian NTN Kalimantan Barat tergolong rendah dan selalu berada dibawah capaian nasional sepanjang triwulan II tahun 2025. Kondisi ini berbanding terbalik dengan capaian NTP yang selalu menempati posisi tertinggi seregional Kalimantan dan berada diatas capaian nasional. Nelayan di Kalimantan Barat dihadapkan beberapa kendala antara lain kesulitan dalam mengakses bahan bakar bersubsidi sehingga mempengaruhi kegiatan melaut serta kehadiran cantrang asing yang semakin mempersempit lahan dan mempengaruhi hasil tangkapan ikan.

Grafik1. 18 NTN Regional Kalimantan dan Nasional Triwulan II Tahun 2025



Sumber: BPS Pusat (diolah)

Pemerintah lingkup Kalimantan Barat telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga NTN dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, seperti memfasilitasi dalam mendapatkan BBM bersubsidi, memberikan bantuan alat tangkap ikan dan kapal, serta memberikan edukasi untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan ikan.

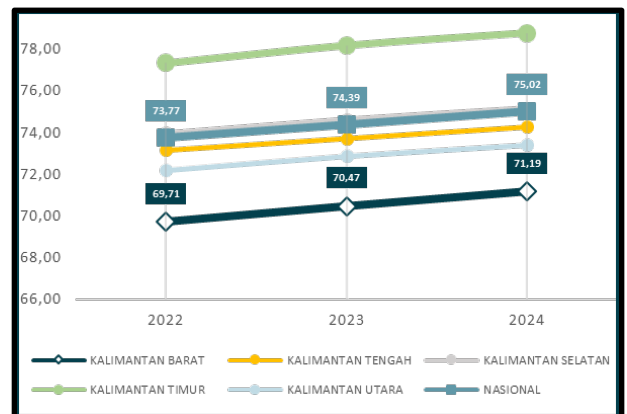
1.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kalimantan Barat pada Tahun 2024 Mencapai 71,19 (Kategori Tinggi). Namun Masih Berada di Bawah Capaian IPM Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan capaian pembangunan manusia di suatu wilayah yang diukur melalui pendekatan tiga dimensi yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat berdasarkan SP2020 LF pada tahun 2024 mencapai 71,19. Tingkat IPM Kalimantan Barat selama periode 2022 – 2024 mengalami tren kenaikan dan pada tahun 2023 mengalami perubahan status dari kategori sedang menjadi tinggi. Namun, IPM di Kalimantan Barat pada tahun 2022 – 2024 tidak pernah lebih tinggi dari capaian nasional dan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan capaian keempat provinsi lain di regional Pulau Kalimantan

Grafik1. 19 Capaian IPM Kalimantan Barat, Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2022-2024



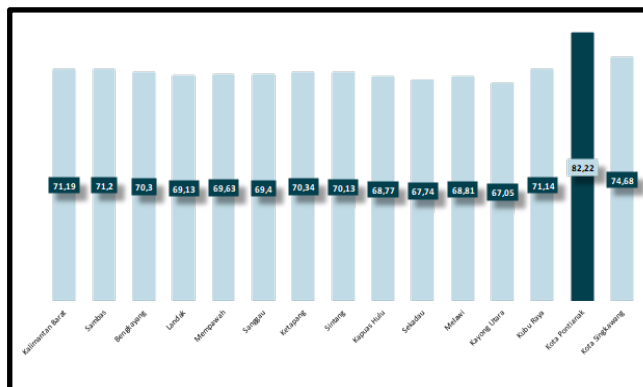
Sumber: BPS Pusat (diolah)

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direprestasikan oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2024 UHH Kalimantan Barat mencapai 73,94 tahun yang mengartikan bahwa rata-rata bayi baru lahir tahun 2024 diperkirakan dapat bertahan hidup hingga usia 73 s.d. 74 tahun. Jika UHH meningkat maka derajat kesehatan penduduk juga meningkat.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2024, RLS di Kalimantan Barat mencapai 7,78 yang mengartikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga 7,78 tahun atau setara kelas VII (kelas 1 SMP). Sedangkan, untuk HLS di Kalimantan Barat mencapai 12,68 mengartikan bahwa anak berusia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 12,68 tahun atau setara dengan SMA kelas III.

Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh rata-rata pengeluaran per kapita. Rata-rata pengeluaran per kapita Kalimantan Barat pada tahun 2024 mencapai Rp10,32 juta rupiah per kapita per tahun. Capaian pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar Rp9,81 juta rupiah per kapita per tahun. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penguatan daya beli masyarakat yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang jasa.

Grafik1. 20 IPM Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Tahun 2024



Sumber: BPS Pusat (diolah)

Apabila dilihat dari capaian IPM Kalimantan Barat pada masing-masing Kabupaten/Kota, maka terdapat 1 kota dengan kategori IPM sangat tinggi yaitu Kota Pontianak (82,22), 3 kabupaten/kota dengan kategori IPM tinggi yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang, dan

Kabupaten Singang. Sedangkan, 7 kabupaten lainnya berada pada IPM berkategori sedang.

Dengan terus meningkatnya IPM di Kalimantan Barat, ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dengan cara meningkatkan kapasitas dasar penduduk.

Upaya-upaya yang telah dilakukan di antaranya diantaranya meningkatkan pelayanan pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan diversifikasi ekonomi. Dalam sektor pendidikan, Pemprov Kalbar terus berupaya memperbaiki fasilitas sekolah, menambah tenaga guru, dan menyediakan bantuan pendidikan melalui Pergub Kalbar No. 16 Tahun 2024. Langkah ini bertujuan meningkatkan rata-rata lama sekolah serta memperluas akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Kemudian di sektor kesehatan, di mana Pemprov Kalbar terus memaksimalkan program-program kesehatan seperti imunisasi, kampanye penurunan stunting, dan peningkatan pelayanan kesehatan terus digalakkan untuk mendukung kualitas hidup masyarakat.



BAB II

Analisis Fiskal Regional

Sub Bab Pembahasan:

Analisis Laporan Realisasi Anggaran |
Progres Implementasi Program |
Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) |



Humas Kanwil DJPb Kalbar
Rumah Hakka

RUMAH HAKKA

Rumah Hakka atau **Tulou** merupakan bangunan rumah pedesaan China dengan bentuk bulat dan menyerupai benteng. Rumah adat Hakka tercatat menjadi yang kedua hadir di Asia Tenggara, setelah bangunan serupa lebih dulu ada di TMII Jakarta.

Source: iniborneo.com

BAB II

ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1. Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diusung dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. APBN 2025 disusun untuk menghadapi tantangan global, menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global. APBN diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mengoptimalkan potensi perekonomian sekaligus memperkuat daya saing dan produktivitas nasional.

Pelaksanaan APBN triwulan II tahun 2025 di wilayah Kalimantan Barat menunjukkan kinerja yang stabil dan tetap terjaga dalam rangka mendukung

agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara optimal.

Pendapatan Negara di Provinsi Kalimantan Barat s.d triwulan II 2025 terealisasi sebesar Rp5.639,23 miliar atau 45,50% dari target sebesar Rp12.393,29 miliar. Pendapatan ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp5.332,50 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya Penerimaan Perpajakan sebesar 5,61%, yang disumbang dari pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12,58%, Cukai sebesar 49,24%, Pajak Lainnya sebesar 847,04% dan Bea Keluar/Pungutan Ekspor sebesar 363,18%. Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak juga tumbuh sebesar 6,93%,

Tabel 2. 1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kalimantan Barat s.d Triwulan II 2024 Dan 2025 (dalam miliar rupiah)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025			%Growth Realisasi (yoy)
	Pagu	Realisasi	%Real	Pagu	Realisasi	%Real	
Pendapatan Negara dan Hibah	12.578,61	5.332,50	42,39%	12.393,29	5.639,23	45,50%	5,75
Penerimaan Perpajakan	11.774,30	4.746,31	40,31%	11.503,76	5.012,39	43,57%	5,61
Penerimaan Negara Bukan Pajak	804,31	586,19	72,88%	889,53	626,84	70,47%	6,93
Hibah	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Negara	33.406,01	14.595,89	43,69%	31.635,59	13.507,96	42,70%	(7,45)
Belanja Pemerintah Pusat (BPP)	12.506,10	4.911,81	39,28%	9.614,09	3.516,67	36,58%	(28,40)
Belanja Pegawai	4.115,82	2.259,67	54,90%	4.515,45	2.351,01	52,07%	4,04
Belanja Barang	6.054,40	2.012,51	33,24%	3.602,73	1.028,35	28,54%	(48,90)
Belanja Modal	2.321,86	633,36	27,28%	1.478,80	129,65	8,77%	(79,53)
Belanja Bantuan Sosial	14,03	6,27	44,68%	17,11	7,66	44,76%	22,24
Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
Transfer Ke Daerah	20.899,91	9.684,07	46,34%	22.021,50	9.991,29	45,37%	3,17
Dana Transfer Umum (DTU)	14.012,42	6.825,84	48,71%	14.915,62	7.211,83	48,35%	5,65
Dana Alokasi Umum	12.776,70	6.469,04	50,63%	13.508,52	6.731,40	49,83%	4,06
Dana Bagi Hasil	1.235,72	356,79	28,87%	1.407,10	480,43	34,14%	34,65
Dana Transfer Khusus (DTK)	4.796,90	1.668,14	34,78%	5.140,89	1.678,01	32,64%	0,59
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.665,71	99,81	5,99%	1.545,34	51,06	3,30%	(48,85)
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	3.131,19	1.568,33	50,09%	3.595,55	1.626,95	45,25%	3,74
Dana Otsus & DID	145,93	38,06	26,08%	51,95	25,98	50,00%	(31,75)
Dana Otsus & DID	145,93	38,06	26,08%	51,95	25,98	50,00%	(31,75)
Dana Desa	1.944,67	1.152,04	59,24%	1.913,03	1.075,48	56,22%	(6,65)
Dana Desa	1.944,67	1.152,04	59,24%	1.913,03	1.075,48	56,22%	(6,65)
Surplus/Defisit Anggaran	(20.827,40)	(9.263,38)	44,48%	(19.242,30)	(7.868,73)	40,89%	(15,06)

Sumber: Treasury Big Data, Kanwil DJP Kalbar, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat (diolah)

yang disumbang dari PNBP Lainnya sebesar 7,36% dan Pendapatan BLU sebesar 6,33%. PNBP masih memiliki ruang untuk dilakukan optimalisasi seiring dengan peningkatan aktivitas akses masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh negara dengan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan.

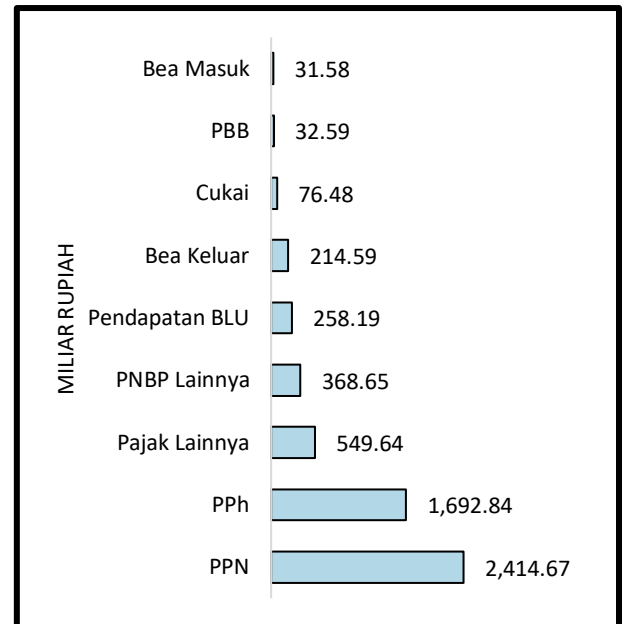
Sementara dari sisi Belanja Negara, alokasi pagu anggaran untuk Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp31.635,59 miliar yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp9.614,09 miliar serta Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp22.021,50 miliar. Pagu belanja tersebut mengalami penurunan sebesar 7,45% (yoy). Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp13.507,96 miliar atau 42,70% dari pagu yang telah ditetapkan. Belanja Negara mengalami penurunan realisasi sebesar 7,45% (yoy). BPP terealisasi sebesar Rp3.516,67 miliar (36,58% dari pagu) dan mengalami kontraksi sebesar 28,40% (yoy), dipengaruhi oleh kontraksi yang terjadi pada mayoritas jenis belanja pada BPP. Sementara itu, TKD terealisasi sebesar Rp9.991,29 miliar (45,37% dari pagu) dan mengalami peningkatan sebesar 3,17% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan positif pada seluruh jenis belanja pada TKD kecuali DAK Fisik, Dana Otsus dan DID serta Dana Desa. Belanja Negara sendiri memiliki peran penting sebagai stimulus perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan dampak *mutiplier effect* di Provinsi Kalimantan Barat.

2.1.1. Pendapatan Negara

a. Analisis Kontribusi Pendapatan Negara dan Hibah

Penerimaan Pendapatan Negara dan Hibah di Kalimantan Barat sampai dengan akhir triwulan II 2025 telah mencapai sebesar Rp5.639,23 miliar atau 45,50% dari pagu. Pendapatan Negara dan Hibah tersebut, mengalami pertumbuhan sebesar 5,75% (yoy), yang didominasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp5.012,39 miliar atau 88,88% dari total pendapatan Negara dan Hibah. Sedangkan PNBP menyumbang sebesar Rp626,84 miliar atau 11,12% dari total Pendapatan Negara dan Hibah.

Grafik 2. 1 Komponen Pendapatan Dalam APBN Regional Kalimantan Barat

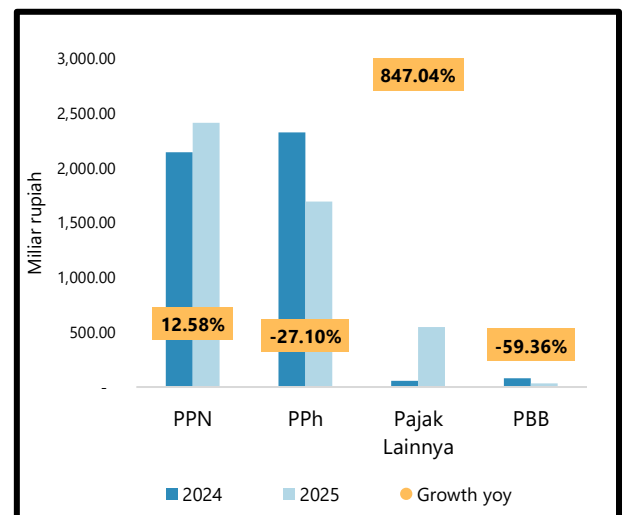


Sumber: *Treasury Big Data*, Kanwil DJP Kalbar, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat (diolah)

b. Analisa Perpajakan

1) Penerimaan Perpajakan

Grafik 2. 2 Tren Penerimaan Pajak Triwulan II Tahun 2022-2025 Kalimantan Barat



Sumber: *Treasury Big Data*, Kanwil DJP Kalbar (diolah)

Realisasi Penerimaan Perpajakan telah dihimpun oleh Kanwil DJP Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan akhir triwulan II mencapai Rp4.689,75 miliar atau 83,16% dari total Pendapatan Negara dan Hibah di Kalimantan Barat. Pendapatan pajak yang

dihimpun Kanwil DJP Provinsi Kalimantan Barat tumbuh 1,83% (yoy), terutama ditopang oleh peningkatan realisasi PPN dan Pajak Lainnya. Pertumbuhan PPN didorong oleh kenaikan PPN Dalam Negeri sebesar 21,53% (yoy), meskipun PPN Impor berkontraksi 23,03% (yoy). Kondisi ini mencerminkan meningkatnya perputaran produk dan konsumsi dalam negeri di Kalimantan Barat. Sementara itu, kenaikan pada pos Pajak Lainnya dipengaruhi oleh kebijakan deposit pajak.

Pos PPN dan PPH yang masih menjadi penyumbang terbesar lingkup regional Kalimantan Barat, yaitu sebesar Rp2.414,67 miliar untuk PPN dan Rp1.692,84 miliar untuk PPh. Walaupun komponen PPh menjadi penyumbang terbesar, namun PPh mengalami kontraksi sebesar 27,10% (yoy) karena terdampak oleh kebijakan pemindahan kewajiban perpajakan dari kantor cabang ke kantor pusat. Selain PPh juga terdapat komponen PBB yang mengalami kontraksi sebesar 59,36% (yoy), yang disebabkan oleh SPOP yang belum jatuh tempo serta adanya *shifting* penerimaan PBB dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Tabel 2. 2 Tingkat Kontribusi dan Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan Berdasarkan Sektor Triwulan II 2024 dan 2025

Sektor	Growth (%)		Kontribusi(%)	
	s.d. Juni 2024	s.d. Juni 2025	s.d. Juni 2024	s.d. Juni 2025
Perdagangan Besar dan Eceran	8,29	4,63	27,21	24,79
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,78	37,29	18,56	22,18
Industri Pengolahan	(9,97)	35,88	16,51	19,53
Transportasi dan Pergudangan	0,11	14,95	9,02	9,03
Administrasi Pemerintahan	(14,68)	0,31	9,54	8,33
Sektor Lainnya	30,76	(10,67)	20,74	16,13

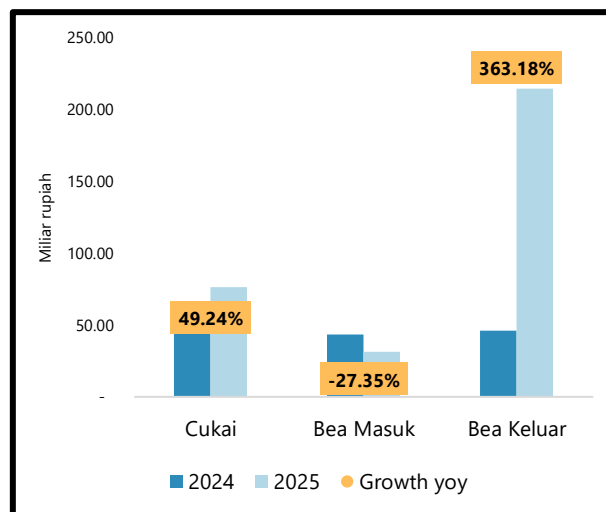
Sumber: Kanwil DJP Kalbar (diolah)

Jika dilihat berdasarkan sektor penerimaan pajak hingga triwulan II 2024, seluruh sektor dominan mencatat pertumbuhan positif (yoy). Sebaliknya, kelompok "sektor lainnya" yang terdiri dari 16 sektor mengalami kontraksi sebesar 10,67%. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi lima

sektor dominan terhadap total penerimaan pajak juga meningkat, dari 80,84% pada triwulan II 2024 menjadi 83,87% pada triwulan II 2025.

2) Penerimaan Bea Cukai

Grafik 2. 3 Tren Penerimaan Bea dan Cukai Triwulan II Tahun 2022-2025 Kalimantan Barat



Sumber: *Treasury Big Data*, Kanwil DJBC Kalbagbar (diolah)

Jumlah Penerimaan Bea Cukai yang berhasil di himpun oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat sampai dengan triwulan II 2025 telah terealisasi sebesar Rp322,65 miliar atau 5,72% dari total jumlah Pendapatan Negara dan Hibah. Penerimaan Bea Cukai s.d triwulan II tahun 2025 tumbuh positif didorong oleh meningkatnya penerimaan Cukai dan Bea Keluar. Adapun kinerja Cukai menguat seiring bertambahnya volume produksi rokok, dan didukung oleh beroperasinya dua pabrik rokok di Kalimantan Barat pada tahun 2025. Sementara itu, Bea Keluar juga mengalami pertumbuhan karena tingginya kolom tarif CPO pada Semester I 2025. Namun sebaliknya, Bea Masuk mengalami kontraksi secara tahunan (yoy), disebabkan karena pada tahun 2025 tidak terdapat importasi komoditas beras seperti pada tahun 2024.

Pertumbuhan pada komponen cukai berlanjut dari triwulan I ke triwulan II tahun 2025, dan dapat menjadi sinyal positif dalam mendukung penerimaan Bea dan Cukai di Wilayah Kalimantan Barat.

Tabel 2. 3 Top 5 Komoditi Dengan Devisa Ekspor dan Impor Terbesar di Kalimantan Barat s.d. Triwulan II 2025

Devisa Ekspor	Kontribusi (%)	Growth yoy (%)
Smelter Grade Alumina	64,98	46,33
CPO & Produk Turunan	13,72	(28,41)
Natural Rubber (SIR)	6,40	23,23
Palm Fatty Acid Distilate (PFAD)	3,14	140,94
Kelapa	2,93	54,95
Devisa Impor	Kontribusi (%)	Growth yoy (%)
Listrik	19,83	19,23
Kapal Tongkang	14,66	224,68
Barang Modal PT BAP	11,47	(24,39)
Pupuk Potash	9,70	186,05
Caustic Soda	9,29	-

Sumber: Kanwil DJBC Kalbagbar (diolah)

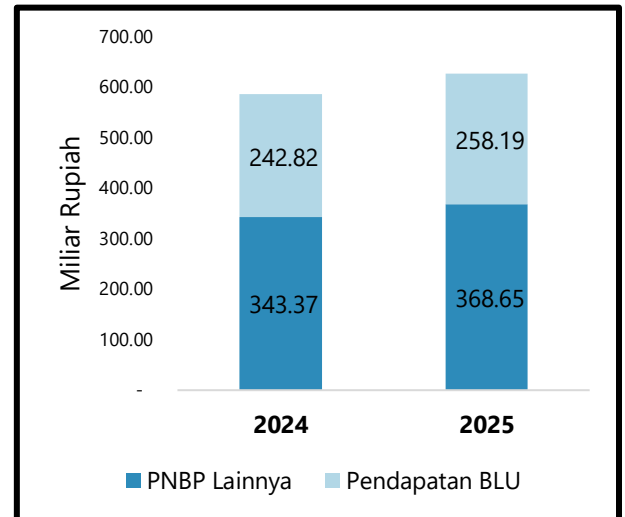
Lima komoditas penyumbang devisa ekspor terbesar di Kalimantan Barat adalah *Smelter Grade Alumina*; CPO dan Produk Turunannya; *Natural Rubber* (SIR); *Palm Fatty Acid Distilate* (PFAD); serta Kelapa. Seluruh komoditas yang dominan dalam menyumbang devisa ekspor mengalami pertumbuhan positif kecuali CPO dan Produk Turunannya yang mengalami kontraksi. Penurunan devisa dari CPO dipengaruhi oleh tingginya harga CPO di pasar global yang berimplikasi pada meningkatnya tarif Bea Keluar, sehingga memengaruhi dinamika permintaan dan penawaran. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan prioritas penggunaan produk CPO untuk penggunaan/pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang terlebih dahulu. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri perdagangan Nomor 2 Tahun 2025.

Komoditas penyumbang devisa impor terbesar di Kalimantan Barat adalah Listrik; Kapal Tongkang; Barang Modal PT BAP; serta Pupuk Potash. Kegiatan impor komoditas *Caustic Soda* baru mulai dilaksanakan pada semester II 2024. Komoditas tersebut dilakukan impor oleh PT. Pertamina Patra

Niaga sebagai salah satu langkah untuk mendukung peningkatan nilai tambah bauksit. *Caustic Soda* merupakan salah satu bahan baku utama dalam memproduksi *smelter grade*.

c. Analisa Komposisi PNPB

Grafik 2. 4 Penerimaan PNPB Kalimantan Barat Per Komponen s.d. Triwulan II



Sumber: *Treasury Big Data* (diolah)

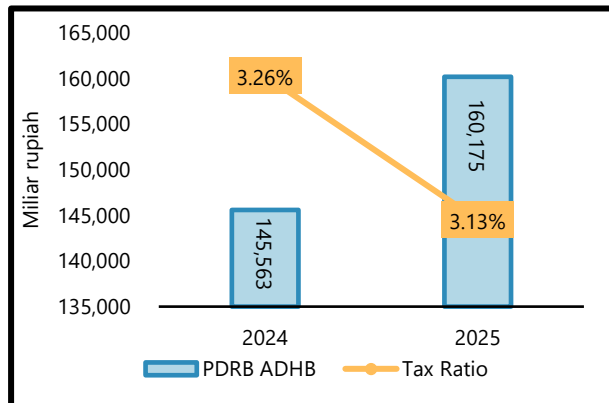
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) s.d triwulan II mencapai Rp626,84 miliar atau menyumbang 10,39% dari total Pendapatan Negara di Regional Kalimantan Barat. Realisasi penerimaan PNBP ini, mengalami pertumbuhan sebesar 6,93% (yoy) yang terdiri dari PNBP Lainnya yang tumbuh sebesar 7,36% (yoy) dan Pendapatan BLU yang tumbuh sebesar 6,33% (yoy). Pertumbuhan PNBP Lainnya karena hampir seluruh komponen mengalami kenaikan realisasi. Komponen Pos PNBP Lainnya yang mengalami kenaikan realisasi terbesar adalah Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu, Pendapatan Jasa Transportasi dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN. Selanjutnya untuk Pendapatan BLU juga tumbuh karena meningkatnya Pendapatan BLU dari Sewa, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU dan Pendapatan Hibah.

d. Analisa *Tax Ratio* terhadap PDRB

Tax Ratio merupakan perbandingan antara penerimaan perpajakan dengan Produk Domestik Bruto di suatu daerah. Rasio ini dapat digunakan

untuk mengukur kapasitas suatu negara dalam memungut pajak dibandingkan dengan besarnya ekonomi di suatu wilayah.

Grafik 2. 5 Tax Ratio Kalimantan Barat s.d. Triwulan II 2025



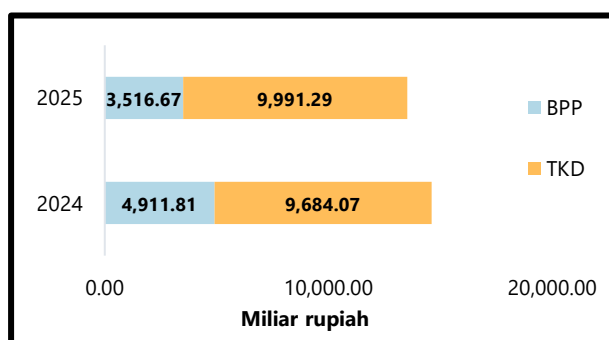
Sumber: *Treasury Big Data* dan BPS (diolah)

Tax Ratio Kalimantan Barat periode s.d. triwulan II 2025 mencapai 3,13% mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan periode s.d. triwulan II 2024 yakni 3,26%. Meskipun penerimaan perpajakan di Kalimantan Barat tumbuh positif, namun laju pertumbuhan PDRB di wilayah ini masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penerimaan perpajakan, sehingga berimplikasi pada penurunan *tax ratio* Kalimantan Barat.

2.1.2. Belanja Negara

a. Analisis Kinerja Belanja Negara

Grafik 2. 6 Kinerja Belanja Negara Triwulan II Tahun 2024 dan 2025

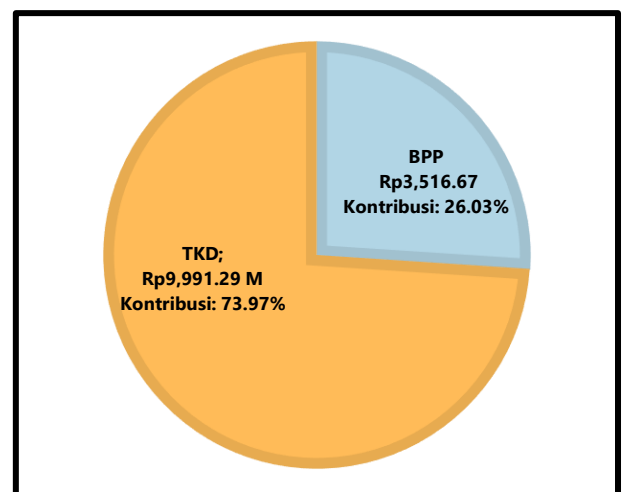


Sumber: *Treasury Big Data* (diolah)

Belanja Negara dalam APBN Kalimantan Barat sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah

terrealisasi sebesar Rp13.507,96 miliar atau 42,70% dari pagu sebesar Rp31.635,59 miliar. Adapun Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.516,67 miliar atau 23,12% dari pagu sebesar Rp9.614,09 miliar dan Transfer Ke Daerah sebesar Rp9.991,29 miliar atau 45,37% dari pagu sebesar Rp22.021,50. Secara akumulatif Belanja Negara mengalami kontraksi dari sisi pagu sebesar 5,30% (yoy) dan dari sisi realisasi sebesar 7,45% (yoy), yang disebabkan adanya Kebijakan Efisiensi pada Belanja Pemerintah Pusat dan pencadangan pada Transfer Ke Daerah. Meskipun secara akumulatif Belanja Negara dalam APBN Kalimantan Barat mengalami kontraksi, namun Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dapat tumbuh positif sebesar 3,17% (yoy).

Grafik 2. 7 Realisasi dan Tingkat Kontribusi Perkomponen BPP s.d. Triwulan II 2025



Sumber: *Treasury Big Data* (diolah)

1) Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

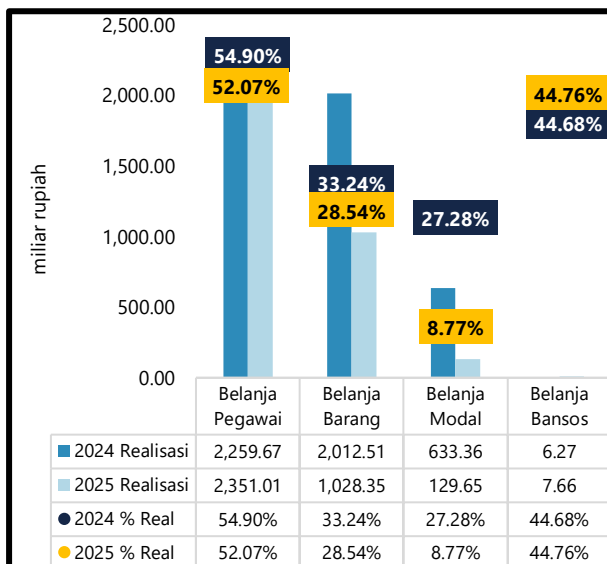
Belanja Pemerintah Pusat mencakup seluruh pengeluaran yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah pusat, yang meliputi pelaksanaan layanan publik, pembangunan infrastruktur nasional, pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program sosial lainnya. Belanja ini menjadi bagian penting dari APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal negara untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar, Belanja Pemerintah Pusat terbagi menjadi belanja konsumtif dan produktif.

Belanja konsumtif terdapat pada jenis Belanja Pegawai dan Belanja Barang, sementara belanja produktif terutama berupa belanja modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang seperti pengeluaran untuk aset dan proyek strategis seperti infrastruktur, teknologi, dan pembangunan yang bersifat produktif dan jangka panjang.

Pada triwulan II 2025, realisasi tertinggi terdapat pada Belanja Pegawai sebesar Rp 2.351,01 miliar atau 52,07% dari pagu, selanjutnya, Belanja Barang sebesar Rp1.028,35 miliar atau 28,54% dari pagu. Kemudian, Belanja Modal sebesar Rp129,65 miliar atau 8,77% dari pagu dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp7,66 miliar atau 44,76% dari pagu. Jika dilihat berdasarkan tingkat distribusi realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Kalimantan Barat masih didominasi oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Pada periode s.d. triwulan II 2025, Belanja Pegawai dan Belanja Barang masing-masing memiliki tingkat distribusi realisasi sebesar 66,85% dan 29,24% dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP).

Grafik 2. 8 Realisasi Komponen BPP s.d. Triwulan II 2024 dan 2025 Regional Kalimantan Barat



Sumber: *Treasury Big Data* (diolah)

Dari sisi persentase realisasi, seluruh komponen BPP menunjukkan penurunan tingkat penyerapan dengan penurunan paling signifikan terjadi pada Belanja Modal. Belanja Modal juga secara konsisten

mencatatkan tingkat penyerapan terendah dibandingkan jenis belanja lainnya, baik pada periode triwulan II tahun 2024 maupun 2025. Rendahnya penyerapan Belanja Modal hingga triwulan II 2025 antara lain disebabkan oleh:

- Satuan kerja masih menunggu pihak ketiga dalam mencapai target progres pekerjaan di lapangan sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan, sebelum dilaksanakan pencairan anggaran.
- Masih terdapat blokir anggaran dalam rangka efisiensi belanja pemerintah terkhususnya pada jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Tanah, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- *Timeline* pelaksanaan kegiatan kontrak di beberapa satuan kerja mengalami kemunduran jika dibandingkan tahun anggaran yang lalu.

Jika ditinjau dari sisi pertumbuhan (*growth*) secara *year on year*, terdapat dua jenis belanja yang tumbuh positif yakni Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial masing-masing sebesar 4,04% dan 22,245%. Kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang dilaksanakan tidak menyentuh Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial. Efisiensi belanja pemerintah hanya dilaksanakan pada anggaran Belanja Operasional Perkantoran, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

2) Transfer ke Daerah (TKD)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pelimpahan urusan pemerintahan tersebut harus disertai dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (*money follow functions*). Pelimpahan keuangan dilaksanakan melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD). Dalam perkembangannya, mekanisme TKD terus dilakukan penyesuaian agar tercapai *intergovernmental fiscal relation* sehingga akan menghasilkan pemerataan pembangunan,

kesetaraan pelayanan bagi masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi.

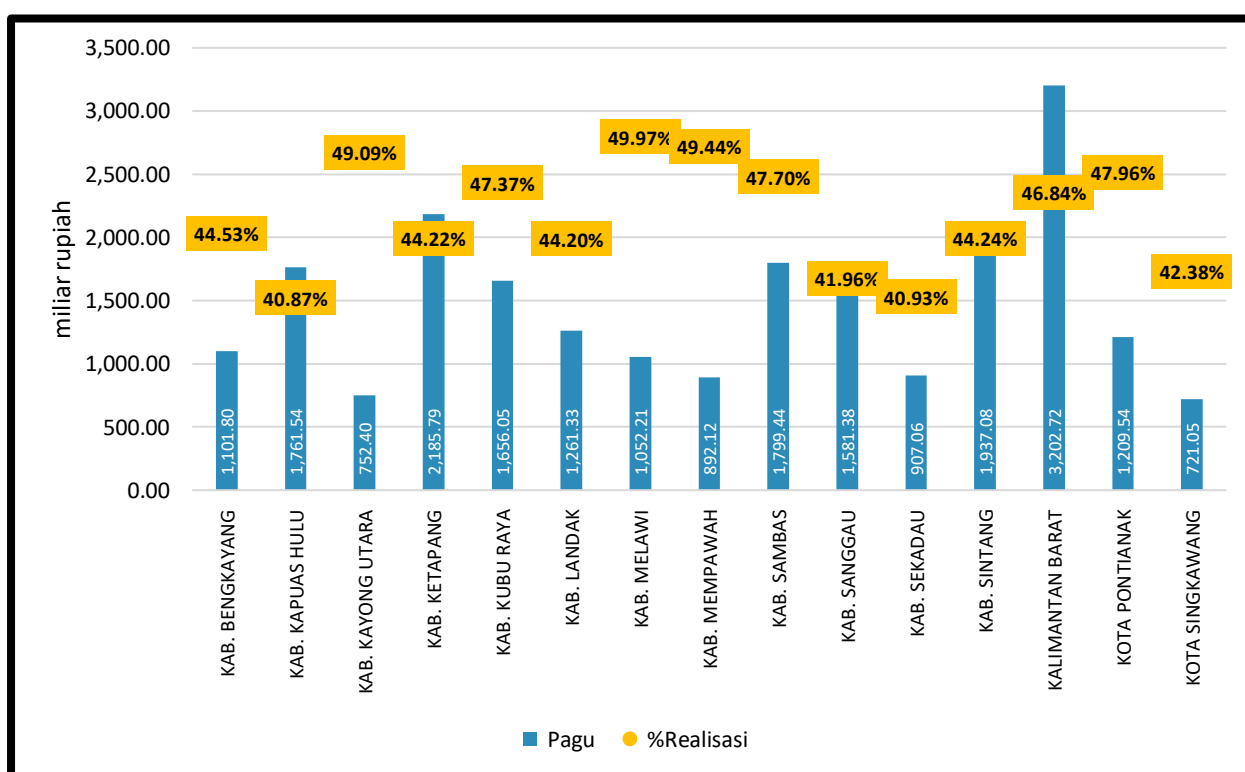
Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) TA 2025 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Pada TA 2025 terdapat peningkatan alokasi TKD yang antara lain dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan negara, yang dibagi hasilkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), dukungan pendanaan untuk PPPK, penambahan target sasaran guru penerima dana TPG yang telah bersertifikasi dan dukungan penganggaran untuk prioritas nasional.

Pada tahun 2025, Regional Kalimantan mendapat alokasi pagu Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp22.021,50 miliar naik 5,37% dari tahun 2024. Dari pagu tersebut telah terealisasi sebesar Rp9.991,20 miliar atau 45,37% tumbuh sebesar 3,17% (yoy). Pertumbuhan TKD di Kalimantan Barat dipengaruhi

dan DAK non Fisik masing-masing sebesar 34,65%; 4.06%; dan 3,75% secara *year on year*.

Hingga akhir Triwulan II tahun 2025, Dana Desa mencatat tingkat realisasi tertinggi sebesar 56,22%. Namun demikian, realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar 6,65% (yoy) seiring dengan penurunan alokasi pagu Dana Desa pada tahun 2025 di Kalimantan Barat. Penyaluran Dana Desa TA 2025 dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama disalurkan paling lambat bulan Juni, dengan besaran 40% dari total anggaran Dana Desa. Di lingkup Kalimantan Barat terdapat 11 Desa yang gagal salur Dana Desa (*Earmark* dan *Non Earmark*) tahap I yakni 4 di Kabupaten Landak dan 7 di Kabupaten Sintang. Terdapat satu Desa yang gagal salur Dana Desa *Non Earmark* tahap I yakni di Kabupaten Mempawah. Gagal salur Dana Desa tahap I antara lain disebabkan oleh belum ditetapkannya APBDes Tahun 2025 dan kurang kooperatifnya pemerintah desa untuk

Grafik 2. 9 Penyaluran TKD Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Periode s.d. Triwulan II 2025



Sumber: *SINTESA dan OMSPAN TKD* (diolah)

oleh meningkatnya penyaluran pada pos DBH, DAU

melaksanakan koordinasi dengan pemerintah

kabupaten/kotanya. Sedangkan, Dana Desa tahap kedua disalurkan dengan besaran 60%.

Penyaluran DAK Fisik di lingkup Kalimantan Barat memiliki tingkat persentase terendah (3,30%) jika dibandingkan dengan pos TKD lainnya. Penyaluran TKD sampai dengan triwulan II 2025 juga mengalami kontraksi 48,85% secara yoy. Rendahnya tingkat realisasi dan terjadinya kontraksi

b. Berdasarkan Kementerian/Lembaga

Belanja Pemerintah menurut organisasi dialokasikan kepada Kementerian atau Lembaga (K/L) untuk menjalankan fungsi, tugas, dan program kerjanya sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada tahun 2025, total pagu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp9.614,09 miliar. Dari jumlah tersebut,

Tabel 2. 4 Pagu dan Realisasi 10 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar 2025

KEMETERIAN/LEMBAGA	PAGU	REALISASI	% REAL
	miliar rupiah		
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	2.002,60	174,22	8,70
KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.873,21	873,07	46,61
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.458,17	730,21	50,08
KEMENTERIAN AGAMA	1.035,29	476,51	46,03
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	833,13	270,16	32,43
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	426,42	124,15	29,11
KEMENTERIAN PERTANIAN	390,72	42,87	10,97
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	251,13	98,96	39,40
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	195,47	60,95	31,18
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	190,33	94,42	49,61
TOTAL	8.656,46	2.945,52	34,03

Sumber: OMSPAN (diolah)

pada DAK Fisik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebijakan pencadangan DAK Fisik sesuai KMK Nomor 29 Tahun 2025, keterlambatan penerbitan petunjuk teknis pada bidang Pendidikan, serta kebiasaan pemerintah daerah yang cenderung mengunggah dokumen pada saat mendekati batas akhir. Adapun batas waktu penyaluran DAK Fisik tahap I ditetapkan hingga 29 Agustus 2025.

Jika dilihat berdasarkan masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Barat, hingga 30 Juni 2025 penyaluran TKD secara nominal tertinggi terdapat pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp3.202,72 miliar, sedangkan terendah pada Kota Singkawang sebesar Rp721,05 miliar. Sementara itu, dari sisi persentase terhadap total alokasi TKD, realisasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Melawi (49,97%) dan terendah oleh Kabupaten Kapuas Hulu (40,87%)

sebesar Rp8.656,46 miliar atau 90,04% terkonsentrasi pada 10 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan alokasi terbesar.

K/L yang mendapatkan alokasi terbesar di regional Kalimantan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dengan pagu sebesar Rp2.002,60 miliar atau 20,83% dari pagu belanja pemerintah pusat di regional Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa titik berat pembangunan di regional Kalimantan Barat masih diprioritaskan di bidang infrastruktur. Kendati demikian, realisasi di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum sampai dengan triwulan II tahun 2025 masih rendah 8,70% dari pagu. Hal ini disebabkan beberapa satker masih harus menunggu juknis dari pusat dikarenakan dengan adanya blokir pagu, perubahan rencana pelaksanaan kegiatan karena tidak sesuai dengan juknis awal, serta kendala lain karena adanya keterlambatan penyedia jasa dalam

mempertanggungjawabkan realisasi keuangan sehingga menghambat penyerapan anggaran.

Tingkat capaian/realisasi pada 10 K/L tersebut tentu akan mempengaruhi keseluruhan realisasi penyerapan K/L yang ada di Kalimantan Barat, sehingga pengawasan dan monitoring perkembangan pelaksanaan anggaran pada 15 K/L dengan pagu tertinggi tersebut harus memperoleh pengawasan yang lebih intensif dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.

c. Belanja Negara Berdasarkan Fungsi

APBN berdasarkan fungsi adalah pendekatan dalam penyusunan dan pengalokasian anggaran negara yang mengklasifikasikan belanja pemerintah menurut fungsi-fungsi utama pelayanan publik dan pembangunan nasional. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Pada APBN Regional Kalimantan Barat TA 2025, APBN terbagi dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu Fungsi Agama, Ekonomi, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan, Pelayanan Umum, Pendidikan, Perlindungan

tahun 2025 terdapat pada fungsi Pelayanan Umum, selanjutnya disusul Ketertiban dan Keamanan, serta Pertahanan. Sedangkan pada APBN Regional Kalimantan Barat TA 2025, APBN terbagi dalam 9 (sembilan) fungsi. Fungsi Pariwisata tidak memperoleh alokasi di tahun 2025 untuk regional Kalimantan Barat.

Dari pagu dan realisasi setiap fungsi tersebut, dapat dikatakan bahwa Pelayanan Umum merupakan hal yang paling utama dilakukan karena berhubungan dengan masyarakat luas. Di samping itu, TKD juga termasuk dalam fungsi Pelayanan Umum.

Sebagian besar pagu belanja negara berdasarkan fungsi mengalami kontraksi kecuali pada Pertahanan serta Keamanan dan Ketertiban yang tumbuh 13,17% dan 3,12% secara yoy. Kontraksi tersebut sejalan dengan kebijakan efisien anggaran yang diimplementasikan di tahun 2025. Jika dilihat dari sisi realisasi, seluruh jenis fungsi mengalami kontraksi secara yoy termasuk pada jenis Pertahanan serta Keamanan dan Ketertiban.

Tabel 2. 5 Belanja Negara Berdasarkan Fungsi s.d. Triwulan II 2024 dan 2025

FUNGSI	2024			2025			Growth (%)	
	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI
AGAMA	235,66	114,84	48,73%	209,08	94,21	45,06%	-11,28	-17,97
EKONOMI	3.058,41	849,14	27,76%	2.566,84	449,87	17,53%	-16,07	-47,02
KESEHATAN	172,63	76,68	44,42%	159,46	61,20	38,38%	-7,63	-20,18
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	2.054,36	1.076,82	52,42%	2.118,35	1.040,03	49,10%	3,12	-3,42
PARIWISATA	1,43	0,05	3,77%	-	-	-	-	-
PELAYANAN UMUM	22.103,76	10.454,77	47,30%	22.526,53	10.224,44	45,39%	1,91	-2,20
PENDIDIKAN	2.090,65	878,77	42,03%	1.880,31	695,92	37,01%	-10,06	-20,81
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	330,62	126,53	38,27%	227,73	64,00	28,10%	-31,12	-49,42
PERTAHANAN	1.636,49	876,75	53,58%	1.851,94	873,07	47,14%	13,17	-0,42
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	358,10	141,54	39,52%	67,21	5,22	7,77%	-81,23	-96,31

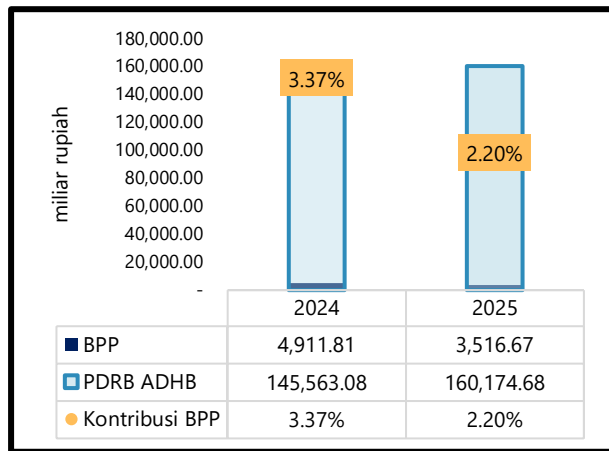
*Pagu dan Realisasi dalam miliar rupiah

Sumber: SINTESA (diolah)

Lingkungan Hidup, Pertahanan, dan Perumahan dan Fasilitas Umum. Pagu dan Realisasi terbesar di

d. Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat Terhadap PDRB

Grafik 2. 10 Kontribusi BPP Terhadap PDRB ADHB Kalimantan Barat s.d. Triwulan II Tahun 2024-2025



Sumber: *Treasury Big Data* dan BPS (diolah)

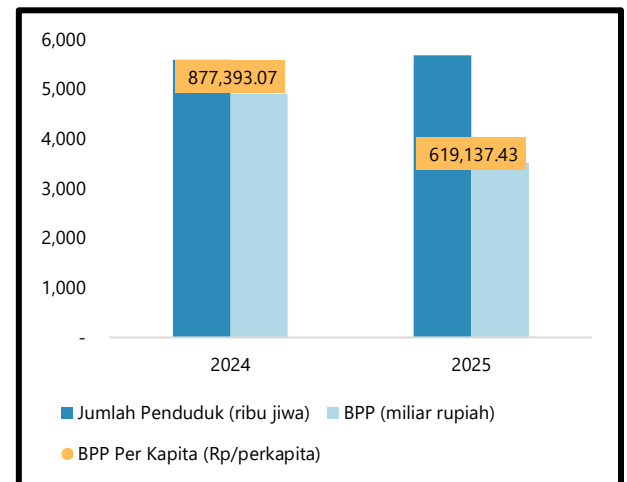
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada triwulan II tahun 2025 mengalami kontraksi sebesar 28,40% (yoy). Namun demikian, PDRB ADHB Kalimantan Barat pada periode yang sama justru meningkat dari Rp145.563,08 miliar menjadi Rp160.174,68 miliar. Kondisi ini menyebabkan persentase kontribusi BPP terhadap PDRB di Kalimantan Barat mengalami penurunan.

Kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan pemerintah diarahkan untuk pengelolaan anggaran yang lebih selektif, efisien, dan tepat sasaran. Fokus pengeluaran tidak lagi pada besarnya nominal belanja, melainkan pada kualitas dan efektivitasnya dalam mendorong aktivitas ekonomi baik ditingkat regional maupun nasional. Meskipun BPP mengalami kontraksi secara yoy, kebijakan ini tetap mendukung optimalisasi peran fiskal dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berujung pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini juga merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dalam APBN mampu menghasilkan *output* yang nyata dan

memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas.

e. Analisis Belanja Pemerintah Pusat Per Kapita

Grafik 2. 11 Belanja Pemerintah Pusat per Kapita s.d. Triwulan II Tahun 2024-2025



Sumber: *Treasury Big Data* dan Disdukcapil Kalbar (diolah)

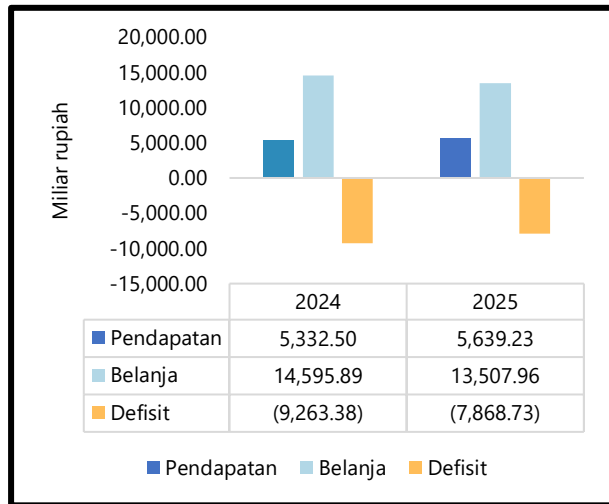
Belanja Pemerintah Pusat per Kapita akan memberikan gambaran seberapa banyak pemerintah mengalokasikan belanjanya untuk setiap individu pada suatu wilayah. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) per kapita di Kalimantan Barat s.d. triwulan II tahun 2025 mencapai Rp619,137,43 menurun 29,43% secara *year on year* sejalan dengan kontraksi pagu dan realisasi yang terjadi di tahun 2025.

f. Surplus/Defisit APBN

Realisasi pendapatan APBN Provinsi Kalimantan Barat triwulan II tahun 2025 sebesar Rp5.639,23 miliar, sedangkan belanja APBN mencapai Rp13.507,96 miliar. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi defisit APBN sebesar Rp7.868,73 miliar. Posisi defisit APBN pada triwulan II tahun 2025 turun 15,06% secara *year on year*. Pendapatan negara yang tumbuh positif serta pelaksanaan negara yang dikelola semakin efisien dan tepat sasaran akan mendukung optimalisasi peran fiskal dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 2. 12 Defisit APBN Regional Kalimantan Barat Periode Triwulan II 2024 dan 2025



Sumber: *Treasury Big Data (diolah)*

Pemerintah pusat menetapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan cara mengendalikan pengeluaran yang lebih besar dari penerimaan. Kebijakan ini dirancang sebagai alat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah dapat meningkatkan belanja publik untuk mendorong aktivitas perekonomian. Kebijakan fiskal didorong untuk terus bersifat lebih *countercyclical* agar

pemulihan ekonomi semakin menguat dan mampu melindungi daya beli masyarakat sehingga perekonomian Indonesia semakin sehat, kuat dan berkelanjutan.

2.1.3. Capaian Output Sektoral dan/atau Program-Program Strategis Pemerintah

APBN tahun 2025 dirancang dengan semangat keberlanjutan, optimisme dengan tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika di tingkat nasional maupun secara global. Fokus APBN tahun 2025 adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, APBN memiliki *output* strategis dan belanja dengan *tangging* Prioritas Nasional.

Belanja Negara merupakan salah satu instrumen untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Terdapat tiga jenis belanja yang berkaitan erat dengan layanan dasar dan menyasar langsung kepada masyarakat. Jenis belanja yang pertama adalah terkait Pendidikan yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mempermudah penyerapan tenaga kerja di pasar kerja. Selanjutnya adalah Belanja terkait Kesehatan yang akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan dan menjaga tingkat produktivitas masyarakat. Yang terakhir adalah belanja terkait

Tabel 2. 6 Pagu dan Realisasi Belanja Terkait Pendidikan, Kesehatan Infrastruktur Berdasarkan Prioritas Nasional s.d. Triwulan II 2025

Fungsi-Nama Output	Pagu	Realisasi	Volume	RVRO	SATUAN
	miliar rupiah				
Pendidikan					
Pendidikan Vokasi Bidang Industri	1,42	0,31	238	65	Orang
Bantuan Lembaga	3,03	0,29	208	14	Lembaga
Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	6,94	0,19	2484	97	Orang
Kesehatan					
Sarana Bidang Kesehatan	8,22	0,92	1	-	Paket
Standarisasi Lembaga	2,20	0,06	2	-	Lembaga
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	0,80	0,01	640	13	Lembaga
Perumahan dan Fasilitas Umum					
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	0,03	-	2	-	Lembaga
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1,43	-	14	-	Daerah (ProvKabKota)
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	77,16	-	728	-	KK
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	0,04	-	2	-	Unit

*RVRO : Realisasi Volume Rincian Output

Sumber: *Sintesa (diolah)*

infrastruktur guna meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga mendorong aktivitas perekonomian.

Ketiga jenis belanja terkait dengan layanan dasar tersebut juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang diwujudkan melalui tiga arah kebijakan prioritas pembangunan, yakni:

- SDM berdaya saing dan produktif.
- Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas.
- Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk rama lingkungan.

Alokasi Belanja Prioritas Nasional bidang pendidikan di Kalimantan Barat tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp164,70 miliar, dengan realisasi hingga akhir triwulan II baru mencapai Rp0,98 miliar atau kurang dari 1%. Anggaran tersebut tersebar pada enam K/L, dengan alokasi terbesar pada Kementerian Pekerjaan Umum (Rp96,22 miliar), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Rp32,48 miliar), serta Kementerian Agama (Rp24,88 miliar). Besarnya porsi anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum disebabkan oleh tanggung jawab dalam penyediaan prasarana pendidikan dasar dan menengah, termasuk pembangunan, rehabilitasi/renovasi madrasah, maupun sekolah rakyat. Namun demikian, hingga akhir triwulan II, Kementerian Pekerjaan Umum belum merealisasikan belanja Prioritas Nasional bidang pendidikan tersebut.

Jika dilihat dari sisi *output*, Belanja Prioritas Nasional terkait Pendidikan tersebar kedalam lima belas jenis dan sembilan diantara belum memiliki penyerapan anggaran. Tiga *output* yang memiliki nominal realisasi tertinggi s.d. triwulan II 2025 yakni Pendidikan Vokasi Bidang Industri yang telah tersalurkan untuk 65 orang; Bantuan Lembaga yang telah tersalurkan untuk 14 lembaga; serta Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah tersalurkan untuk 97 orang.

Pada tahun 2025, Belanja Prioritas Nasional bidang kesehatan di Kalimantan Barat dialokasikan sebesar Rp19,59 miliar dan terealisasi Rp0,995 miliar atau 5,08%. Anggaran tersebut dialokasikan pada dua K/L, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan sebesar Rp14,81 miliar dengan realisasi Rp0,995 miliar, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebesar Rp4,87 miliar yang hingga akhir triwulan II 2025 belum mencatatkan realisasi penyerapan belanja. Belanja Prioritas Nasional terkait Kesehatan tersebar kedalam sebelas *output*. Terdapat tiga *output* yang telah memiliki realisasi yakni Sarana Bidang Kesehatan sebesar Rp0,92 miliar; Standarisasi Lembaga sebesar Rp0,06 miliar; serta Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp0,01 miliar. *Output* Sarana Bidang Kesehatan dan Standarisasi Lembaga telah memiliki realisasi namun belum memiliki realisasi volume capaian *output* karena masih dalam tahap kegiatan. Sedangkan, *ouput* Pengawasan dan Pengendalian Lembaga telah memiliki realisasi volume capaian *output* untuk 13 lembaga dari target 640 lembaga.

Belanja Prioritas Nasional terkait infrastruktur dapat dicerminkan melalui fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum. Alokasi untuk belanja tersebut di regional Kalimantan barat tahun 2025 mencapai 78,66 miliar. Namun, sampai dengan akhir triwulan II 2025 belum terdapat penyerapan belanja. Alokasi Belanja Prioritas Nasional terkait Perumahan dan Fasilitas Umum didistribusikan kepada tiga K/L yakni Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman; dan Kementerian Transmigrasi.

2.1.4. Prognosis APBN

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kanwil DJP, DJBC, dan DJPb Provinsi Kalimantan Barat, target penerimaan lingkup Kalimantan Barat tahun 2025 adalah Rp12.393,29 miliar dengan pagu belanja negara mencapai Rp31.635,59 miliar. Penerimaan Negara sampai dengan akhir tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp13.278,52 miliar yang terdiri dari penerimaan Pajak (DJP) sebesar Rp11.332,38 miliar, penerimaan Bea dan Cukai (DJBC) sebesar Rp473,22 miliar dan penerimaan

PNBP sebesar Rp1.473,92 miliar. Sementara dari sisi Belanja Negara sampai dengan akhir tahun 2025 diproyeksi mencapai Rp30.341,34 miliar yang terdiri

periode, baik dalam skala triwulanan maupun sepanjang tahun anggaran. Pola ini berisiko menurunkan kualitas belanja, karena satuan

Tabel 2. 7 Prognosis Realisasi APBN Regional Kalimantan Barat Tahun 2025

Uraian		Target/Pagu Tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan II		Prognosis		Total
			Realisasi s.d. Triwulan II	%Realisasi Terhadap Pagu	Triwulan III	Triwulan IV	
			(miliar Rp)		(miliar Rp)	(miliar Rp)	
Pendapatan Negara		12.393,29	5.639,23	45,50	3.318,29	4.321,99	13.279,52
1	Penerimaan Pajak	11.237,88	4.689,75	41,73	2.829,69	3.812,94	11.332,38
2	Bea dan Cukai	265,88	322,65	121,35	73,75	76,82	473,22
3	PNBP	889,53	626,84	70,47	414,85	432,23	1.473,92
4	Hibah	0,00	-	-	-	-	-
Belanja Negara		31.635,59	13.507,96	42,70	8.242,10	8.591,28	30.341,34
1	Belanja Pemerintah Pusat	9.614,09	3.516,67	36,58	2.153,87	2.932,54	8.603,09
2	Belanja TKD	22.021,50	9.991,29	45,37	6.088,22	5.658,73	21.738,25
Surplus/Defisit		(19.242,30)	(7.868,73)	40,89	(4.923,81)	(4.269,28)	(17.061,82)

Sumber: *Treasury Big Data*, Kanwil DJP Kalbar, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat (diolah)

dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp8.603,09 miliar dan Belanja TKD sebesar Rp21.738,25 miliar.

2.1.5. Rekomendasi Kebijakan Belanja

Dalam rangka mewujudkan belanja pemerintah yang berkualitas, efektif, efisien, serta mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, satuan kerja dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Kualitas belanja tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran semata, tetapi juga dari sejauh mana realisasi belanja tersebut menghasilkan *output* yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, capaian *output* menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan anggaran, karena setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata, berkesinambungan, dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan penyerapan belanja yang optimal dan berkualitas di Kalimantan Barat, diantaranya:

- Terjadi pola *back-loaded expenditure* di hampir seluruh satuan kerja, yaitu penyerapan anggaran yang cenderung lambat pada awal periode dan meningkat tajam menjelang akhir

kerja seringkali terburu-buru melaksanakan kegiatan di akhir periode tanpa memperhatikan dampak maupun *output* yang dihasilkan. Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan potensi terjadinya deviasi pada Halaman III DIPA serta menimbulkan penumpukan beban kerja.

- Terjadi kondisi pagu minus Belanja Pegawai pada beberapa satuan kerja di wilayah Kalimantan Barat. Pagu minus ini timbul akibat adanya penambahan formasi CPNS dan PPPK yang belum diperhitungkan dalam penyusunan pagu anggaran tahun 2025. Situasi tersebut mengharuskan satuan kerja melakukan revisi penambahan pagu, yang pada akhirnya memperlambat proses penyerapan belanja.
- Pelaksanaan belanja yang bersumber dari PNBP belum berjalan optimal, khususnya untuk MP PNBP terpusat. Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan penyetoran PNBP di lingkup K/L masih belum maksimal, sehingga berdampak pada nilai MP PNBP yang tersedia pada masing-masing satuan kerja.
- Beberapa satuan kerja di lingkup Kalimantan Barat menerima Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada tahun anggaran berjalan sehingga berdampak pada tingkat realisasi satuan kerja.

- Terdapat beberapa satuan kerja K/L yang masih memiliki blokir anggaran pada program prioritas dalam rangka efisiensi belanja pemerintah. Hingga saat ini, pembukaan blokir anggaran tersebut belum memperoleh kepastian dari Eselon I K/L terkait.

Berdasarkan tantangan dan kendala yang terjadi dalam penyerapan belanja pemerintah, terdapat beberapa rekomendasi yakni:

- Satuan kerja perlu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa secara matang sejak awal tahun anggaran serta meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankannya, sehingga dapat meminimalisir penumpukan kegiatan dan penyerapan anggaran di akhir periode.
- Kementerian/Lembaga atau masing-masing eselon I diharapkan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik setiap bulan terhadap progres penyerapan anggaran pada instansi vertikal masing-masing, serta memberikan *early warning* kepada satuan kerja yang realisasi belanjanya belum optimal atau melewati jadwal yang telah ditetapkan.
- Kementerian/Lembaga melaksanakan penguatan koordinasi kepada pihak terkait (BKN dan Kementerian Keuangan) terkait data kebutuhan formasi dan proyeksi penerimaan CPNS/P3K, sehingga kebutuhan belanja pegawai dapat dialokasikan lebih tepat.
- Satuan kerja menyusun perencanaan belanja yang lebih terstruktur dan realistis berdasarkan proyeksi penyetoran PNBP, sehingga tidak terjadi *mismatch* antara kebutuhan belanja dengan ketersediaan MP PNBP. Kegiatan penyusunan rencana belanja ini dapat melibatkan pihak-pihak yang memiliki kapabilitas di bidang terkait.
- Satuan kerja mengoptimalkan dan mempercepat kegiatan yang telah memiliki juknis pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran.
- Satuan kerja memetakan kendala dan tantangan penyerapan anggaran sebagai

bahan evaluasi, sehingga dapat mengantisipasi tantangan yang akan terjadi di masa mendatang.

2.2. Analisis Laporan Realisasi Anggaran APBD Konsolidasi Kalimantan Barat

Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas, potensi, sumber daya dan keunggulan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, otonomi daerah dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan implementasi kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang bertujuan akhir pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan serta pembangunan di tingkat daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas pembangunan dan merancang kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditargetkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Target pendapatan daerah dalam APBD konsolidasi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp28.638,69 miliar dan pagu Belanja sebesar Rp29.387,17 miliar, sehingga terdapat rencana defisit Rp748,48 miliar, dengan pembiayaan sebesar Rp748,48 miliar. Berdasarkan data dari SIKRI atas LRA konsolidasi seluruh Pemda Kalimantan Barat, sampai dengan triwulan II 2025 Pendapatan Daerah telah terealisasi Rp9.111,20 miliar atau 31,81% dari target yang telah ditetapkan. Belanja Daerah telah realisasi Rp7.658,96 miliar atau 26,06% dari pagu yang telah ditetapkan, sehingga APBD Konsolidasi Kalimantan Barat masih mengalami kondisi surplus Rp1.452,24 miliar. Meskipun APBD Konsolidasi Kalimantan Barat masih berada pada kondisi surplus, kegiatan pembiayaan tetap berjalan dan berada pada kondisi positif Rp52,11 miliar, sehingga menghasilkan SiLPA Rp1.504,35 miliar.

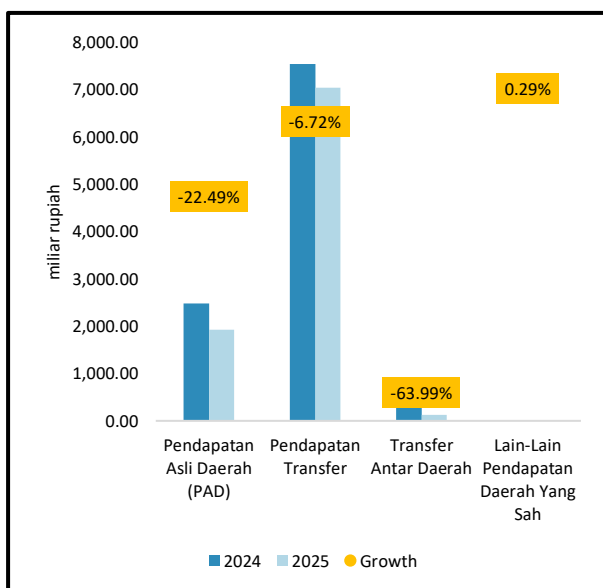
Tabel 2. 8 Laporan Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2025

URAIAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025			GROWTH REAL (%)
	PAGU	REALIASASI	% REAL	PAGU	REALIASASI	% REAL	
PENDAPATAN DAERAH	27.645,28	10.400,06	37,62	28.638,69	9.111,20	31,81	(12,39)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.668,20	2.481,43	43,78	5.882,39	1.923,41	32,70	(22,49)
Pendapatan Transfer	20.795,39	7.545,43	36,28	21.830,13	7.038,05	32,24	(6,72)
Transfer Antar Daerah	1.074,20	349,29	32,52	830,51	125,77	15,14	(63,99)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	107,50	23,90	22,23	95,66	23,97	25,05	0,29
BELANJA DAERAH	28.781,19	8.580,17	29,81	29.387,17	7.658,96	26,06	(10,74)
Belanja Operasi	19.924,88	6.514,32	32,69	20.831,67	6.162,21	29,58	(5,41)
Belanja Pegawai	10.406,37	4.129,66	39,68	11.635,28	4.420,20	37,99	7,04
Belanja Barang dan Jasa	7.802,66	1.803,17	23,11	8.260,74	1.629,62	19,73	(9,62)
Belanja Bunga	22,09	8,07	36,53	45,17	4,42	9,78	(45,26)
Belanja Subsidi	0,94	0,00	-	3,27	0,00	-	-
Belanja Hibah	1.667,10	566,74	34,00	863,24	104,10	12,06	(81,63)
Belanja Bantuan Sosial	25,72	6,67	25,95	23,97	3,88	16,18	-
Belanja Modal	4.533,84	414,78	9,15	4.437,08	299,00	6,74	(27,92)
Belanja Modal	4.533,84	414,78	9,1486	4.437,08	299,00	6,739	(27,92)
Belanja Tidak Terduga	112,99	2,70	2,39	135,67	13,58	10,01	403,79
Belanja Tidak Terduga	112,99	2,70	2,39	135,67	13,58	10,01	403,79
Belanja Transfer	4.209,48	1.648,37	39,16	3.982,75	1.184,17	29,73	(28,16)
Belanja Bagi Hasil	1.332,50	459,89	34,51	1.049,84	276,55	26,34	(39,87)
Belanja Bantuan Keuangan	2.876,97	1.188,48	41,31	2.932,91	907,61	30,95	(23,63)
SURPLUS/ (DEFISIT)	(1.135,91)	1.819,89	(160,21)	(748,48)	1.452,24	(194,02)	(20,20)
PEMBIAYAAN	1.135,91	507,86	44,71	748,48	52,11	6,96	(89,74)
Penerimaan Pembiayaan	1.671,82	638,86	38,21	1.168,70	195,69	16,74	(69,37)
Pengeluaran Pembiayaan	535,91	131,00	24,44	420,22	143,58	34,17	9,60
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	2.327,75		0,00	1.504,35		(35,37)

Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

2.2.1. Pendapatan Daerah

Grafik 2. 13 Komponen Pendapatan Daerah (Konsolidasi) Kalimantan Barat s.d. Triwulan II

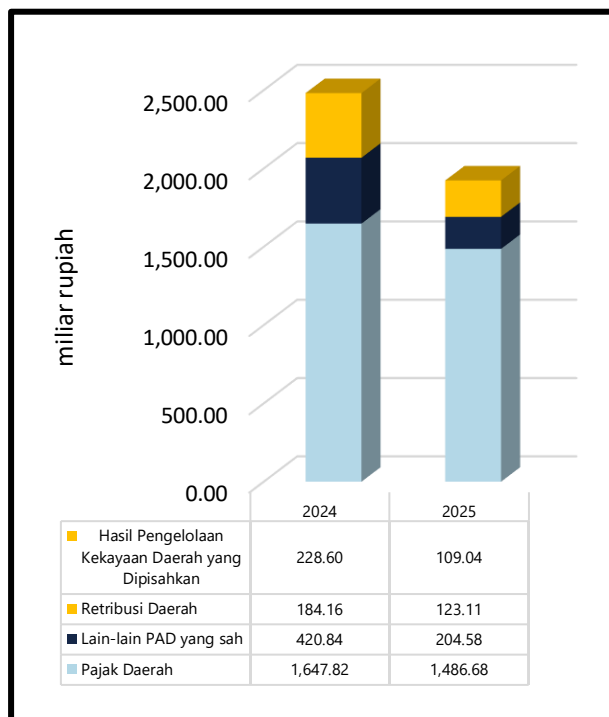


Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi seluruh penerimaan uang melalui RKUD, yang menambah ekuitas lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Daerah konsolidasi Kalimantan Barat telah terealisasi Rp9.111,20 miliar, namun mengalami kontraksi 12,39% secara *year on year*. Jika dilihat secara lebih rinci, seluruh komponen Pendapatan Daerah mengalami kontraksi secara *year on year* kecuali pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang mampu tumbuh tipis 0,29%.

Grafik 2. 14 Komponen Pendapatan Asli Daerah Konsolidasi Kalimantan Barat s.d. Triwulan II



Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Jika dilihat pada masing-masing komponen Pendapatan Daerah, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah terealisasi Rp1.486,68 miliar (32,70% dari target). Pos PAD memberikan kontribusi 21,11% untuk total Pendapatan Daerah. Capaian distribusi pada triwulan II 2025 tersebut mengalami penurunan 2,75% poin jika dibandingkan dengan tingkat distribusi PAD periode triwulan II 2025.

Pos PAD juga mengalami kontraksi sedalam 22,49% secara *year on year*. Keempat komponen pembentuk PAD mengalami kontraksi dan yang terdalam secara persentase terdapat pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (52,30%, yoy) karena pada semester II 2024 terdapat pendapatan berupa dividen dari penyertaan modal pada BUMN, sedangkan sepanjang tahun 2025 belum ada penerimaan dividen tersebut. Diikuti dengan Lain-Lain PAD yang Sah (51,39%, yoy) yang dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan BLUD.

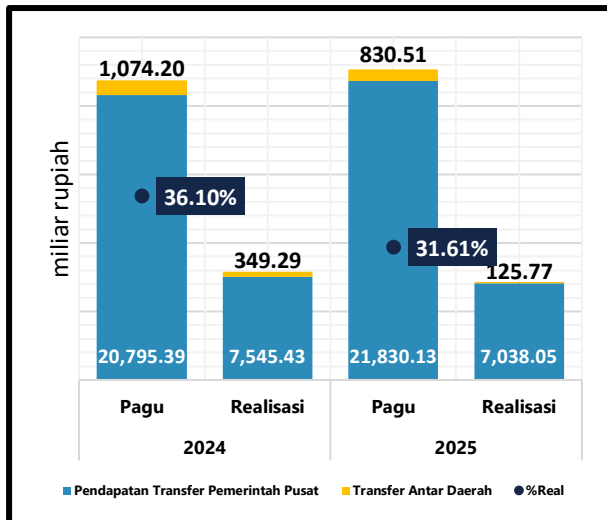
Tabel 2. 9 Capaian PAD Pemerintah Daerah Lingkup Kalimantan Barat s.d. Triwulan II

PEMDA	2024	2025	Growth (%)
	miliar rupiah		
Kab. Bengkayang	5,49	25,01	355,11
Kab. Kapuas Hulu	41,40	40,55	-2,05
Kab. Kayong Utara	5,63	24,04	327,34
Kab. Ketapang	94,29	107,93	14,46
Kab. Kubu Raya	113,88	97,35	-14,51
Kab. Landak	14,28	54,67	282,81
Kab. Melawi	15,39	27,48	78,53
Kab. Mempawah	45,75	62,10	35,75
Kab. Sambas	28,61	37,72	31,86
Kab. Sanggau	68,15	61,50	-9,76
Kab. Sekadau	28,87	34,42	19,23
Kab. Sintang	76,92	51,68	-32,81
Kota Pontianak	244,67	235,09	-3,92
Kota Singkawang	118,65	93,07	-21,56
Provinsi Kalimantan Barat	1.579,45	970,81	-38,54

Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PAD Konsolidasi Kalimantan Barat. Pada triwulan II tahun 2025, kontribusi yang diberikan mencapai 50,47%, meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 63,65%. Penurunan kontribusi ini dipengaruhi oleh implementasi opsen pajak BBNKB dan PKB yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Penerapan kebijakan tersebut menyebabkan kontraksi realisasi PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara yoy, karena salah satu tujuan opsen adalah mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagi hasil oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Tiga pemerintah daerah lingkup Kalimantan Barat dengan pertumbuhan PAD tertinggi secara *year on year* adalah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Landak yang masing-masing sebesar 355,11%; 327,34% dan 282,81%.

Grafik 2. 15 Realisasi Pendapatan Transfer Kalimantan Barat s.d. Triwulan II



Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Pendapatan Transfer pada pemerintah daerah terbagi menjadi dua bagian yakni Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan triwulan II 2025 telah terealisasi 32,24% dari pagu yang telah ditetapkan dan mengalami kontraksi 6,72% secara *y-on-y*. Pendapatan tersebut terdiri dari penyaluran Dana Desa, Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

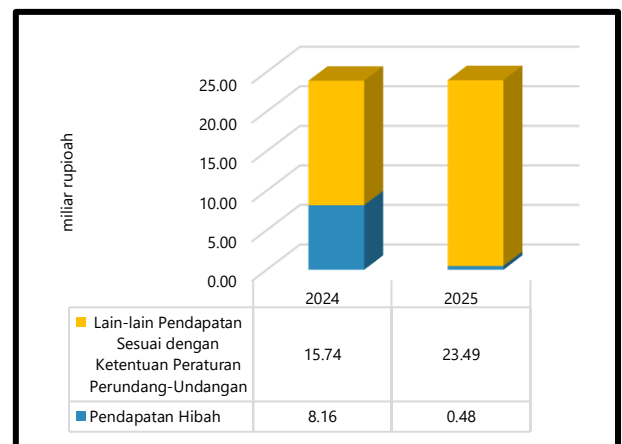
Berdasarkan data dari OMSPAN, TKD yang telah disalurkan kepada pemerintah daerah di lingkungan Kalimantan Barat s.d. triwulan II 2025 mencapai Rp9.991,29 miliar, sehingga terdapat selisih pencatatan dengan LRA LKPD atau APBD. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan pos pencatatan pada postur APBD. Dana BOS yang menjadi bagian dari DAK Non Fisik seharusnya dicatat pada Pendapatan Transfer, namun sesuai dengan SOP Pada Pencatatan APBD, Dana BOS dicatat pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah pada pos Pendapatan di postur APBD. Selain itu terdapat kemungkinan beberapa Pemda yang belum melakukan *update* pada aplikasi SIKD yang terintegrasi dengan SIKRI.

Di samping itu, pos Transfer Antar Daerah telah terealisasi 15,14% dan mengalami kontraksi yang sangat signifikan, yakni sebesar 63,00% (*yoy*).

Implementasi kebijakan Opsen juga berdampak pada besaran Transfer Antar Daerah. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan mekanisme pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLBB) yang sebelumnya masuk dalam komponen Transfer Antar Daerah, namun sejak tahun 2025 dialihkan menjadi pendapatan daerah melalui Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen MLBB yang tercatat sebagai komponen PAD.

Pendapatan transfer diharapkan dapat digunakan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah lingkup Kalimantan Barat untuk meningkatkan kualitas belanja daerah serta mengembangkan potensi daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah di lingkup Kalimantan Barat juga diharapkan dapat semakin meningkatkan kapasitas dan konsistensinya dalam pencatatan serta pelaporan realisasi APBD. Pencatatan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan tidak hanya mencerminkan tata kelola keuangan yang baik, tetapi juga menjadi landasan penting dalam evaluasi kinerja fiskal daerah. Kedisiplinan dalam pengelolaan informasi keuangan daerah akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah.

Grafik 2. 16 Realisasi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Konsolidasi Kalimantan Barat s.d. Triwulan II



Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah konsolidasi Kalimantan Barat telah terealisasi Rp23,97 miliar atau 25,05% dari target yang telah ditetapkan tumbuh 0,29% secara *year on year* karena komponen Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tumbuh 49,26% meskipun komponen Pendapatan Hibah berkontraksi 94,13% secara *year on year*.

a. Tax Ratio

Tax ratio pada APBD Kalimantan Barat dihitung berdasarkan total penerimaan pajak dan retribusi daerah yang berhasil dihimpun oleh pemerintah daerah di lingkup Kalimantan Barat dibandingkan dengan PDRB ADHB Kalimantan Barat.

Tabel 2. 10 Tax Ratio Kalimantan Barat s.d. Triwulan II

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2025
Pajak Daerah	1.647,82	1.486,68
Retribusi Daerah	184,16	123,11
Total PDRD	1.831,99	1.609,80
PDRB Kalbar	145.563,08	160.174,68
Tax Ratio	1,26%	1,01%

*)Pajak dan Retribusi dalam miliar rupiah

Sumber: BPS, SIKD dan SIKRI (diolah)

Tax ratio Kalimantan Barat pada s.d. triwulan II tahun 2025 mengalami kontraksi dari 0,25% poin dari 1,26% di triwulan II 2024 menjadi 1,01%.

Kontraksi ini dipengaruhi karena realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami penurunan sedangkan PDRB Kalimantan Barat secara akumulatif s.d. triwulan II mengalami peningkatan.

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Purba dan Hutabarat, rasio desentralisasi fiskal merupakan indikator fiskal yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal menggambarkan besarnya intervensi pemerintah pusat dalam pembangunan daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal:

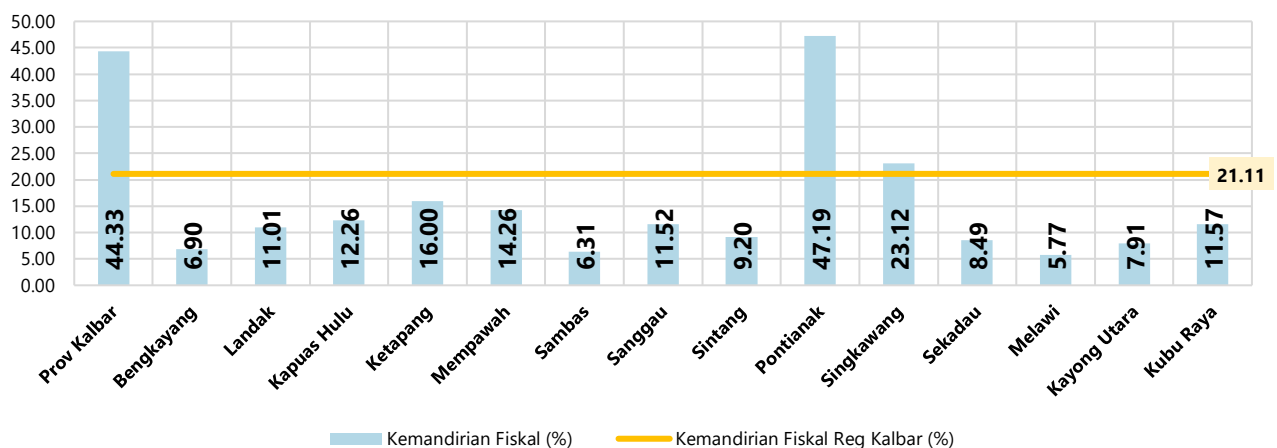
$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. 11 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Cukup
30,01% - 40,00%	Sedang
40,01% - 50,00%	Baik
>50,00 %	Sangat Baik

Sumber: Purba dan Hutabarat (2007)

Grafik 2. 17 Derajat Desentralisasi Fiskal Lingkup Kalimantan Barat Periode s.d. Triwulan II 2025 (%)



Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Rasio derajat desentralisasi fiskal di Kalimantan Barat (konsolidasi) mencapai 21,11% atau berada pada kategori Cukup. Rasio derajat desentralisasi fiskal tertinggi berada di tingkat Pemerintah Kota Pontianak yakni 47,19% atau pada kategori “Baik” dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yakni 44,33% atau kategori Baik. Sedangkan, Kota Singkawang berada pada kategori Cukup dan kedua belas lainnya berada pada kategori kurang serta sangat kurang

c. Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio kemandirian fiskal adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Rasio kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

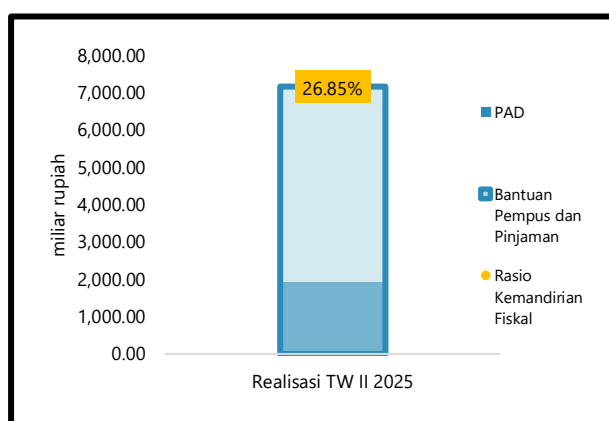
$$\text{Rasio Kemandirian Fiskal:} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pempus dan Pinjaman}}$$

Tabel 2. 12 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

Grafik 2. 18 Rasio Tingkat Kemandirian Fiskal Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2025



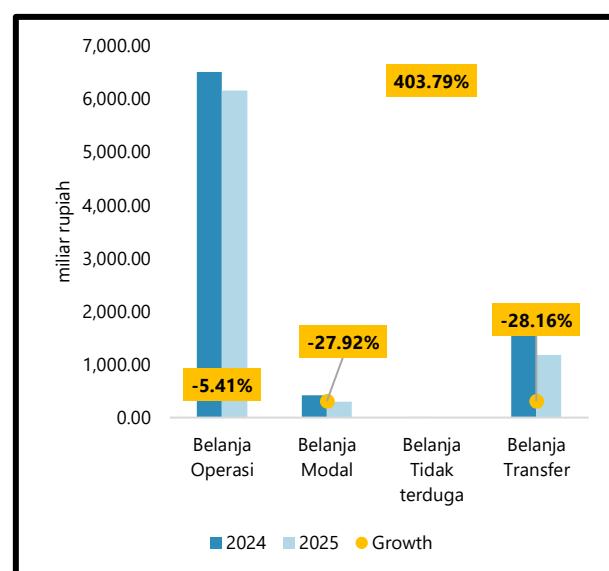
Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan atas realisasi APBD Konsolidasi Kalimantan Barat s.d. triwulan II 2025 diperoleh hasil bahwa pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah di Kalimantan Barat (konsolidasi) termasuk dalam kategori “Konsultatif”.

2.2.2. Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran.

Grafik 2. 19 Realisasi Komponen Belanja Daerah Kalimantan Barat Triwulan II



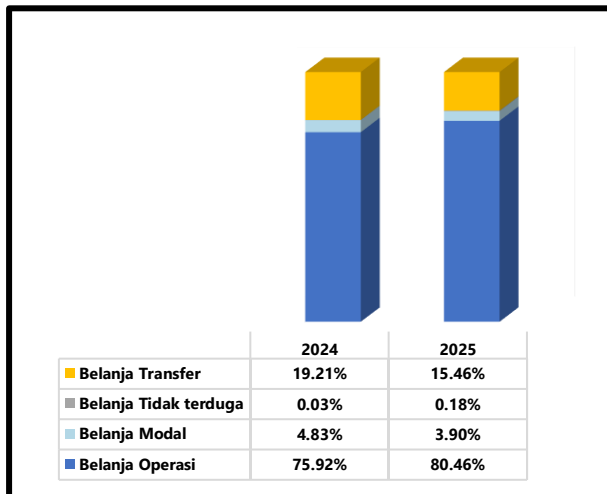
Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Sampai dengan 30 Juni 2025, realisasi Belanja Daerah pada APBD Konsolidasi Kalimantan Barat sebesar Rp7.658,96 miliar atau 26,06% dari pagu yang telah ditetapkan. Belanja Daerah tersebut mengalami kontraksi sebesar 10,74% secara *year on year*. Adapun peningkatan Belanja Daerah hanya terdapat pada komponen Belanja Tidak Terduga sebesar 403,79% secara yoy.

Struktur Belanja Daerah Kalimantan Barat pada triwulan II tahun 2025 didominasi oleh Belanja Operasi yang mencapai 80,46%, disusul oleh Belanja Transfer sebesar 15,46%, Belanja Modal

sebesar 3,90% dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,18%. Dari Belanja Operasi sebesar Rp6.162,21 miliar, sebesar 71,73% di antaranya merupakan Belanja Pegawai. Jika di dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah secara akumulatif, Belanja Pegawai masih memiliki proporsi yang cukup tinggi yakni 57,71%. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Barat karena sesuai dengan amanat UU HKPD, batas maksimal belanja pegawai selain tunjangan guru adalah sebesar 30% dari APBD dan batas minimal belanja infrastruktur adalah sebesar 40% dari Pemda, dan amanat ini memiliki masa transisi untuk dilakukan penyesuaian selama 5 tahun.

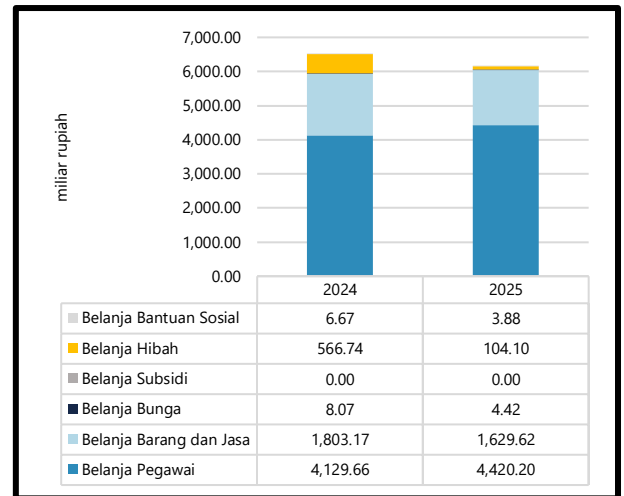
Grafik 2. 20 Tingkat Kontribusi Komponen Belanja Daerah Triwulan II



Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Jika ditelaah berdasarkan komponennya, Belanja Operasi terealisasi sebesar 29,58% dari pagu dan mengalami kontraksi 5,41% (yoy). Hampir seluruh pos Belanja Operasi terkontraksi, kecuali Belanja Pegawai yang justru tumbuh 7,04%. Selain itu, terbitnya Instruksi Presiden terkait efisiensi belanja mendorong pemerintah daerah melakukan revisi terhadap penganggaran dalam APBD TA 2025, yang pada gilirannya berpotensi memengaruhi tingkat realisasi dan penyerapan belanja daerah.

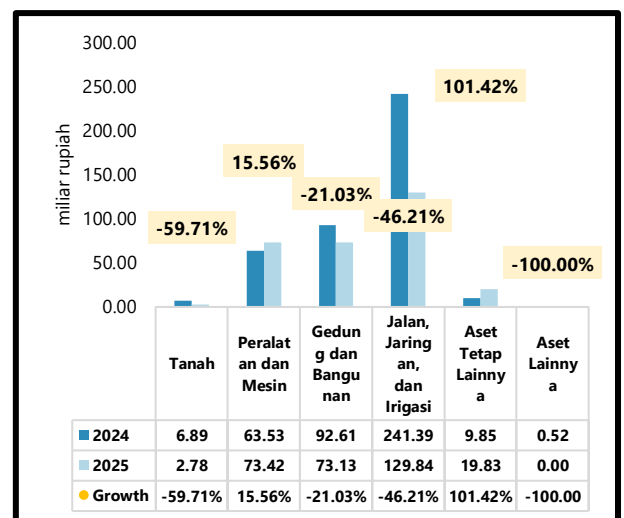
Grafik 2. 21 Komponen Belanja Operasi Triwulan II



Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Sejalan dengan Belanja Operasi, Belanja Modal pada triwulan II 2025 juga mengalami kontraksi sebesar 27,92% yang mana belanja baru terealisasi 6,74% dari pagu yang telah ditetapkan. Seluruh komponen Belanja Modal mengalami kontraksi kecuali pada Aset Tetap Lainnya yang tumbuh signifikan 101,42% secara yoy. Masih sama dengan periode sebelumnya, Belanja Modal Konsolidasi Kalimantan Barat masih didominasi oleh komponen Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan tingkat kontribusi mencapai 43,43% untuk triwulan II 2025.

Grafik 2. 22 Realisasi Komponen Belanja Modal s.d. Triwulan II

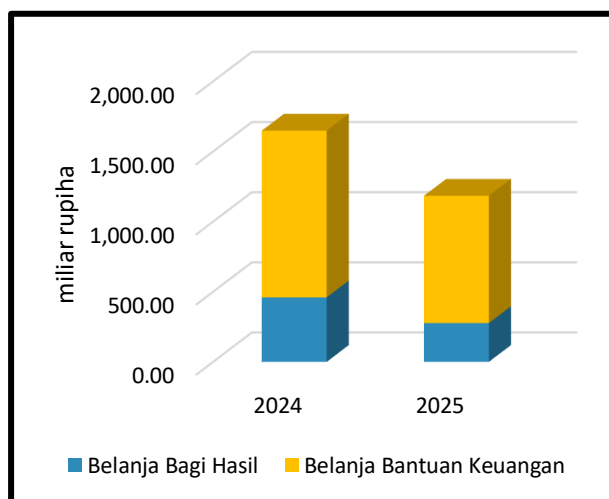


Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Belanja Modal di Kalimantan Barat masih menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Dari sisi realisasi, persentase Belanja Modal tercatat sebagai yang terendah dibandingkan komponen Belanja Daerah lainnya. Dari sisi distribusi pagu, porsi Belanja Modal Tahun 2025 hanya mencapai 15,10% dari total Belanja Daerah. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya pemerintah daerah di lingkup Kalimantan Barat untuk melakukan penyesuaian proporsi belanja dalam APBD agar lebih berorientasi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini semakin penting mengingat amanat UU HKPD yang mengatur alokasi belanja infrastruktur minimal 40%.

Kontraksi Belanja Modal di Kalimantan Barat turut dipengaruhi oleh kebijakan pencadangan pada alokasi DAK Fisik yang mencapai 48,10% dari pagu awal. Mengingat DAK Fisik masih menjadi salah satu sumber utama pendanaan *earmarked* bagi belanja modal daerah. Pencadangan tersebut secara langsung tingkat realisasi Belanja Modal di Kalimantan Barat.

Grafik 2. 23 Realisasi Komponen Belanja Transfer s.d. Triwulan II

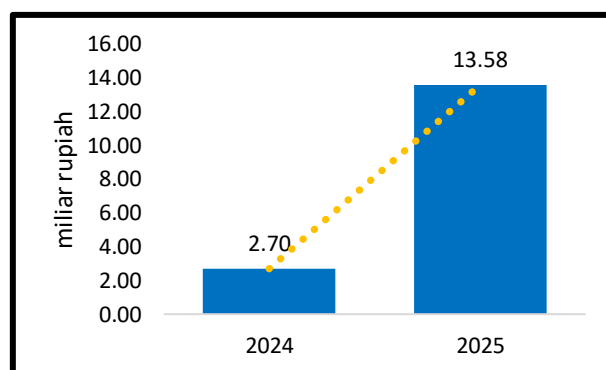


Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Hingga akhir Triwulan II 2025, Belanja Transfer pada APBD Konsolidasi Kalimantan Barat terealisasi sebesar Rp1.184,17 miliar atau 29,73% dari pagu, namun mengalami kontraksi 28,16% (yoy). Jika ditelusuri lebih dalam, seluruh komponen Belanja Transfer juga menunjukkan kontraksi. Salah satu

faktor utama yang memengaruhi penurunan ini adalah perubahan mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil PDRD, yang kini dilakukan secara *real time* dan tercatat sebagai akun pendapatan opsen, sehingga berdampak pada pola realisasi Belanja Transfer.

Grafik 2. 24 Realisasi Belanja Tidak Terduga s.d. Triwulan II



Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Belanja Tidak Terduga di Kalimantan Barat pada s.d. triwulan II tahun 2025 telah terealisasi Rp13,58 miliar atau 10,01% dari pagu yang telah ditetapkan dan mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Pertumbuhan yang signifikan pada Belanja Tidak Terduga mengartikan bahwa terjadi peningkatan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dibandingkan tahun sebelumnya.

a. Kontribusi Daerah terhadap PDRB

Tabel 2. 13 Kontribusi Belanja Daerah Terhadap PDRB ADHB Triwulan II

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2025
Belanja Daerah	8580,17	7.658,96
PDRB Kalbar	145.563,08	160.174,68
Kontribusi	5,89%	4,78%

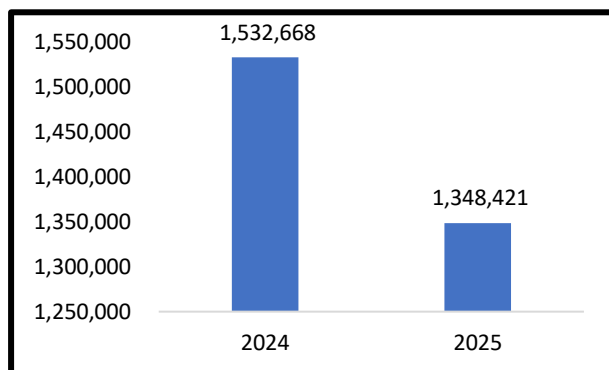
Sumber: BPS, SIKD dan SIKRI (diolah)

Pada Triwulan II 2025, kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB ADHB Kalimantan Barat tercatat sebesar 4,78%, sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerapan

kebijakan efisiensi belanja berdampak langsung pada menurunnya nominal *government spending*. Namun demikian, perekonomian Kalimantan Barat tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Kondisi ini menegaskan bahwa dengan pengelolaan belanja pemerintah yang lebih efisien dan efektif, kontribusi fiskal daerah tetap dapat memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi.

b. Analisis Belanja Daerah Per Kapita

Grafik 2. 25 Belanja Daerah Per Kapita Kalimantan Barat Triwulan II



Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Belanja Daerah per kapita Kalimantan Barat pada triwulan II tahun 2025 mencapai Rp1.348.421 dan mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp1.532.668. Penurunan tersebut disebabkan adanya kontraksi realisasi Belanja Daerah pada

triwulan II 2025 yang berbanding terbalik dengan jumlah penduduk di Kalimantan Barat yang mengalami peningkatan.

2.2.3. Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi

Realisasi Belanja Daerah Kalimantan Barat pada triwulan II 2025 di dominasi oleh empat fungsi yakni Pelayanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Kesehatan serta Pendidikan yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 79,87%; 5,59%; 3,89%; serta 3,74%. Secara akumulatif, keempat fungsi tersebut telah memberikan kontribusi 93,08% terhadap realisasi Belanja Daerah lingkup Kalimantan Barat. Hal ini mengartikan bahwa pemerintah daerah lingkup Kalimantan Barat memprioritaskan dan memfokuskan belanja pada empat fungsi tersebut.

Namun demikian, kontribusi belanja pada fungsi Kesehatan dan Pendidikan yang secara total hanya mencapai 7,63% masih relatif rendah. Kedua sektor ini merupakan layanan dasar yang memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan alokasi belanja pada

Tabel 2. 14 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Triwulan II

Fungsi	2024		2025		Growth
	Realisasi	Kontribusi	Realisasi	Kontribusi	
Pelayanan Umum	6.729,77	78,43%	6.392,39	79,87%	-5,01%
Ketertiban dan Keamanan	429,33	5,00%	446,97	5,59%	4,11%
Kesehatan	241,90	2,82%	311,26	3,89%	28,67%
Pendidikan	440,72	5,14%	298,94	3,74%	-32,17%
Perumahan dan Fasilitas Umum	512,55	5,97%	280,64	3,51%	-45,25%
Ekonomi	134,67	1,57%	187,85	2,35%	39,49%
Lingkungan Hidup	54,34	0,63%	52,26	0,65%	-3,83%
Perlindungan Sosial	18,58	0,22%	18,96	0,24%	2,06%
Pariwisata	18,31	0,21%	13,77	0,17%	-24,81%

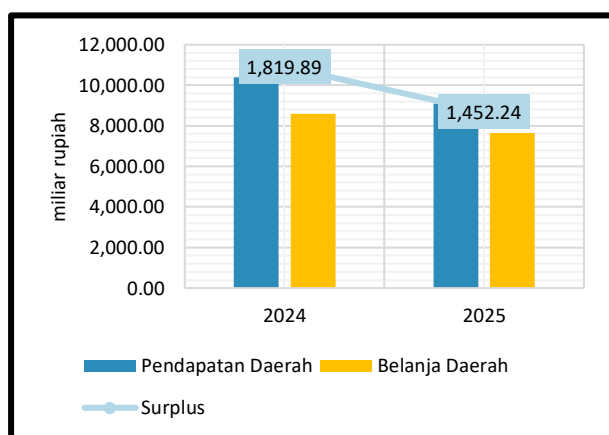
*Realisasi dalam milair rupiah

Sumber: GFS Kalimantan Barat (diolah)

Kesehatan dan Pendidikan, terutama untuk memperluas jangkauan pelayanan di wilayah terpencil serta mendukung pemerataan pembangunan di Kalimantan Barat.

2.2.4. Surplus/Defisit APBD

Grafik 2. 26 Surplus APBD Konsolidasi Kalimantan Barat s.d. Triwulan II



Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

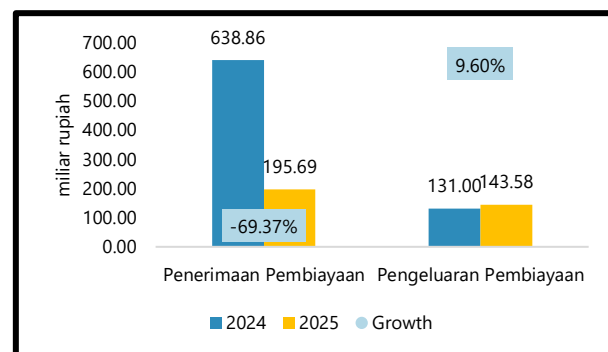
Pendapat Daerah yang telah diterima oleh pemerintah daerah lingkup Kalimantan Barat s.d. triwulan II 2025 mencapai Rp9.111,20 miliar. Sedangkan, penyerapan Belanja Daerah konsolidasi Kalimantan Barat baru mencapai Rp7.658,96 miliar atau 26,06% dari pagu yang telah ditetapkan. Penerimaan Pendapatan Daerah yang lebih tinggi dan penyerapan Belanja Daerah yang belum optimal mengakibatkan APBD Konsolidasi Kalimantan Barat berada pada kondisi surplus Rp1.504,35 miliar, berbanding terbalik dengan yang telah direncanakan (defisit). Namun, kondisi surplus

yang terjadi mengalami kontraksi 35,37% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah daerah lingkup Kalimantan Barat diharapkan agar mengakselerasi penyerapan belanja untuk meminimalisir terjadinya *idle cash* pada akhir tahun anggaran. Ter khususnya difokuskan untuk belanja produktif memiliki peran vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan barat.

2.2.5. Pembiayaan Daerah

Meskipun APBD Kalimantan Barat pada triwulan II tahun 2025 berada pada kondisi surplus, rencana anggaran untuk pembiayaan tetap berjalan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp195,69 miliar yang berasal dari SiLPA tahun Sebelumnya serta Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan dari sisi Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp143,58 miliar yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp14,5 miliar dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp129,08 miliar.

Grafik 2. 27 Komponen Pembiayaan Daerah s.d. Triwulan II



Sumber: SIKD dan SIKRI (diolah)

Tabel 2. 15 Proyeksi Realisasi APBD Konsolidasi Kalimantan Barat Tahun 2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Realisasi					Pagu	Realisasi
Pendapatan	24.523,06	26.613,44	25.399,49	26.144,36	27.524,32	28.638,69	27.459,98
Belanja	24.826,92	26.117,75	25.522,01	25.903,14	28.120,80	29.387,17	28.247,97
Suplus/Defisit	-303,86	495,69	-122,52	241,22	-596,48	(748,48)	(787,99)
Pembiayaan	1.662,21	1.688,07	2.282,15	1.812,66	963,53	748,48	1.104,28
SiLPA	1.358,35	2.183,76	2.159,63	2.053,88	367,05	0,00	316,29

*Pagu dan Realisasi dalam miliar rupiah

Sumber: Portal DJPK, SIKD dan SIKRI (diolah)

2.2.6. Prognosis APBD Kalimantan Barat

Pada akhir tahun 2025, Pendapatan Daerah diproyeksikan mencapai Rp27.459,98 miliar atau 95,88% dari target, menunjukkan kinerja pendapatan yang cukup solid meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah diperkirakan sebesar Rp28.247,97 miliar atau 96,12% dari total pagu, yang mencerminkan masih adanya belanja yang belum terserap optimal. Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp787,99 miliar. Namun, defisit ini dapat ditutupi melalui pembiayaan neto yang positif sebesar Rp1.104,28 miliar, sehingga memberikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp316,29 miliar.

2.2.7. Rekomendasi Kebijakan Belanja Daerah

Sampai dengan akhir triwulan II 2025, APBD konsolidasi Kalimantan Barat mengalami kondisi surplus Rp1.504,35 miliar yang disebabkan karena belum optimalnya penyerapan Belanja Daerah. Terdapat berbagai faktor yang mengakibatkan capaian belanja daerah dalam APBD belum optimal. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal. Secara umum, pemerintah daerah lingkup Kalimantan Barat mengalami isu, tantangan dan kendala yang serupa satu sama lain, yakni:

Faktor internal

- Proses pencatatan dan pelaporan realisasi APBD di sebagian pemerintah daerah belum dilakukan secara *realtime* dan belum sepenuhnya terkini, sehingga memengaruhi akurasi data penyerapan belanja.
- Adanya pergantian kepemimpinan di beberapa daerah yang menyebabkan perlunya waktu adaptasi terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang baru.;
- kompleksitas dalam penyusunan regulasi sehingga memakan waktu yang lama;
- terdapat implementasi kebijakan dan/atau regulasi yang memerlukan penyesuaian sehingga menghambat capaian belanja daerah;

- OPD/SKPD terlambat dalam melakukan pencairan dana (tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun);
- mekanisme kegiatan yang tidak direncanakan secara matang oleh OPD/SKPD sehingga berdampak pada tingkat realisasi anggarannya;
- alokasi anggaran yang terkait dengan layanan dasar untuk masyarakat masih relatif rendah.

Faktor eksternal

- Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja daerah mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian kembali terhadap alokasi anggaran dalam APBD 2025 serta alokasi DAK Fisik dan DAU bidang Pekerjaan Umum;
- terbatasnya pihak ketiga/penyedia yang terdaftar dalam *platform* belanja pemerintah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terkait proses pendaftaran;
- pemenuhan dokumen oleh pihak ketiga membutuhkan waktu yang panjang dan menyebabkan keterlambatan tender;

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Belanja Daerah lingkup Kalimantan Barat, terdapat beberapa rekomendasi, yaitu:

- Mempercepat harmonisasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan dengan penganggaran serta mendorong pendampingan teknis dari Badan Perencanaan Daerah dan Biro Administrasi Pembangunan.
- Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dasar, pemerintah daerah di lingkup Kalimantan Barat dapat melaksanakan *refocusing* anggaran terhadap program/kegiatan yang kurang berdampak dan menyasar langsung ke masyarakat yang kemudian dialihkan ke sektor kesehatan maupun pendidikan.
- Aktif berkoordinasi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) baik di tingkat daerah maupun pusat dalam meningkatkan kapabilitas terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan

mengimplementasikan penggunaan *Diagnostic Tools*.

- d. Diperlukan pembuatan peta permasalahan dan strategi penyelesaian oleh masing-masing OPD/SKPD guna untuk mengakselerasi penyerapan Belanja Daerah terkhususnya Belanja Modal yang disusun setiap awal tahun sehingga mitigasi risiko dapat dilaksanakan sejak dini.
- e. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (IT) untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya teknis/operasional sehari-hari. Dengan demikian, pekerjaan teknis/operasional sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih efisien dan mengurangi pos Belanja Operasional.
- f. Pemerintah daerah menyelenggarakan seminar terkait *platform* belanja pemerintah dengan mengundang penyedia/pihak ketiga. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong minat penyedia/pihak ketiga dalam mendaftarkan usahanya pada *platform* belanja pemerintah.
- g. Dalam mengakselerasi Belanja Daerah, pimpinan daerah dapat membentuk tim khusus yang akan melakukan monitoring secara berkala penyerapan belanja dan *output* maupun *outcome* yang dihasilkan oleh OPD/SKPD.
- h. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) penyusunan regulasi daerah yang lebih sederhana, terstruktur, dan berbasis waktu guna mempercepat proses legislasi.
- i. Melakukan koordinasi aktif dengan kementerian/lembaga teknis terkait agar penyesuaian terhadap regulasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
- j. Mengoptimalkan fungsi pengawasan internal dan menyusun jadwal kas yang realistis serta meningkatkan disiplin anggaran di tingkat OPD.

Tabel 2. 16 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II

URAIAN	2024 (Dalam miliar rupiah)	2025	% Growth
Pendapatan Konsolidasi	8.205,08	7.707,01	(6,07)
Pendapatan Perpajakan	6.394,14	6.566,17	2,69
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	6.304,34	6.320,00	0,25
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	89,80	246,17	174,14
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.802,80	1.140,35	(36,75)
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	228,60	111,25	(51,34)
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	684,73	669,20	(2,27)
Pendapatan Transfer	383,00	11,65	(96,96)
Bantuan Keuangan	-	-	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	506,47	348,25	(31,24)
Hibah	8,14	0,48	(94,08)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri	8,14	0,48	(94,08)
Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	-	-
Belanja Konsolidasi	15.648,60	13.507,92	(13,68)
Belanja Pemerintah	11.843,61	10.311,87	(12,93)
Belanja Pegawai	6.389,34	6.909,06	8,13
Belanja Barang dan Jasa	3.815,69	2.750,10	(27,93)
Belanja Modal	1.048,14	430,08	(58,97)
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	8,07	8,17	1,27
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	566,74	188,62	(66,72)
Belanja Bantuan Sosial	12,94	11,58	(10,51)
Belanja Lain-lain	2,70	14,25	428,47
Belanja Transfer	3.804,99	3.196,05	(16,00)
Transfer Pemerintah Daerah	1.299,08	1.015,80	(21,81)
Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa	2.505,91	2.180,25	(13,00)
Surplus/(Defisit)	(7.443,52)	(5.800,91)	(22,07)
Pembiayaan	507,86	34,60	(93,19)
Penerimaan Pembiayaan	638,86	199,63	(68,75)
Pengeluaran Pembiayaan	131,00	165,04	25,98
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(6.935,66)	(5.766,31)	(16,86)

Sumber: GFS Kalimantan Barat (diolah)

- k. Mendorong setiap OPD/SKPD melakukan perencanaan kegiatan yang berbasis pada kebutuhan riil, disertai dengan kajian teknis dan jadwal pelaksanaan yang terukur sejak awal tahun anggaran.

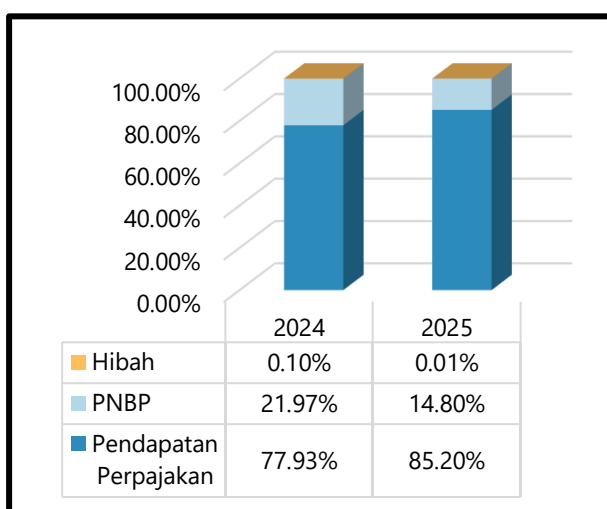
2.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian Triwulan II 2025

Dalam rangka menyediakan informasi bagi publik/*stakeholders* serta sebagai alat dan data manajerial untuk melaksanakan evaluasi dan pengambilan keputusan kebijakan fiskal dibentuk Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

LKPK Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.

2.3.1. Pendapatan Konsolidasian

Grafik 2. 28 Kontribusi Komponen Pendapatan Konsolidasian s.d. Triwulan II



Sumber: GFS Kalimantan Barat (diolah)

Realisasi Pendapatan Negara Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di

Kalimantan Barat hingga akhir Triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp7.707,01 miliar. Struktur pendapatan konsolidasi relatif tidak mengalami perubahan signifikan, masih didominasi oleh Pendapatan Perpajakan sebesar 85,20%, diikuti oleh PNPB sebesar 14,80%.

Secara keseluruhan, Pendapatan Negara Konsolidasi pada Triwulan II 2025 mengalami kontraksi 6,07% (yoy). Jika ditinjau lebih rinci per komponennya, Pendapatan Perpajakan tumbuh positif 2,69% (yoy), terutama ditopang oleh peningkatan signifikan pada penerimaan Pajak Perdagangan Internasional. Kenaikan harga referensi (kolom tarif) CPO pada awal tahun 2025 memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan penerimaan dari pos ini.

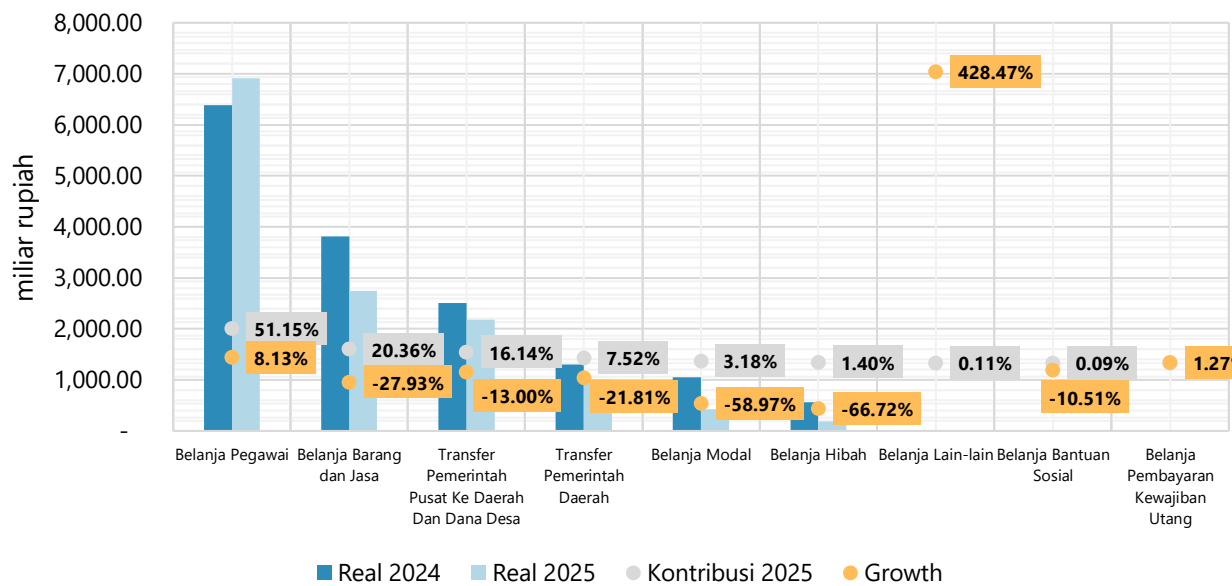
Sebaliknya, PNPB dan Hibah justru mengalami kontraksi cukup dalam, masing-masing sebesar 36,75% dan 94,08% (yoy). Penurunan PNPB terutama disebabkan oleh merosotnya Pendapatan Transfer yang terkontraksi hingga 96,96% (yoy), akibat kebijakan pencadangan DAK Fisik dan perubahan mekanisme penyaluran dana bagi hasil yang saat ini dilakukan melalui skema opsen.

2.3.2. Belanja Konsolidasian

Belanja Konsolidasi Pempus dan Pemda tingkat wilayah Kalimantan Barat pada triwulan II 2025 mencapai Rp13.507,92 miliar terkontraksi 13,68% secara *year on year*. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja tahun 2025. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap rupiah dalam APBN dan APBD dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dengan memfokuskan pada program prioritas yang memiliki dampak langsung. Kontraksi pada realisasi/penyerapan belanja merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan efisiensi belanja.

Struktur Belanja Konsolidasi pada triwulan II 2025 didominasi oleh pos Belanja Pegawai sebesar 40,83%, diikuti dengan Belanja Barang dan Jasa

Grafik 2. 29 Komponen Belanja Konsolidasian s.d. Triwulan II



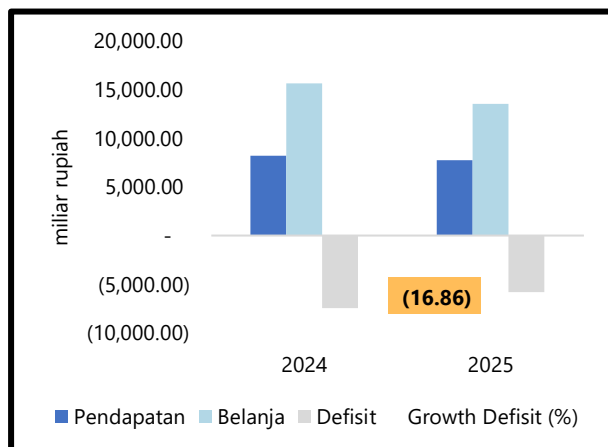
Sumber: GFS Kalimantan Barat (diolah)

yakni 24,38% dan Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah dan Dana Desa sebesar 16,01%.

terarah tentunya berdampak langsung pada tingkat defisit di tingkat regional Kalimantan Barat.

2.3.3. Surplus/Defisit

Grafik 2. 30 Defisit Konsolidasi Kalimantan Barat Triwulan II

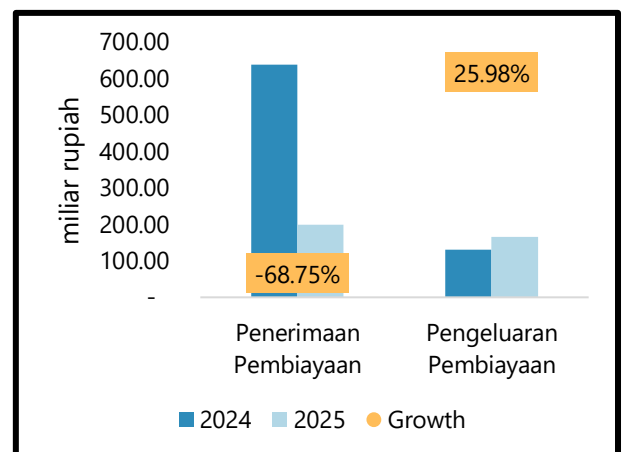


Sumber: GFS Kalimantan Barat (diolah)

Laporan Keuangan Konsolidasi Pempus dan Pemda tingkat wilayah Kalimantan Barat pada triwulan II 2025 berada dalam posisi defisit Rp5.766,31 miliar. Angka defisit pada triwulan II tahun 2025 turun 16,86% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pengelolaan belanja pemerintah yang lebih efektif, efisien, terukur dan

2.3.4. Pembiayaan Komsolidasian

Grafik 2. 31 Komponen Pembiayaan Konsolidasian Kalimantan Barat Triwulan II



Sumber: GFS Kalimantan Barat (diolah)

Pembiayaan konsolidasi pada triwulan II tahun 2025 sebesar Rp34,60 miliar, mengalami kontraksi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontraksi tersebut disebabkan karena komponen Penerimaan Pembiayaan turun sebesar 68,75% secara *year on year*. Komponen Penerimaan Pembiayaan seluruhnya berasal dari pos

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri. Di samping itu, Komponen Pengeluaran Pembiayaan tumbuh 25,98% secara *year on year*. Struktur Pengeluaran Pembiayaan didominasi oleh pos Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar 85,15%.

2.4. Progres Implementasi Program Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah Salah satu Program Strategis Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program MBG ini terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 pada Prioritas Nasional (PN) 4 yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Dalam rangka pencapaian sasaran PN 4 tersebut, dilakukan serangkaian intervensi dan perumusan program-program yang menjadi penekanan salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun Program MBG dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024, dengan kelompok sasaran terdiri dari peserta didik di sekolah dan pesantren, serta non peserta didik mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Program MBG pada kelompok masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi seimbang, dan diharapkan mampu memperbaiki asupan energi dan zat gizi penting, ketahanan fisik, meningkatkan preferensi makanan lokal/daerah yang bergizi, serta memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat anak Indonesia.

Anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp71 triliun telah ditambah menjadi Rp171 triliun dengan target penerima manfaat sampai dengan akhir tahun 2025 sebanyak 82,9 juta penerima yang akan dilayani 32.000 SPPG. Makan bergizi gratis akan diberikan dalam bentuk 1) makanan lengkap siap saji untuk anak sekolah di seluruh jenjang

pendidikan dan santri; 2) makanan lengkap siap saji untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan status gizi normal; serta 3) makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronis, balita gizi kurang, balita dengan berat badan kurang, dan balita tidak mengalami peningkatan berat badan.

2.4.1. Perkembangan Program MBG di Provinsi Kalimantan Barat

Program MBG di Kalimantan Barat resmi dimulai pada tanggal 20 Januari 2025, dan pertama kali dilaksanakan serentak di Kota Pontianak dan Kabupaten Landak. Adapun target penerima manfaat MBG di seluruh wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2025 sebanyak 1.250.037 penerima manfaat yang dilayani 586 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Sampai dengan Bulan Juni 2025, program MBG di Kalimantan Barat berkembang semakin luas. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah SPPG, yang pada bulan Maret 2025 sebanyak 34 mitra SPPG menjadi 59 mitra SPPG yang tergabung dalam program MBG. Secara total, terdapat penambahan 25 SPPG yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2. 17 Data Sebaran Pelaksanaan MBG per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota Pelaksanaan MBG	Jumlah SPPG	Jumlah Penerima Manfaat
Kota Pontianak	15	40.295
Kab. Landak	10	27.520
Kab. Ketapang	7	20.559
Kota Singkawang	7	17.553
Kab. Kubu Raya	6	15.936
Kab. Sanggau	2	8.291
Kab. Sekadau	3	7.244
Kab. Kapuas Hulu	2	6.927
Kab. Sambas	2	4.071
Kab. Bengkayang	1	3.230
Kab. Mempawah	1	2.895
Kab. Sintang	1	2.525
Kab. Melawi	1	2.110
Kab. Kayong Utara	1	1.667
Total	59	160.823

Sumber: Sintesa (diolah)

Selanjutnya, Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pelaksanaan MBG terbanyak berdasarkan jumlah

SPPG dan jumlah penerima manfaat adalah Kota Pontianak dengan total mitra SPPG sebanyak 15 mitra dan 40.296 penerima manfaat MBG. Sedangkan Kabupaten/Kota yang telah melakukan implementasi MBG dengan jumlah penerima manfaat paling sedikit adalah Kabupaten Kayong Utara dengan 1 mitra SPPG dan 1.667 penerima manfaat MBG. Secara total, pelaksanaan MBG di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Juni 2025 telah mencapai sasaran ke 160.823 penerima manfaat MBG.

Secara keseluruhan pada Regional Kalimantan terdapat 125 SPPG yang telah menyalurkan MBG kepada 308.908 penerima manfaat. Penyerapan pada masing-masing provinsi di Kalimantan sebagaimana tabel berikut:

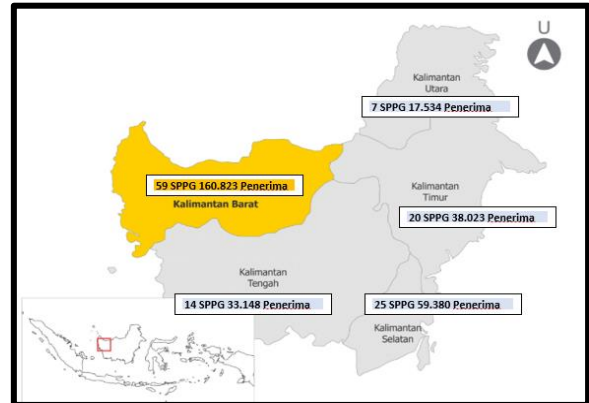
Tabel 2. 18 Realisasi Program MBG di Regional Kalimantan

NO	PROV	SPPG	PENERIMA
1	KALBAR	59	160.823
2	KALSEL	25	59.380
3	KALTENG	14	33.148
4	KALTIM	20	38.023
5	KALTARA	7	17.534
JUMLAH		125	308.908

Sumber: Sintesa (diolah)

Berdasarkan data pada tabel diatas, Kalimantan Barat merupakan Provinsi di Regional Kalimantan dengan realisasi Program MBG terbesar dibandingkan provinsi lainnya yang ada di Kalimantan, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 160.823 penerima manfaat dengan 59 SPPG. Dari jumlah penerima di Regional Kalimantan, maka sebanyak 52,06% penerima manfaat terdapat di Kalimantan Barat.

Gambar 2. 1 Data Sebaran SPPG dan Penerima



Sumber: Sintesa (diolah)

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa Provinsi Kalimantan Barat menjadi Provinsi dengan implementasi MBG terbanyak di Regional Pulau Kalimantan, diantaranya:

a. Geografis, Jumlah dan Usia Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat

Secara geografis Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi terluas kedua setelah Kalimantan Tengah. Dengan luas wilayah yang mencapai 147.037 km² atau sekitar 1,13 kali luas Pulau Jawa, hal ini pun yang menjadikan Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi terluas kedua di Indonesia. Selanjutnya, Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan yang mencapai 5,7 juta jiwa pada tahun 2024. Dari wilayah dengan jumlah penduduk yang besar, maka kelompok penerima manfaat MBG juga lebih banyak terdapat di Kalimantan Barat, dimana sasaran kelompok penerima manfaat MBG yang terdiri dari anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Tabel 2. 19 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kalimantan Barat tahun 2024

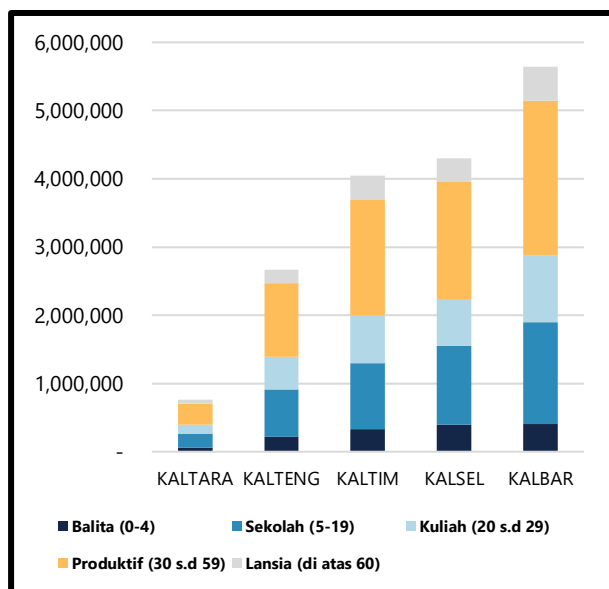
Provinsi	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Ribuan)
Kalimantan Barat	147.037,04	5.695,5
Kalimantan Tengah	153.443,91	2.809,7
Kalimantan Selatan	37.135,05	4.273,4
Kalimantan Timur	126.981,28	4.045,9
Kalimantan Utara	70.101,18	739,8

Sumber: BPS (diolah)

Faktor jumlah penduduk dapat mencerminkan besarnya jumlah penerima manfaat. Hal ini yang mendorong banyaknya SPPG di Kalimantan Barat dalam mendukung program MBG dibandingkan wilayah lain di regional Kalimantan.

Selain itu, dilihat dari segi usia penduduk, dengan pengelompokan usia Balita (0 s.d 4 tahun), usia sekolah (5-19 tahun), usia kuliah (20 s.d 29 tahun), usia produktif (30 s.d 59 tahun), usia lansia (di atas 60 tahun), maka dapat terlihat bahwa usia Balita, Sekolah, dan Lansia di Kalimantan Barat lebih banyak dibandingkan wilayah lain di Regional Kalimantan. Hal ini sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 32 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Regional Kalimantan tahun 2024



Sumber: BPS (diolah)

Oleh karena itu, faktor geografis yang luas dan jumlah penduduk dengan usia balita, usia sekolah dan usia lansia yang lebih banyak dibandingkan Provinsi lain di Regional Kalimantan, menjadi faktor pendorong implementasi Program MBG di Kalimantan Barat lebih berkembang dibandingkan wilayah lain di Regional Kalimantan.

b. Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data BPS, Regional Kalimantan Barat memiliki infrastruktur sekolah yang jumlahnya jauh

lebih banyak dibandingkan provinsi lain di Regional Kalimantan. Jumlah sekolah yang ada di Kalimantan Barat pada tahun ajaran 2023/2024 sebanyak 6.529 sekolah, hampir 2 (dua) kali lipat dari jumlah sekolah yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur serta bahkan 8 (delapan) kali lipat dibandingkan Kalimantan Utara.

Tabel 2. 20 Sebaran Jumlah Sekolah Regional Kalimantan Tahun Ajaran 2023/2024

Provinsi	Jumlah Sekolah				Total Sekolah
	SD	SMP	SMA	SMK	
Kalimantan Barat	4.447	1.377	472	233	6.529
Kalimantan Tengah	2.650	867	245	139	3.901
Kalimantan Selatan	2.920	627	207	128	3.882
Kalimantan Timur	1.929	697	237	217	3.080
Kalimantan Utara	485	195	68	34	782

Sumber: BPS (diolah)

Banyaknya infrastruktur sekolah di Kalimantan Barat menjadi faktor pendorong dalam implementasi program MBG, mengingat target penerima manfaat untuk MBG saat ini masih didominasi dari kalangan para pelajar yang menduduki kelas SD, SMP, SMA, dan SMK.

Tabel 2. 21 Sebaran Jumlah Siswa Regional Kalimantan Tahun Ajaran 2023/2024
(dalam ribuan)

Provinsi	Jumlah Siswa				Total Siswa
	SD	SMP	SMA	SMK	
Kalimantan Barat	558	235	135	75	1.004
Kalimantan Tengah	276	107	64	33	480
Kalimantan Selatan	351	115	70	57	593
Kalimantan Timur	423	165	85	85	758
Kalimantan Utara	81	33	20	11	145
Jumlah	504	655	374	261	2.980

Sumber: BPS (diolah)

Sebagaimana tabel di atas, dapat terlihat bahwa jumlah sekolah di masing-masing regional Kalimantan ini, berbanding lurus dengan jumlah siswa yang ada. Dengan banyaknya jumlah sekolah maka jumlah siswanya pun semakin banyak, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong lebih berkembangnya program MBG di Kalimantan Barat dibandingkan wilayah lain di Regional Kalimantan.

2.4.2. Dampak Implementasi Program MBG

Untuk mengetahui dampak program MBG yang telah dijalankan selama triwulan II 2025, maka dilakukan analisa pelaksanaan program MBG terhadap perubahan tingkat harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Kalimantan Barat. Analisa dilakukan dengan menggunakan Uji *Repeated Measures* ANOVA (ANOVA satu arah dengan pengukuran berulang) untuk mengukur dampak MBG terhadap harga bahan pokok dan selanjutnya dilakukan Uji Kruskal Wallis untuk mengetahui keterkaitan antara implementasi program MBG terhadap tingkat inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Kalimantan Barat.

Uji *Repeated Measures* ANOVA (ANOVA satu arah dengan pengukuran berulang) adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata suatu variabel yang diukur berulang kali pada subjek yang sama dalam beberapa kondisi atau waktu. Uji *Repeated Measures* ANOVA merupakan teknik lebih lanjut dari uji *Paired Sample T Test* dan dapat digunakan untuk menguji perbedaan dari tiga sampel atau lebih yang saling berpasangan. Uji *Repeated Measures* ANOVA digunakan ketika Subjek yang sama diukur lebih dari sekali dan tujuan analisis adalah melihat pengaruh waktu atau kondisi terhadap variabel yang diamati. Uji ini digunakan untuk mengukur perbedaan signifikansi implementasi MBG terhadap harga bahan pokok makanan di Kalimantan Barat dengan membandingkan kelompok data pada akhir triwulan IV 2024 bulan Desember 2024 (sebelum dilaksanakan implementasi MBG) dengan akhir triwulan I 2025 bulan Maret dan triwulan II 2025

bulan Juni (setelah dilaksanakan implementasi MBG).

Selanjutnya, untuk menganalisa dampak program MBG terhadap tingkat inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Kalimantan Barat dilakukan dengan menggunakan Uji Kruskal Wallis. Uji Kruskal Wallis merupakan metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua atau lebih kelompok independen berdasarkan data ordinal atau tidak berdistribusi normal.

Uji Kruskal wallis digunakan untuk menguji apakah distribusi nilai dari suatu variabel berbeda secara signifikan antar kelompok yang tidak saling terkait. Uji ini digunakan untuk membandingkan tiga atau lebih kelompok data sampel yang *independent* dengan menggunakan data tidak terdistribusi normal dan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok tersebut.

Persyaratan yang harus dipenuhi Syarat Uji Kruskal-Wallis dibagi menjadi tiga, yaitu:

- Data yang diperoleh haruslah tidak normal.
- Lebih dari dua kelompok sampel yang saling *independent* atau tidak berhubungan/tidak berpengaruh satu sama lain.
- Sampel berskala ordinal atau interval.

Uji Kruskal Wallis ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara implementasi program MBG terhadap tingkat inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Kalimantan Barat karena menggunakan lebih dari dua kelompok sampel.

a. Dampak Program MBG Terhadap Harga Bahan Pokok Makanan

Analisis ini menggunakan harga rata-rata dalam kategori yang terdapat pada harga bahan pokok makanan yang datanya bersumber dari Badan Pangan Nasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 22 Data Harga Bahan Pokok Makanan

Bahan Pokok Makanan	Harga Rata-Rata Akhir TW IV 2024 (Sebelum MBG)	Harga Rata-Rata Akhir TW I 2025 (Setelah MBG)	Harga Rata-Rata Akhir TW II 2025 (Setelah MBG)
Beras Premium	17.232	17.103	17.343
Beras Medium	14.397	14.574	14.727
Beras SPHP	12.987	12.999	13.025
Bawang Merah	47.655	38.170	55.914
Bawang Putih Bonggol	44.619	45.145	40.407
Cabai Merah Keriting	60.759	90.559	58.977
Daging Sapi Murni	154.475	155.624	155.323
Cabai Rawit Merah	62.438	111.064	63.540
Daging Ayam Ras	41.217	40.861	41.059
Telur Ayam Ras	31.542	31.925	32.607
Gula Konsumsi	17.857	18.469	18.479
Minyak Goreng Kemasan	20.056	21.070	21.393
Minyak Goreng Curah	18.733	18.237	17.977
Tepung Terigu (Curah)	11.009	10.875	10.980
Tepung Terigu Kemasan	13.870	13.700	13.759
Ikan Kembung	43.499	44.029	44.463
Ikan Tongkol	40.008	39.217	41.396
Ikan Bandeng	34.416	33.061	34.463
Garam Konsumsi	13.120	12.987	12.703

Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

Data pada tabel diatas dilakukan analisa dengan Uji *Repeated Measures* ANOVA (ANOVA satu arah dengan pengukuran berulang) menggunakan Microsoft Excel. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel Uji *Repeated Measures* ANOVA.

Gambar 2. 2 Hasil Uji *Repeated Measures* ANOVA

ANOVA						
Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Rows	62425185382	17	3672069728	57,06849531	4,8964E-20	1,933207
Columns	161608933	2	80804466,5	1,255801131	0,297725772	3,275898
Error	2187728450	34	64344954,4			
Total	64774522765	53				

Sumber: Microsoft Excel (diolah)

Hipotesis pada uji *Repeated Measures* ANOVA dengan taraf signifikansi α 0,05 (atau 5%). Taraf

H0: Tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok data berpasangan.

Ha: Terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok data berpasangan.

signifikansi α 0,05 (atau 5%) adalah batas yang digunakan untuk memutuskan apakah kita akan menolak H0 atau tidak. Jika nilai *P-value* yang diperoleh dari uji *Paired T-test Repeated Measures* ANOVA lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka kita akan menolak H0 dan menyimpulkan bahwa Ha diterima (ada perbedaan signifikan). Sebaliknya, jika nilai *P-value* lebih besar dari 0,05, maka kita akan gagal menolak H0 dan menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan.

Uji Analisis *Repeated Measures* ANOVA menggunakan Microsoft Excel, dapat kita lihat bahwa nilai *P-value* sebesar 0,2977. Nilai *P-value* lebih besar dari nilai signifikansi α sebesar 0,05, sehingga dapat diperoleh hasil bahwa *P-value* > α sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa H0 diterima yang berarti tidak ada perbedaan signifikan implementasi MBG dengan dua kelompok data harga bahan pokok makanan sebelum dan sesudah pelaksanaan MBG di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil uji *Repeated Measures* ANOVA, dapat disimpulkan bahwa implementasi MBG di Kalimantan Barat tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan harga bahan pokok. Ketidak berpengaruh tersebut disebabkan adanya *festive season* pada setiap periode pengamatan. Pada akhir Triwulan IV 2024 hingga awal Triwulan I 2025, terjadi momen libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, pada akhir Triwulan I hingga Triwulan II 2025 terdapat rangkaian puasa Ramadan, Idulfitri, perayaan Cap Go Meh, serta libur panjang Paskah dan Idul adha

Selain itu, realisasi program MBG di Kalimantan Barat hingga Juni 2025 baru mencapai 160.823 penerima manfaat atau sekitar 12,86% dari target 1.250.037 penerima manfaat yang ditetapkan pada tahun 2025, sehingga masih tergolong rendah.

b. Dampak Program MBG Terhadap Tingkat Inflasi di Kalimantan Barat

Kemudian, dampak program MBG di kaitkan dengan tabel inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau berdasarkan lima kota/kabupaten selama enam bulan terakhir mulai sejak bulan Januari 2025 s.d. Juni 2025 melanjutkan dari KFR triwulan I yang datanya bersumber dari BPS terkait Inflasi di Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 23 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada Lima Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Kab/Kota	Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	Mei 25	Juni 25
Ketapang	1,27	0,59	0,06	0,32	-0,83	0,11
Sintang	1,03	0,06	0,1	0,71	-0,94	0,3
Kayong Utara	1,54	0,73	-0,34	0,15	-0,75	0,18
Pontianak	1,03	0,32	0,33	-0,02	-1,54	0,59
Singkawang	1,59	0,76	0,14	-0,74	-0,88	0,66

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Selanjutnya, dari tabel inflasi di atas, dianalisis lebih lanjut apakah terdapat perbedaan signifikan dari implementasi program MBG di masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Barat terhadap inflasi selama sembilan bulan terakhir. Perhitungan uji kruskall walis menggunakan rumus:

$$H = \frac{12}{n(n-1)} \sum_{i=1}^k \frac{R_i^2}{n_i} - 3(n+1)$$

Sehingga uji hipotesis penelitian dapat menggunakan perumusan hipotesis dengan menggunakan uji Kruskal - Wallis dengan statistik ujinya H yang berdistribusi Chi-Square dengan derajat bebas (k-1).

H0: Tidak terdapat perbedaan Implementasi MBG terhadap tingkat inflasi pada bulan Oktober 2024 s.d. Juni 2025

H1: Terdapat perbedaan Implementasi MBG terhadap tingkat inflasi pada bulan Oktober 2024 s.d. Juni 2025

Perhitungan tingkat signifikansi α menggunakan bilangan yang mencerminkan besarnya peluang menolak hipotesis nol ketika hipotesis nol bernilai

benar, dengan besaran $\alpha = 0,05$. Dari data inflasi tersebut dapat diperoleh *rank* atau peringkat dari tiap kelompok sampel, diantaranya:

Tabel 2. 24 Data Rank atau Peringkat Tiap Kelompok

Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	Mei 25	Jun 25
3	10,5	21,5	13,5	27	19
4,5	21,5	20	8	29	15
2	7	24	17	26	16
4,5	13,5	12	23	30	10,5
1	6	18	25	28	9

Sumber: Microsoft Excel (diolah)

Adapun hasil analisis yang sumber datanya berasal dari *rank* atau peringkat dari tiap kelompok sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 25 Hasil Analisis Deskriptif

	Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	Mei 25	Jun 25
R	35	71	106	130	77,5	45,5
R ²	1225	5041	11236	16900	6006,25	2070,25
n	5	5	5	5	5	5
N	30	30	30	30	30	30
$\bar{x}$	7	14	21	26	16	9

Sumber: Microsoft Excel (diolah)

Dari data di atas, dapat dilakukan pengujian hipotesis uji kruskall walis. Hipotesis dalam uji Kruskal-Wallis mencakup hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1). Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara median dari setiap kelompok yang dibandingkan. sehingga diperoleh hasil diantaranya:

Tabel 2. 26 Hasil Uji Kruskal-Wallis

	Nilai
Chi-Square (χ^2)	11,070
df	5
Asymp. Sig.	16,622

Sumber: Microsoft Excel (diolah)

Dari hasil di atas diperoleh nilai χ^2 yaitu 11,070 dan $\text{sig.}\alpha = 16,622$ dimana nilai χ^2 lebih kecil (<) dari nilai $\text{sig.}\alpha$. Hal tersebut menandakan bahwa hasil pengujian berada pada keputusan penolakan H0 yang berarti terdapat perbedaan atas implementasi

MBG terhadap tingkat inflasi pada bulan Januari 2025 s.d. Juni 2025.

Dari Uji Kruskal Wallis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi MBG terdapat pengaruh terhadap tingkat inflasi pada komponen makanan, minuman, dan tembakau di lima Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat selama enam bulan terakhir dari bulan Januari 2025 sampai dengan Juni 2025.

c. Dampak Program MBG terhadap NTP dan NTN di Kalimantan Barat

Analisis ketiga menggunakan populasi dalam kategori yang terdapat pada Nilai Tukar Petani (NTP) Per Subsektor dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP)
- Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)
- Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPR)
- Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)
- Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)

Data perlakuan pertama dalam penelitian ini ditentukan melalui nilai komponen NTP Per Subsektor data pada Triwulan IV 2024 (sebelum implementasi pelaksanaan MBG) dan data pada Triwulan I 2025 (setelah implementasi pelaksanaan MBG). Data kedua perlakuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 27 Data NTP Per Subsektor

Jenis NTP	TW IV 2024 (Sebelum MBG)	TW I 2025 (Setelah MBG)	TW II 2025 (Setelah MBG)
NTPP	98,7	96,13	98,37
NTPH	103,65	109,17	106,10
NTPR	214,91	213,91	206,73
NTPT	102,03	98,8	98,93
NTNP	99,92	100,16	100,36

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Data pada tabel di atas dilakukan analisa dengan Uji Analisis *Repeated Measures* ANOVA menggunakan Microsoft Excel.

Gambar 2. 3 Hasil Uji Analisis Repeated Measures ANOVA

ANOVA						
Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Rows	26980,67	3	8993,556	1011,775	1,67839E-08	4,757063
Columns	14	2	7	0,7875	0,496942156	5,143253
Error	53,33333	6	8,88889			
Total	27048	11				

Sumber: Microsoft Excel (diolah)

H0: Tidak ada perbedaan signifikan antara tiga kelompok data per triwulan.

Ha: Terdapat perbedaan signifikan antara tiga kelompok data per triwulan.

Hipotesis pada uji Repeated Measures ANOVA dengan taraf signifikansi 0,05 (atau 5%). Taraf signifikansi 0,05 (atau 5%) adalah batas yang digunakan untuk memutuskan apakah kita akan menolak H0 atau tidak. Jika nilai *p value* yang diperoleh dari uji *Paired T-test* lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka kita akan menolak H0 dan menyimpulkan bahwa Ha diterima (ada perbedaan signifikan). Sebaliknya, jika nilai *p value* lebih besar dari 0,05, maka kita akan gagal menolak H0 dan menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan.

Uji Analisis *Repeated Measures* ANOVA menggunakan Microsoft Excel diatas, dapat kita lihat bahwa nilai *p value* sebesar 0,497. Nilai *p value* lebih besar dari nilai signifikansi α sebesar 0,05, sehingga dapat diperoleh hasil bahwa *p value* > α sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa H0 diterima yang berarti tidak ada perbedaan signifikan implementasi MBG dengan tiga kelompok data NTP per triwulannya sebelum dan sesudah pelaksanaan MBG di Provinsi Kalimantan Barat. Namun apabila dilihat dari jenis NTPnya terdapat perbedaan signifikan yang terlihat dari nilai *p value* < α sebesar 1,678E-08, jadi terdapat perbedaan signifikan dari NTPP, NTPH, NTPR, NTPT,

dan NTNP dengan perbedaan terbesar terdapat pada NTPR.

Dari analisis tersebut dapat dikemukakan beberapa alasan kenapa program MBG tidak berdampak signifikan terhadap NTP di regional Kalimantan Barat, yakni:

- yang masih relatif singkat, realisasi MBG di Kalimantan Barat cukup baik, meskipun dapat dikatakan relatif masih rendah apabila dibandingkan target sampai dengan akhir tahun 2025. Adapun capaian sampai dengan Juni 2025 telah tersalur kepada 160.823 penerima manfaat atau 12,86% dari target sebesar 1.250.037 penerima manfaat di tahun 2025, Selain itu, perubahan signifikan terhadap NTP baru dapat terlihat dengan waktu yang lebih panjang sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.
- Bahan baku dari dalam wilayah Kalimantan Barat yang terbatas sehingga harus mengandalkan pasokan dari luar Kalimantan Barat, bahkan terdapat ketergantungan terhadap Pulau Jawa khususnya tanaman pangan. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan jenis NTP yang signifikan antara satu dengan lainnya, dengan NTPR merupakan NTP yang mengalami perbedaan terbesar di regional Kalimantan Barat. Sehingga sangat mungkin sekali di Kalimantan Barat terdapat ketergantungan hasil tanaman pangan mengingat komoditas terbesarnya adalah dari sektor perkebunan khususnya kelapa sawit.

Hal yang berkaitan dengan ketergantungan produk tanaman pangan ini harus menjadi perhatian dari pemerintahan daerah di Kalimantan Barat, dengan mengambil langkah - langkah untuk meningkatkan program ketahanan pangan khususnya komoditas yang menjadi bahan pokok.

2.4.3. Isu dan GAP Capaian dalam Program MBG Dibandingkan dengan Target Capaian Tahun 2025

Untuk menginventarisir isu digunakan wawancara dengan Koordinator MBG dan beberapa SPPG

dalam acara dengan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun beberapa isu terbaru yang teridentifikasi adalah:

- Penambahan SPPG diperlukan proses yang cukup memakan waktu karena membutuhkan verifikasi dan validasi lanjutan oleh koordinator MBG setelah usulan SPPG disetujui BGN, karena terdapat beberapa temuan antara data dengan verifikasi lapangan yang berbeda.
- Timbulnya permasalahan sampah di beberapa SPPG, karena harus memasak setiap hari dan dalam jumlah ± 3000 paket sehingga limbah sampah mejadi permasalahan sendiri bagi setiap SPPG.
- Perlunya asuransi bagi petugas memasak di dapur sebagai perlindungan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Tingginya *turnover* (penggantian) tenaga kerja khususnya yang bekerja di dapur, karena setiap hari harus memasak, membersihkan alat makan dan bahan makanan serta harus menjaga standar gizi MBG yang telah ditentukan.

Selanjutnya, dilakukan GAP analisis untuk mengetahui GAP capaian Program MBG s.d triwulan II terhadap target capaian tahun 2025. GAP Analisis ini dilakukan dengan menggunakan isu-isu yang teridentifikasi dari informasi yang berhasil dihimpun dari wawancara dengan Koordinator MBG dan beberapa SPPG dalam acara dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 2. 28 GAP Analisis Capaian Terhadap Target Program MBG

KETERANGAN	TARGET 2025	S.D JUNI 2025	% REALISASI	GAP
Penerima Manfaat	1.250.037	160.823	12,87%	87,13%
SPPG	586	59	10,07%	89,93%
Akumulasi	1.250.623	160.882	12,86%	87,14%

Sumber: Sintesa dan BPS Kalbar (diolah)

Program MBG diberikan kepada anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal/ sederajat) sampai dengan sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Oleh karena itu masih ada GAP yang sangat besar

dari jumlah siswa dari jenjang SD/MI s.d jenjang SMA/SMK/MA yang belum terlayani/mendapat MBG.

Tabel 2. 29 GAP Analisis Jumlah Siswa di Kalimantan Barat yang menerima Program MBG

Kelompok	Jumlah Siswa	Terlayani MBG	% REALISASI	GAP
Siswa SD/MI	504.000	68.972	13,68%	86,32%
Siswa SMP/MTs	655.000	39.451	6,02%	93,98%
Siswa SMA/SMK/MA	635.000	42.375	6,67%	93,33%
Akumulasi	1.794.000	150.798	8,41%	91,59%

Sumber: Sintesa dan BPS Kalbar (diolah)

Dari hasil GAP analisis dan isu serta data yang telah dihimpun dari KPPN pada triwulan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yakni:

- Diperlukan akselerasi dalam pembentukan SPPG yang cukup banyak mengingat sampai dengan triwulan II masih terdapat pembentukan SPPG yang sedikit;
- Seiring dengan penambahan SPPG juga diperlukan cakupan sekolah yang diperluas mengingat jumlah sekolah masih banyak yang belum terlayani MBG;
- Diperlukan perlindungan bagi pekerja di dapur SPPG, sehingga dapat terlindungi apabila terjadi kecelakaan kerja.
- Diperlukan monitoring dan evaluasi dan evaluasi sehingga dapat dilakukan perbaikan sekaligus akselerasi program MBG di Kalimantan Barat.

2.4.4. Kesimpulan dan Rekomendasi atas Pelaksanaan Program MBG di Kalimantan Barat

Dari hasil analisis yang dilakukan sampai dengan triwulan II di atas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

- Geografis Kalimantan Barat yang luas dan terdapat daerah yng cukup sulit untuk dijangkau dengan karakter yang berbeda di tiap wilayah, menjadi tantangan sendiri dalam perluasan program MBG.
- Jumlah penduduk yang tergolong penerima manfaat, terdiri dari usia balita, usia sekolah dan lansia masih sangat besar, sehingga

program MBG bisa lebih ditingkatkan dan diperluas lagi di seluruh regional Kalimantan Barat.

- Program MBG belum terlihat dampaknya terhadap NTP, karena pelaksanaannya yang masih relatif singkat dengan capaian sampai dengan Juni 2025 telah tersalur kepada 160.823 penerima manfaat atau 12,86% dari target sebesar 1.250.037 penerima manfaat di tahun 2025.. Namun perbedaan terlihat dari masing-masing jenis NTP (NTPP, NTPH, NTPR, NTPT, dan NTNP) yang signifikan antara satu dengan lainnya, dengan Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPR) merupakan NTP yang mengalami perbedaan terbesar di regional Kalimantan Barat. Hal ini dimungkinkan karena komoditas terbesar di regional Kalimantan Barat adalah kelapa sawit, dan hal ini dapat menjadi indikasi adanya ketergantungan produk hasil tanaman pangan.
- Perlunya akselerasi dalam program MBG agar dapat dicapai realisasi yang dapat mendekati target, sehingga dana yang telah dianggarkan pada tahun 2025 dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Dari kesimpulan tersebut dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

- BGN perlu melakukan akselerasi dengan memperbanyak SPPG dan tentunya harus tersebar merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat dengan dapur dan logistik yang harus memenuhi standar dan terjaga dengan baik serta pekerja pada dapur harus diperhatikan dengan baik. Dengan melakukan hal tersebut diharapkan makanan yang dihasilkan cukup dari segi jumlah dan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan agar program MBG terasa manfaatnya sampai ke daerah terpencil/perbatasan.
- Cakupan sekolah harus diperbanyak mengingat jumlah sekolah tingkat SD, SMP dan SMA sederajat yang dapat menerima manfaat MBG masih relatif rendah.
- Koordinasi dengan instansi vertikal dan Pemda khususnya harus lebih ditingkatkan, mengingat

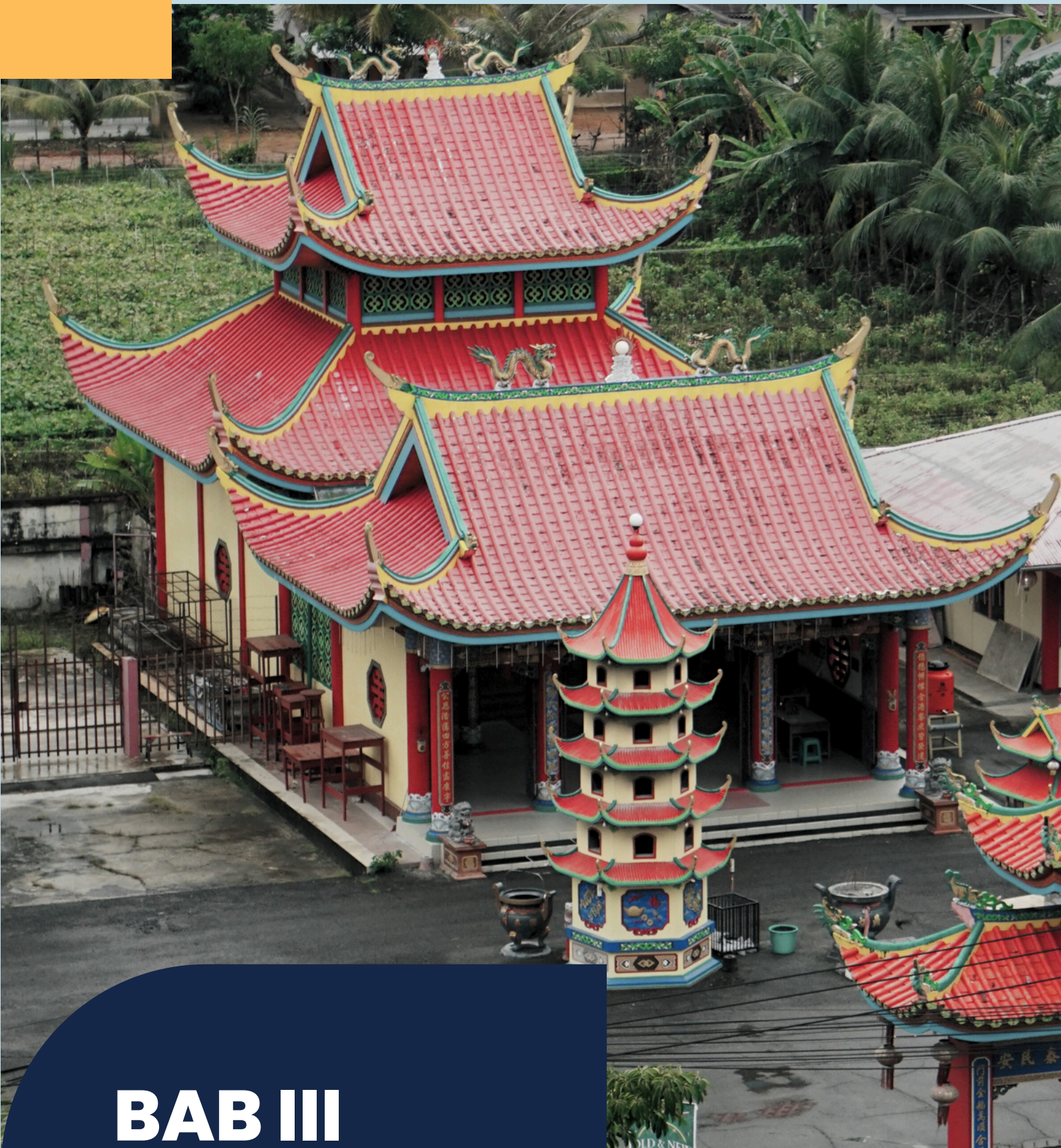
telah terdapat MoU antara BGN dengan Pemda untuk mendukung Program MBG.

- BGN perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap cakupan MBG dan kualitas makanan, serta perlu adanya survei kepuasan dari penerima manfaat untuk perbaikan kedepannya.
- Diperlukan keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja di dapur SPPG sehingga terlindungi, apabila terjadi kecelakaan kerja.
- Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat senantiasa aktif dalam pertemuan yang melibatkan Pemda dengan memberikan pandangan terkait pelaksanaan program prioritas pemerintah di regional Kalimantan Barat.



Halaman ini sengaja dikosongkan





BAB III

Analisis Tematik

Pembahasan Tematik

Mengukur Kesiapan Koperasi Desa
Merah Putih: Analisis Indikator
Kalimantan Barat



Humas Kanwil DJPb Kalbar
Wihara Tri Dharma Bumi Raya 📍

VIHARA TRI DHARMA BUDI RAYA

Wihara Tri Dharma Bumi Raya dulu hanyalah sebuah pondok sederhana yang berfungsi sebagai tempat singgah bagi pendatang. Sekitar tahun 1920, pondok tersebut dibongkar dan diganti dengan bangunan wihara yang permanen.

Source: indonesiakaya.com

PESONA SI BUMI BORNEO



Eweh manjala ie maneser

Siapa menjala, dia juga menyelam

**Jika ingin sesuatu, maka
harus bekerja keras untuk
mendapatkannya.**

Source: Peribahasa Suku Daya Ngaju

BAB III

ANALISIS TEMATIK

3.1. Pendahuluan

“Di tengah kompleksitas tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat desa, koperasi hadir sebagai instrumen strategis yang mampu menopang pembangunan ekonomi berbasis gotong royong.”

Koperasi hadir sebagai lembaga ekonomi yang unik karena mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, gotong royong, dan solidaritas, yang berbeda dengan model bisnis kapitalis pada umumnya. Dalam konteks masyarakat desa yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), koperasi menjadi instrumen vital untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah, pengelolaan sumber daya secara kolektif, serta peningkatan daya tawar dan pemasaran produk lokal sehingga dapat membantu masyarakat yang terus menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan modal, kesulitan akses pasar, dan risiko ketergantungan pada pihak luar yang bisa merugikan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, keberadaan koperasi berkontribusi besar pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, dengan memberdayakan seluruh anggota komunitas secara inklusif tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Secara nasional, koperasi menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional yang berkeadilan, berdaulat, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan koperasi bukan hanya sekadar aspek ekonomi, tetapi juga merupakan sebuah skema sosial untuk menegakkan keadilan ekonomi dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, koperasi menjadi inovasi sosial yang dapat mengakomodasi dinamika

kebutuhan ekonomi lokal dalam ruang lingkup yang mengalami perluasan, termasuk dalam menghadapi tantangan digitalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, memperkuat koperasi di tingkat desa menjadi sangat mendesak agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berperan aktif sebagai agen perubahan dan pendorong pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan. Melalui inisiatif Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah hadir untuk mengoptimalkan peran koperasi desa sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

3.2. Implementasi Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat

Implementasi Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat diharapkan memegang peranan strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi dan penguatan potensi lokal. Sebagai wadah usaha yang berakar pada nilai gotong royong, Koperasi Desa Merah Putih digagas untuk hadir di berbagai wilayah, mulai dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi hingga desa-desa terpencil. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih pun tentu tidak terlepas dari kerangka regulasi yang menjadi dasar pengelolaan dan pengembangannya, serta dinamika perkembangan di lapangan yang mencerminkan tingkat implementasinya.

3.3.1. Dukungan Regulasi

Regulasi Pada Pemerintah Pusat

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
- Pemerintah pada tingkat pusat telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang menjadi dasar hukum pengembangan koperasi di seluruh

Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. Regulasi ini ditetapkan untuk menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

Salah satu hal yang dibahas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah mengenai pengaturan koperasi. Penetapan regulasi tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah pusat untuk mengakselerasi dan meningkatkan kualitas Koperasi melalui kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan. Hal-hal yang dilakukan guna mempermudah dan mendorong perkembangan koperasi yang tertuang dalam regulasi ini diantaranya:

- Mengubah UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk memperluas peluang keterlibatan koperasi dalam pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial.
- Mengubah batas minimal jumlah orang untuk membentuk koperasi primer yang semula 20 orang (UU Nomor 25 Tahun 1992) menjadi 9 orang.
- Memperjelas dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan rapat anggota melalui penambahan ayat 3 pada pasal 22 UU Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi "Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring".
- Pengembangan kegiatan koperasi usaha simpan pinjam berprinsip syariah yang dilakukan melalui penambahan pasal 44A UU Nomor 25 Tahun 1992, dst.

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2024

Pada tahun 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi dengan tujuan untuk menetapkan tugas, fungsi dan struktur Kementerian Koperasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi guna mendukung pengembangan koperasi sebagai pilar perekonomian kerakyatan. Dengan terbitnya perpres ini, maka Kementerian Koperasi berdiri sendiri atau tidak menjadi satu dengan UMKM. Dengan adanya pemekaran kementerian ini diharapkan dapat meningkatkan penanganan permasalahan yang lebih fokus, struktur organisasi yang lebih jelas sehingga koperasi di Indonesia dapat berkembang maju dan memberikan kontribusi bagi perekonomian yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat nasional tidak terkecuali di regional Kalimantan Barat.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025

Regulasi ini menetapkan mekanisme pendanaan koperasi melalui pinjaman dari bank pemerintah, dengan plafon hingga Rp3 miliar, tingkat suku bunga 6% per tahun, tenor maksimal 72 bulan, dan memungkinkan alokasi sampai Rp500 juta untuk operasional. Lebih lanjut, peraturan tersebut mewajibkan adanya persetujuan formal dari kepala desa atau bupati/wali kota hasil dari musyawarah desa serta mensyaratkan penggunaan dana seperti Dana Desa, DAU, atau DBH sebagai pendukung pengembalian pinjaman. Skema kolaboratif ini diharapkan menciptakan akses pembiayaan yang terstruktur, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan koperasi yang baru berdiri, sekaligus mendorong pengembangan usaha produktif di tingkat desa dan kelurahan

e. Petunjuk Pelaksanaan Deputy Bidang Perkoperasian Nomor 33 Tahun 2021

Guna mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing, yang dikelola

secara transparan dan akuntabel oleh Pengurus dan Pengawas yang memiliki integritas tinggi, kredibel, inovatif dan bertanggung jawab maka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia c.q. Deputi Bidang Perkoperasian menerbitkan Juklak Nomor 33 Tahun 2021 sebagai Pedoman Uji Kelayakan Kepatuhan Pengurus Pengawas Koperasi. Juklak tersebut diterbitkan untuk menyediakan pedoman standar terkait Uji Kelayakan dan Kepatuhan bagi Pengurusan dan Pengawasan yang diutamakan pada koperasi dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK).

f. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2023

Dalam rangka mengawal industri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di tengah meningkatnya kompleksitas bisnis dan risiko dengan mengedepankan pada aspek pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan, maka Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kewajiban Penilaian Mandiri Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Melalui Sistem Pengawasan Koperasi. Regulasi ini mengatur bahwa KSP dan KSPPS wajib melakukan penilaian dan pemeriksaan kesehatan melalui sistem pengawasan koperasi yang telah disediakan Kementerian Koperasi dan UKM secara mandiri sebagai salah satu tahapan dalam pengawasan berbasis risiko. Dengan adanya penilaian dan pengukuran kesehatan KSP dan KSPPS secara mandiri, diharapkan koperasi mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta mengimplementasikan manajemen risiko dan tata kelola yang lebih baik sehingga dapat bertahan menghadapi persaingan usaha serta menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih baik lagi.

g. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2023

Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan SE Nomor 7 Tahun

2023 tentang Pernyataan Mandiri (*Self Declare*) Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Penerbitan surat edaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman, pembahasan serta literasi kepada pembina dan pengurus koperasi, serta pemangku kepentingan lainnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan aturan pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan penilaian usaha simpan pinjam. Selain itu, surat edaran ini juga memberikan pilihan awal pada KSP/KSPPS/USP/USPPS Koperasi dalam menilai sendiri dan mengategorikan usahanya sebagai *open loop* atau *close loop*. Penilaian tersebut mencakup pelaksanaan verifikasi lapangan, pemetaan permasalahan dan pembinaan lanjutan terhadap koperasi. Pernyataan *Self Declare* tersebut disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2023 melalui web based Kemenkop UKM.

h. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023

Pasca terbitnya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2023, Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pernyataan Mandiri (*Self Declare*) Tahap 2 Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Surat edaran ini diterbitkan dalam rangka memberikan kesempatan bagi koperasi yang belum melaksanakan Pernyataan Mandiri (*Self Declare*) Tahap 1, maka perlu dilakukan pernyataan Mandiri (*Self Declare*) Tahap 2 oleh pengurus KSP/KSPPS/USP/USPSS Koperasi di seluruh Indonesia. KSP/KSPPS/USP/USPSS Koperasi di seluruh Indonesia harus melakukan *self declare* dan disampaikan Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM melalui web based Kemenkop UKM paling lambat 29 Desember 2023.

Regulasi Pada Pemerintah Daerah

i. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125 Tahun 2021 mengatur terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan ini memiliki kaitan strategis dengan koperasi di Kalimantan Barat karena mengatur struktur kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan program serta kebijakan terkait pengembangan koperasi. Pembentukan instansi Dinas yang kuat dan terstruktur akan berdampak pada pelaksanaan program dan kebijakan yang lebih efektif tidak terkecuali dalam hal koperasi.

j. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 206 Tahun 2021

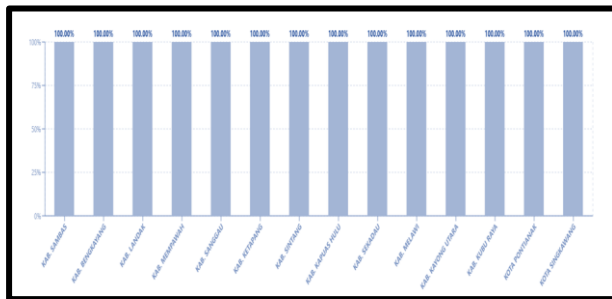
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 206 Tahun 2021 merupakan regulasi perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021, yang menyesuaikan beberapa ketentuan terkait struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Perubahan ini secara spesifik mencakup penyesuaian pada Pasal 24 dan Pasal 27. Khususnya untuk koperasi, pada pasal 24 terkait tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi terdapat penambahan poin yakni "penyelenggaraan dan menyiapkan bahan/materi serta sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi koperasi serta memberikan bimbingan, pendampingan di lapangan, layanan konsultasi dan informasi pasca pelatihan pengembangan koperasi".

3.3.2. Gambaran Umum Perkembangan Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat

Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Program yang diluncurkan pada 21 Juli 2025 ini menjadi respons terhadap kebutuhan untuk membangun struktur ekonomi yang lebih adil, berdaulat, dan berbasis komunitas. Berlandaskan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang didorong oleh nilai-nilai gotong royong, kemandirian, dan solidaritas sosial, Koperasi Desa Merah Putih dimaksudkan sebagai kendaraan utama dalam mewujudkan cita-cita pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional melalui pembangunan ekonomi rakyat. Pada tahun 2025, Presiden Prabowo menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa Merah Putih secara nasional. Target ini didukung penuh oleh berbagai kementerian, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan memberikan pendampingan teknis, akses pendanaan, dan pengembangan platform digital untuk administrasi koperasi.

Dari jumlah total desa dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai sekitar 2.145 desa/kelurahan, seluruhnya telah sepakat membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. Hal ini dapat menjadi modal awal yang kuat dalam tujuan membangun ekonomi kerakyatan Provinsi Kalimantan Barat yang berbasis potensi lokal melalui koperasi. Dengan keberadaan koperasi, setiap desa dan kelurahan memiliki instrumen kelembagaan resmi untuk mengelola sumber daya alam, mengoptimalkan usaha mikro dan kecil, serta memfasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran bagi warga sehingga ekonomi akan tumbuh mulai dari desa/kelurahan terluar hingga ke pusat ibukota.

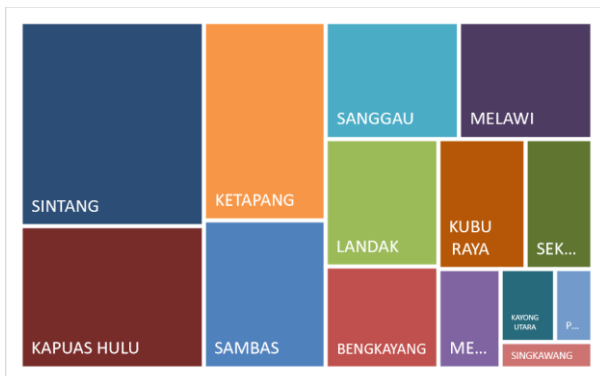
Grafik 3. 1 Persentase Desa/Kelurahan Membentuk Koperasi Merah Putih Berdasarkan Kabupaten/Kota Kalimantan Barat



Sumber: kopdesmerahputih.kop.id

Konteks ini menjadi sangat penting mengingat Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah sekitar $\pm 147.307 \text{ km}^2$ dengan karakter geografis yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan, yang memengaruhi akses dan distribusi layanan kelembagaan di tingkat desa. Sebaran Koperasi Desa Merah Putih di wilayah ini secara umum sejalan dengan jumlah desa di setiap kabupaten, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kabupaten Sintang sebanyak 406 unit, disusul oleh Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang yang masing-masing memiliki lebih dari 200 unit. Kondisi ini mencerminkan keterkaitan erat antara keberadaan koperasi dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di tingkat desa, serta menegaskan peran koperasi sebagai pilar penting dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal yang berakar pada komunitas setempat.

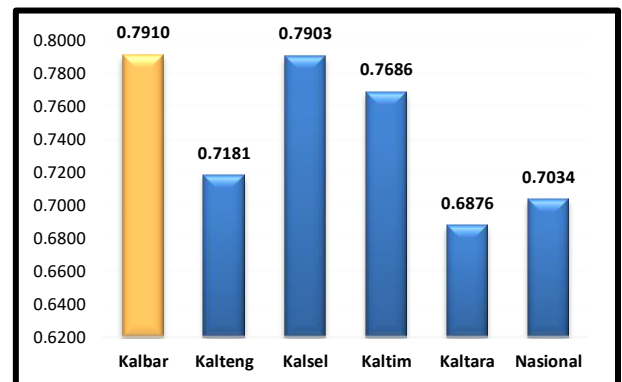
Grafik 3. 2 Sebaran KDMP di Provinsi Kalbar



Sumber: kopdesmerahputih.kop.id

Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan akses internet yang baru menjangkau sekitar 78,9% desa sehingga berpotensi menjadi hambatan dalam mendorong pengembangan dan perluasan jangkauan pasar koperasi melalui digitalisasi. Namun di sisi lain, potensi demografis Kalimantan Barat cukup menjanjikan, dengan jumlah penduduk sekitar 5,7 juta jiwa, di mana 67,6% di antaranya berada pada usia produktif. Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 pun berada di kategori Maju dan menjadi yang tertinggi dibanding provinsi lain di Pulau Kalimantan dengan rata-rata nilai IDM 0,7910, di atas nilai rata-rata Indeks Desa Membangun nasional 0,7034. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa koperasi desa di Kalimantan Barat memiliki peluang yang besar untuk tumbuh dan berkembang lebih pesat di masa mendatang.

Grafik 3. 3 IDM Pulau Kalimantan 2024



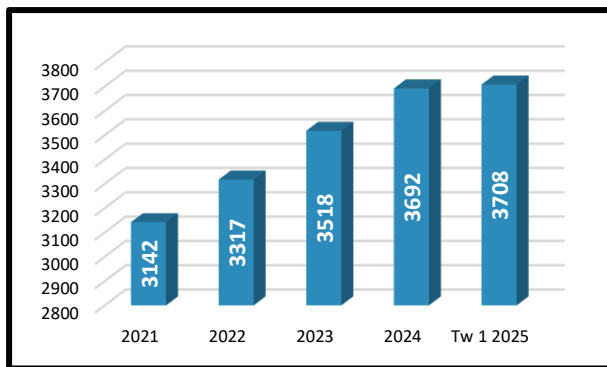
Sumber: <https://idm.kemendes.go.id/> (diolah)

Kondisi Koperasi Eksisting Kalimantan Barat

Realisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih secara nasional sampai Juli 2025 mencapai 81.500 unit atau 97,3% dari jumlah Desa/Kelurahan seluruh Indonesia yang sudah tersosialisasi. Capaian pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang telah melampaui target Presiden Prabowo pada 2025 mencerminkan ambisi besar pemerintah mendorong ekonomi kerakyatan berbasis desa. Kalimantan Barat turut berkontribusi positif dengan telah mencapai 100% pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atas jumlah Desa/Kelurahan yang

sudah tersosialisasi. Hal tersebut didukung dari tren positif perkembangan koperasi di Kalimantan Barat yang mengindikasikan kesiapan Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung program strategis ini.

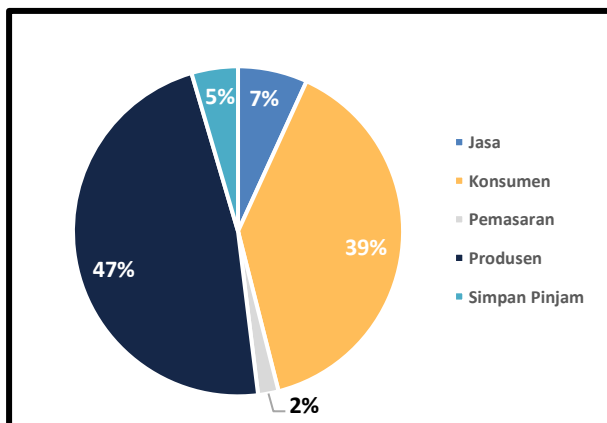
Grafik 3. 4 Perkembangan Koperasi Aktif di Kalbar



Sumber: Laporan Perkembangan Koperasi UMKM Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat (diolah)

Jenis koperasi yang tumbuh di suatu wilayah umumnya merefleksikan karakter ekonomi masyarakat setempat. Dengan merujuk pada klasifikasi lima jenis koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dapat terlihat bidang usaha yang paling dominan di Kalimantan Barat. Jika ditinjau berdasarkan ketentuan tersebut, komposisi bidang usaha koperasi *eksisting* di Kalimantan Barat pada 2024–2025 didominasi oleh Produsen (47%), Konsumen (39%), Jasa (7%), Simpan Pinjam (5%), dan Pemasaran (2%).

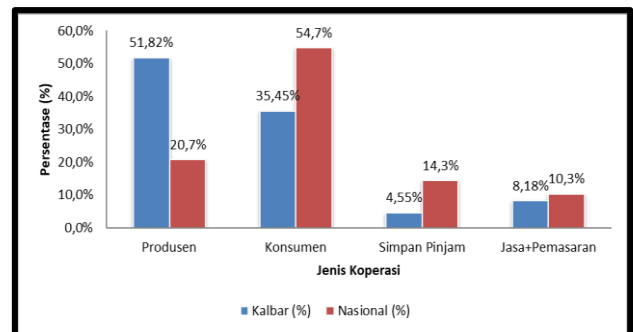
Grafik 3. 5 Komposisi Bidang Usaha Koperasi Eksisting Kalbar 2024



Sumber: Kementerian Koperasi & Dinas Koperasi UKM Prov Kalbar (diolah)

Komposisi ini sejalan dengan kondisi koperasi nasional dimana berdasarkan Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, komposisi jenis koperasi di Indonesia didominasi Koperasi Konsumen (54,70%), diikuti Produsen (20,68%) dan Simpan Pinjam (14,34%), sementara Jasa dan Pemasaran mencakup sekitar 10% sisanya.

Grafik 3. 6 Komposisi Jenis Koperasi: Kalbar vs Nasional



Sumber: ODS Kementerian Koperasi dan UKM

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi di Kalimantan Barat terutama bergerak pada dua bidang utama: koperasi produsen yang mencerminkan basis ekonomi daerah pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta koperasi konsumen yang berperan sebagai saluran distribusi kebutuhan rumah tangga di tingkat desa. Sementara itu, pada level nasional, Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2024 mencatat bahwa sebagian besar lapangan usaha koperasi berasal dari sektor jasa keuangan (66%), yang secara praktis terkait dengan besarnya omset Koperasi Simpan Pinjam. Dengan demikian, meskipun dari sisi jumlah unit koperasi didominasi oleh produsen dan konsumen, secara finansial bidang simpan pinjam dapat dijadikan *proxy* penting dalam pengembangan skala omset koperasi.

Melihat peran strategis Koperasi Desa Merah Putih dalam pembangunan ekonomi kerakyatan khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, penguatan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih menjadi sebuah kebutuhan yang esensial untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada sejauh mana koperasi desa mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada, serta mampu mengelola sumber daya

secara efektif. Oleh sebab itu, penting untuk *mereview* kembali tingkat kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Kalimantan Barat dalam menghadapi berbagai tantangan untuk keberhasilan mengoptimalkan peluang pengembangan koperasi dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya.

3.3. Indikator Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih diposisikan sebagai instrumen kolektif masyarakat desa untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus memperkuat ketahanan sosial komunitas. Dalam kerangka pembangunan desa, koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, melainkan juga sebagai wadah konsolidasi sosial yang menumbuhkan kemandirian masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan ukuran obyektif mengenai tingkat kesiapan koperasi. Tanpa indikator yang jelas, perkembangan koperasi akan sulit dipetakan, program pembinaan menjadi tidak tepat sasaran, serta intervensi pemerintah maupun pemangku kepentingan kurang efektif.

Penetapan indikator kesiapan dengan demikian merupakan kebutuhan mendesak. Indikator tersebut berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai apakah koperasi telah memiliki dasar hukum yang kuat, tata kelola organisasi yang berjalan, kapasitas SDM yang memadai, basis keanggotaan yang aktif, serta sarana, prasarana, dan dukungan teknologi yang relevan dengan tuntutan zaman. Dalam konteks Kalimantan Barat, yang ditandai dengan keragaman sosial-ekonomi, akses infrastruktur yang tidak merata, serta luas wilayah yang cukup besar, indikator kesiapan koperasi berfungsi sebagai instrumen kalibratif untuk memotret variasi kesiapan Koperasi Desa Merah Putih secara komprehensif.

Dari hasil telaahan terhadap landasan formal yang tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dapat dirumuskan sejumlah indikator kesiapan koperasi. Pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa akta pendirian merupakan syarat sah berdirinya koperasi; hal ini melahirkan indikator Akta Pendirian. Pasal 8 mewajibkan

keberadaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman kelembagaan, yang menjadi dasar indikator AD/ART dan Struktur Organisasi. Selanjutnya, Pasal 5 dan Pasal 31 menekankan pentingnya pendidikan perkoperasian bagi anggota, sehingga muncul indikator Pelatihan dan Pembinaan. Adapun Pasal 20 yang mengatur mengenai prinsip keanggotaan sukarela dan aktif dijadikan landasan indikator Anggota Aktif.

Dari hasil telaahan terhadap literatur akademis dan konsep kelembagaan usaha modern, dapat pula dirumuskan indikator tambahan yang memperkuat kesiapan koperasi. Teori *cooperative lifecycle* (Cook & Burrell, 2009) menjelaskan bahwa koperasi berkembang melalui tahapan desain organisasi, pertumbuhan, kematangan, hingga titik pilihan adaptasi. Pada fase pertumbuhan kematangan, kebutuhan akan diversifikasi sumber modal menjadi penting, sehingga indikator Sumber Modal selain Simpanan Anggota dapat dirumuskan. Fase kematangan menekankan perlunya kelembagaan yang mapan yang terefleksi pada keberadaan Kantor/Gedung; sedangkan fase pilihan adaptasi menekankan inovasi yang melahirkan indikator Dukungan Teknologi.

Berbagai literatur lain turut memperkuat pilihan indikator tersebut. Rusmiati dkk. (2025) menegaskan bahwa tata kelola kelembagaan, partisipasi anggota, inovasi digital, pendidikan koperasi, serta struktur permodalan merupakan determinan utama kinerja koperasi. Suhartono (2012) menekankan penguatan manajemen, sistem kelembagaan, dan orientasi bisnis sebagai prasyarat profesionalisasi koperasi. Sementara Arzwiniga dkk. (2025) menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM, penggunaan teknologi, dan perumusan kebijakan berbasis kebutuhan lokal. Dari telaahan akademis tersebut, indikator Sumber Modal selain Simpanan Anggota, Ketersediaan Kantor/Gedung, dan Dukungan Teknologi dirumuskan untuk melengkapi indikator berbasis landasan formal dan merepresentasikan kebutuhan kelembagaan koperasi yang adaptif terhadap dinamika usaha modern.

Tabel 3. 1 Matriks Relevansi Indikator terhadap Literatur

Indikator Koperasi Desa Merah Putih	Relevansi UU No.25 Tahun 1992	Relevansi Teori Cooperative Lifecycle Cook & Burress (2009)	Relevansi Literatur di Indonesia (2012–2025)
Akta Pendirian	Pasal 6 & 7: status badan hukum koperasi	Tahap Organizational Design: legalitas formal	Prasyarat kelembagaan untuk tata kelola & legitimasi organisasi (Suhartono, 2012)
AD/ART & Struktur Organisasi	Pasal 8: kewajiban AD/ART	Tahap Organizational Design: desain kelembagaan	Penguatan tata kelola & profesionalisasi kelembagaan (Rusmiati dkk., 2025; Suhartono, 2012)
Pelatihan & Pembinaan	Pasal 5 & 31: pendidikan perkoperasian	Tahap Growth and Consolidation: peningkatan SDM	Determinannya kinerja koperasi: pendidikan/pelatihan pengurus & anggota (Rusmiati dkk., 2025; Arzwiniga dkk, 2025)
Anggota Aktif	Pasal 20: keanggotaan sukarela & aktif	Tahap Growth: partisipasi anggota sebagai motor koperasi	Partisipasi anggota sebagai keunggulan koperasi (Rusmiati dkk., 2025)
Sumber Modal selain Simpanan Anggota	Pasal 41: modal dari simpanan anggota & sumber sah lainnya	Tahap Growth–Maturity: diversifikasi modal	Struktur permodalan & akses modal sebagai faktor kinerja (Rusmiati dkk., 2025; Suhartono, 2012; Arzwiniga dkk, 2025)
Kantor/Gedung	Tidak eksplisit, implisit Pasal 8 (sarana organisasi)	Tahap Maturity: simbol kelembagaan mapan	Profesionalisasi & pusat layanan administrasi; dukungan implementasi digital (Suhartono, 2012; Arzwiniga dkk., 2025)
Dukungan Teknologi	Tidak eksplisit, implisit Pasal 43 (pengembangan usaha)	Tahap Choice Point: inovasi teknologi	Inovasi/digitalisasi sebagai penentu daya saing & adaptasi (Rusmiati dkk., 2025; Arzwiniga dkk., 2025)

Sumber: Data diolah

3.3.1. Akta Pendirian Koperasi

Akta pendirian adalah landasan hukum utama yang memberikan legitimasi eksistensi koperasi. Berdasarkan Pasal 6 dan 7 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, akta pendirian harus disahkan oleh pemerintah sebagai bukti legalitas. Tanpa akta, koperasi tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian, mengakses pembiayaan, ataupun diakui dalam struktur kelembagaan nasional. Suhartono (2012)

menegaskan bahwa kelembagaan formal merupakan tahap awal profesionalisasi koperasi dan menjadi pintu masuk bagi koperasi untuk berfungsi sebagai subjek ekonomi.

Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat, kepemilikan akta menjadi indikator fundamental kesiapan karena akta berkaitan langsung dengan akses terhadap layanan perbankan, program pemerintah, maupun bantuan hibah. Tanpa akta, koperasi tetap dapat berjalan secara informal, tetapi posisinya akan rentan secara

hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan mitra, khususnya dalam hal pembiayaan atau pencarian modal dari sumber lain. Akta yang sah menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih telah melewati tahapan administratif penting, sehingga menandakan kesiapan awal yang legal.

Lebih jauh, akta juga merupakan instrumen akuntabilitas. Proses pengajuannya melibatkan penyusunan dokumen, pengumpulan data anggota, hingga pengesahan oleh pejabat berwenang. Tahapan ini mencerminkan adanya tata kelola yang mulai terbangun. Oleh karena itu, dalam kerangka pengukuran kesiapan, kepemilikan akta harus menjadi indikator pertama dan utama karena tanpa itu Koperasi Desa Merah Putih tidak memiliki pijakan kelembagaan yang sah maupun payung hukum bagi anggotanya.

3.3.2. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Struktur Organisasi

AD/ART adalah "konstitusi internal" koperasi yang memuat aturan dasar mengenai tujuan, keanggotaan, kewajiban, hak, serta mekanisme pengelolaan koperasi. Pasal 8 UU No. 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa AD/ART harus disusun melalui musyawarah anggota, sehingga mencerminkan prinsip demokrasi koperasi. Struktur organisasi melengkapi AD/ART dengan pembagian tugas dan peran pengurus, pengawas, serta unit kerja yang menunjang operasional koperasi.

Indikator ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola berjalan secara efektif. Tanpa AD/ART yang jelas, pengambilan keputusan akan berpotensi tumpang tindih dan pengawasan internal menjadi lemah. Struktur organisasi yang tidak fungsional juga membuka ruang konflik antar anggota. Sebaliknya, keberadaan AD/ART yang disusun secara demokratis dan struktur organisasi yang berjalan rapi menjadi bukti kesiapan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dalam menjaga konsistensi arah dan memperkuat akuntabilitas.

Rusmiati dkk. (2025) menegaskan bahwa tata kelola kelembagaan yang baik dan struktur organisasi yang jelas merupakan determinan keberhasilan

koperasi. Indikator ini memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki fondasi manajerial yang kokoh untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan, serta mampu menjaga kepercayaan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi.

Dalam praktik Koperasi Desa Merah Putih, AD/ART dan struktur organisasi adalah salah satu aspek yang harus dituangkan dalam akta pendirian koperasi. Hal ini menegaskan bahwa AD/ART dan struktur organisasi merupakan indikator yang sangat penting untuk menandakan koperasi siap berjalan.

3.3.3. Pelatihan dan Pembinaan

Aspek sumber daya manusia merupakan tantangan besar dalam kesiapan koperasi desa. Pasal 5 dan 31 UU No. 25 Tahun 1992 menegaskan kewajiban koperasi untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anggota. Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, pelatihan dapat mencakup manajemen koperasi, pengelolaan simpan pinjam, tata kelola keuangan, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Indikator ini penting karena tanpa pelatihan dan pembinaan, pengurus dan anggota Koperasi Desa Merah Putih akan terbatas dalam kapasitas manajerial maupun kewirausahaan. Koperasi yang tidak pernah mendapatkan pelatihan dan pembinaan cenderung berhenti pada tahap seremonial dan gagal berkembang menjadi entitas ekonomi produktif. Sebaliknya, pelatihan dan pembinaan memberikan bekal praktis yang membuat pengurus mampu mengelola koperasi secara profesional dan adaptif terhadap perubahan.

Rusmiati dkk. (2025) menunjukkan bahwa pendidikan dan pembinaan koperasi berpengaruh langsung terhadap kinerja kelembagaan. Sementara itu, Arzewiniga dkk. (2025) menekankan bahwa penguatan kapasitas SDM dan adaptasi teknologi merupakan kebutuhan strategis bagi keberlanjutan koperasi. Oleh karena itu, indikator pelatihan dan pembinaan merefleksikan kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam membangun kompetensi internal dan daya tahan kelembagaan.

3.3.4. Anggota Aktif

Dalam Pasal 20 UU No. 25 Tahun 1992 ditegaskan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang dengan prinsip sukarela dan aktif. Dalam Koperasi Desa Merah Putih, anggota aktif berarti terlibat dalam rapat anggota, menyetorkan simpanan, memanfaatkan layanan koperasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Jika keanggotaan hanya bersifat administratif tanpa partisipasi nyata, Koperasi Desa Merah Putih akan kesulitan beroperasi karena minim dukungan modal sosial. Kondisi ini juga membuka risiko terjadinya fenomena *free rider*, di mana anggota menikmati manfaat koperasi tanpa kontribusi. Sebaliknya, tingginya partisipasi anggota menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat desa terhadap koperasi.

Rusmiati dkk. (2025) menegaskan bahwa partisipasi anggota merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan koperasi. Oleh karena itu, indikator anggota aktif mencerminkan sejauh mana Koperasi Desa Merah Putih memiliki basis sosial-ekonomi yang kuat. Semakin banyak dan berkualitas anggota aktif, semakin besar peluang Koperasi Desa Merah Putih berkembang secara berkelanjutan karena ditopang oleh legitimasi sosial dan dukungan ekonomi internal.

3.3.5. Sumber Modal Selain Simpanan Anggota

Kemandirian koperasi bertumpu pada simpanan anggota, namun Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 jelas membuka ruang bagi koperasi untuk memperoleh modal dari sumber sah lainnya. Diversifikasi modal menjadi indikator penting kesiapan Koperasi Desa Merah Putih karena simpanan anggota di tingkat desa sering terbatas.

Tanpa sumber modal alternatif, Koperasi Desa Merah Putih akan terjebak dalam keterbatasan skala usaha, sulit memperluas layanan, dan tidak mampu menjawab kebutuhan anggotanya. Sebaliknya, koperasi yang mampu menjalin akses ke perbankan, program pemerintah, atau mitra swasta memiliki daya saing lebih besar. Modal eksternal juga

menjadi sinyal kredibilitas dan kesiapan tata kelola keuangan koperasi.

Cook dan Burrell (2009) menegaskan bahwa pada fase pertumbuhan dan kematangan, koperasi perlu melakukan diversifikasi modal agar tidak stagnan. Suhartono (2012) juga menekankan bahwa penguatan manajemen keuangan merupakan prasyarat agar koperasi dapat berorientasi bisnis secara sehat. Dengan demikian, indikator ini menilai sejauh mana Koperasi Desa Merah Putih siap memperluas sumber daya finansialnya untuk mendukung keberlanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dan memperkuat kemandirian ekonomi serta kapasitas usaha di tingkat desa/kelurahan melalui pinjaman pemerintah yang disalurkan oleh Himbara. Meski demikian, Koperasi Desa Merah Putih tetap dapat melakukan diversifikasi modal dengan memperhatikan suku bunga yang paling menguntungkan bagi koperasi itu sendiri.

3.3.6. Kantor atau Gedung Koperasi

Keberadaan kantor atau gedung koperasi bukan sekadar aspek fisik, melainkan simbol legitimasi dan pusat kegiatan kelembagaan. Pasal 8 UU No. 25 Tahun 1992 menyinggung sarana organisasi yang mendukung kelancaran pengelolaan koperasi. Kantor berfungsi sebagai pusat administrasi, tempat rapat anggota, serta ruang pelayanan bagi anggota.

Jika Koperasi Desa Merah Putih tidak memiliki kantor, aktivitas koperasi akan bercampur dengan kepentingan pribadi pengurus atau menumpang pada fasilitas desa yang bersifat sementara. Kondisi ini melemahkan citra profesionalitas dan akuntabilitas koperasi. Sebaliknya, kantor atau

gedung yang layak dapat menjaga keberlanjutan dan keberadaan koperasi sebagai entitas mandiri.

Suhartono (2012) menekankan bahwa sarana kelembagaan merupakan faktor penting dalam membangun koperasi yang profesional. Arzewiniga dkk. (2025) juga menyoroti bahwa infrastruktur organisasi merupakan bagian dari kapasitas lokal yang memperkuat keberadaan koperasi di masyarakat. Dengan demikian, indikator kantor atau gedung menegaskan kesiapan Koperasi Desa Merah Putih untuk beroperasi secara berkelanjutan dan akuntabel.

3.3.7. Dukungan Teknologi

Dalam era digital, dukungan teknologi menjadi indikator kesiapan yang tidak dapat diabaikan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, Pasal 43 UU No. 25 Tahun 1992 mengenai pengembangan usaha memberi ruang bagi koperasi untuk mengadopsi inovasi. Pemanfaatan teknologi memungkinkan Koperasi Desa Merah Putih meningkatkan efisiensi operasional, transparansi keuangan, serta memperluas aksesibilitas layanan bagi anggota.

Meski demikian, penerapan teknologi di desa tidak terlepas dari keterbatasan infrastruktur dasar, seperti ketersediaan listrik, jaringan internet, dan perangkat digital. Di Kalimantan Barat, khususnya desa-desa di wilayah perbatasan atau pedalaman, hambatan tersebut masih menjadi tantangan nyata. Padahal, sistem pencatatan keuangan berbasis aplikasi akan sangat membantu akuntabilitas, memungkinkan laporan keuangan tersaji secara *real-time*, serta mengurangi kesalahan manual. Dengan digitalisasi, pengurus juga lebih mudah melakukan audit dan memperkuat kepercayaan anggota.

Lebih jauh, dukungan teknologi juga mencakup integrasi layanan pembayaran modern. Implementasi QRIS, e-wallet, dan mobile banking tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan keamanan keuangan serta membuka peluang koperasi terhubung dengan ekosistem keuangan digital nasional. Indonesia sendiri telah

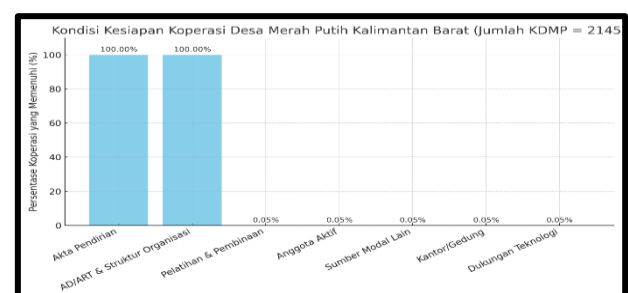
mengalami perkembangan pesat dalam digitalisasi pembayaran, sehingga koperasi desa pun dapat mengambil manfaat dari tren ini.

Cook dan Burress (2009) menekankan bahwa pada fase *choice point*, koperasi harus melakukan inovasi agar tidak stagnan. Rusmiati dkk. (2025) juga menegaskan bahwa inovasi digital merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja koperasi, sementara Arzewiniga dkk. (2025) menekankan teknologi sebagai kebutuhan strategis agar koperasi mampu beradaptasi dengan dinamika lokal maupun global. Oleh karena itu, indikator dukungan teknologi menjadi tolok ukur utama kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam menghadapi transformasi ekonomi modern.

3.4. Kondisi Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih Provinsi Kalimantan Barat

Secara umum, kondisi kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat menunjukkan capaian awal yang cukup positif. Seluruh koperasi telah memenuhi dua indikator fondasional, yaitu Akta Pendirian serta AD/ART dan Struktur Organisasi, yang menjadi syarat dasar terbentuknya kelembagaan koperasi. Namun demikian, sebagian besar koperasi baru berada pada tahap awal proses pemenuhan indikator lanjutan seperti pelatihan dan pembinaan, keterlibatan anggota aktif, sumber modal eksternal, ketersediaan kantor dan gedung, serta dukungan teknologi. Hal ini terjadi karena program Koperasi Desa Merah Putih sendiri baru diluncurkan secara nasional pada 21 Juli 2025, sehingga proses konsolidasi masih berjalan.

Grafik 3. 7 Kondisi Kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kalimantan Barat



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Provinsi Kalbar (diolah)

Di tengah kondisi umum tersebut, terdapat satu koperasi yang menonjol dengan capaian lebih lengkap, yakni Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar di Kabupaten Kubu Raya. Koperasi ini merupakan satu-satunya di Kalimantan Barat yang telah memenuhi seluruh indikator kesiapan, dan ditetapkan sebagai koperasi percontohan nasional pada saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar memberikan bukti konkret bahwa pemenuhan indikator kesiapan dapat dicapai dalam praktik, sekaligus menghadirkan model pembelajaran bagi desa-desa lain di Kalimantan Barat yang sedang berproses.

Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar

Desa Jeruju Besar sendiri dikenal sebagai salah satu desa maju di Kecamatan Sungai Kakap. Dengan penduduk sekitar 6–7 ribu jiwa dan luas wilayah lebih dari 2.000 hektar, desa ini memiliki basis ekonomi pertanian, perkebunan, serta potensi wisata berbasis mangrove dan Equator Park. Indeks Desa Membangun (IDM) menempatkan Jeruju Besar dalam kategori Desa Maju, mencerminkan kekuatan sosial, infrastruktur dasar, serta daya dukung ekonomi lokal yang lebih siap dibanding desa lain. Lingkungan ini memberi fondasi yang kuat bagi tumbuhnya koperasi desa yang sehat dan produktif.

Dalam konteks kesiapan, Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar berkembang pesat sejak awal pendiriannya. Anggota yang semula 76 orang telah bertambah menjadi 359 anggota aktif dengan modal internal mencapai sekitar Rp39 juta. Hal ini tidak lepas dari peran aktif Kepala Desa yang konsisten mendorong konsolidasi warga melalui sosialisasi dan himbauan dengan pendekatan partisipatif. Pada aspek teknis, Kepala Desa pun turut mengawal kepengurusan harian koperasi, mulai dari pengembangan unit bisnis hingga akuntabilitas keuangan. Upaya perangkulan SDM dengan beragam kapasitas juga dilakukan untuk mengatasi potensi kesenjangan pengetahuan yang wajar dalam ekosistem bisnis desa. Kehadiran Kepala Desa dalam keseharian koperasi bukan hanya memperkuat tata kelola, tetapi juga menumbuhkan rasa nyaman serta menjaga

semangat gotong royong di antara anggota dan warga desa.

Gambar 3. 1 Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar



Sumber: Kanwil DJPb Kalimantan Barat

Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar juga telah mengelola berbagai unit usaha yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat desa seperti sembako, pupuk, LPG, obat-obatan, serta pengelolaan sampah. Tidak berhenti di situ, koperasi Jeruju Besar menjalin kemitraan strategis dengan Bulog, Pertamina, Pupuk Indonesia, PT Pos Indonesia, Bank Kalbar, BRI, Mandiri, BTN, hingga Telkomsel.

Gambar 3. 2 Etalase Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar



Sumber: Kanwil DJPb Kalimantan Barat

Meski dalam keberlangsungan bisnisnya masih menemui kendala-kendala seperti kurangnya modal eksternal untuk ekspansi bisnis serta sulitnya mendapatkan *supplier* dengan harga yang kompetitif, koperasi ini tetap dapat menjalankan bisnisnya dengan sehat dan mampu meraup omset Rp500.000,- per harinya, sebuah capaian yang sangat signifikan untuk posisi koperasi sebagai pusat ekonomi desa modern yang relatif baru dibentuk.

Gambar 3. 3 Beberapa Gerai Lain di Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar



Sumber: Kanwil DJPb Kalimantan Barat

Perkembangan Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar memperlihatkan jalur yang mungkin ditempuh koperasi desa lain dalam memenuhi indikator kesiapan, mulai dari penguatan anggota, penyediaan modal, hingga kemitraan eksternal. Namun, kondisi geografis dan kapasitas kelembagaan yang beragam membuat proses pencapaian tersebut memerlukan waktu dan strategi berbeda di tiap desa. Dengan demikian, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar dapat dijadikan sebuah *benchmark* proses, yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan masing-masing koperasi di Provinsi Kalimantan Barat.

3.4.1. Identifikasi Faktor Kendala Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat

Meskipun hampir seluruh Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat telah memiliki Akta Pendirian serta AD/ART dan Struktur Organisasi, mayoritas Koperasi Desa Merah Putih masih belum sepenuhnya memenuhi indikator kesiapan lainnya. Beberapa faktor kendala utama yang dihadapi dapat diidentifikasi menjadi sebagai berikut:

1. Kebutuhan Waktu untuk Persiapan

Program Koperasi Desa Merah Putih baru diluncurkan pada 21 Juli 2025. Sebagai entitas kelembagaan yang masih sangat baru, Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat masih berada pada tahap persiapan. Proses penyusunan administrasi, perekrutan anggota, pembentukan unit usaha, dan perencanaan kegiatan membutuhkan waktu yang wajar untuk dapat berfungsi optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi masih berada dalam fase konsolidasi awal sehingga pemenuhan indikator kesiapan penuh belum dapat dicapai.

2. Keterbatasan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar koperasi merupakan entitas baru yang tidak mewarisi kelembagaan atau sumber daya dari koperasi lama. Hal ini menimbulkan tantangan dalam kapasitas manajerial, literasi akuntansi, dan pemahaman tata kelola usaha. Penelitian Rusmiati dkk. (2025) menegaskan bahwa kelembagaan yang lemah dan keterbatasan kualitas SDM merupakan kendala dominan yang menghambat perkembangan koperasi desa pada fase awal.

3. Hambatan Geografis dan Infrastruktur

Sebaran wilayah Kalimantan Barat yang luas, termasuk desa-desa di perbatasan dan pedalaman, menimbulkan tantangan tersendiri. Keterbatasan transportasi, infrastruktur dasar, serta akses komunikasi dapat menghambat pelaksanaan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan koperasi secara merata. Faktor geografis ini berpotensi memperlambat akselerasi kesiapan koperasi, terutama dalam indikator yang berkaitan dengan

peningkatan kapasitas anggota maupun penguatan unit usaha.

4. Kendala Pembiayaan Eksternal dan Regulasi Teknis

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memberikan peluang bagi koperasi untuk mengakses pinjaman hingga Rp3 miliar melalui bank pemerintah. Namun, hingga Agustus 2025, pemerintah belum merilis petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang dapat menjadi pedoman operasional bagi koperasi dan daerah. Akibatnya, Koperasi Desa Merah Putih belum dapat menggunakan skema pembiayaan ini secara optimal, meskipun kebijakan dasarnya telah tersedia. Padahal, entitas Koperasi Desa Merah Putih yang relatif baru dan masih dalam proses konsolidasi awal serta penggalangan modal anggota, sangat membutuhkan sumber pembiayaan eksternal yang salah satunya dapat diharapkan melalui kebijakan pada PMK tersebut.

5. Hambatan Partisipasi Anggota

Partisipasi anggota merupakan inti dari keberlangsungan koperasi. Namun, pada tahap awal pembentukan, koperasi di Kalimantan Barat masih dalam proses konsolidasi keanggotaan. Rekrutmen anggota aktif memerlukan waktu, sementara keterbatasan tingkat kesejahteraan masyarakat desa juga memengaruhi kemampuan mereka untuk menyetor simpanan pokok dan wajib. Kondisi ini menjadikan partisipasi anggota dapat relatif menjadi rendah. Selain itu juga dibutuhkan strategi pendampingan agar keterlibatan anggota berkembang secara nyata dan tidak sekadar administratif.

Dengan melihat faktor-faktor kendala di atas, dapat dipahami bahwa keterbatasan kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat lebih disebabkan oleh posisinya sebagai lembaga yang baru berdiri, sehingga banyak aspek masih dalam tahap persiapan. Dengan demikian, kendala-kendala yang teridentifikasi perlu diposisikan sebagai dasar perumusan strategi dan rekomendasi yang bersifat operasional oleh pemerintah pusat,

pemerintah daerah, maupun pemerintah desa itu sendiri.

3.5. Rekomendasi dan Strategi

Berdasarkan identifikasi kendala kesiapan, terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat diprioritaskan untuk mempercepat kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat. Strategi ini tidak hanya ditujukan untuk mengatasi hambatan teknis, tetapi juga memastikan koperasi memiliki arah pembangunan yang berkelanjutan.

Pertama, penetapan standar *timeline* dan *roadmap* Koperasi Desa Merah Putih. Karena Koperasi Desa Merah Putih merupakan program baru yang diluncurkan pada Juli 2025, diperlukan penetapan jangka waktu yang realistis bagi koperasi untuk mencapai setiap indikator kesiapan. *Roadmap* ini dapat dibagi ke dalam fase persiapan administratif, konsolidasi anggota, penguatan kelembagaan, hingga pengembangan unit usaha. Dengan adanya target waktu bertahap, pemerintah daerah dan lembaga pendamping dapat menyalurkan dukungan secara lebih terukur. Pemerintah Pusat selaku regulator di tingkat yang lebih tinggi dapat merumuskan strategi ini menjadi sebuah petunjuk pelaksanaan yang dipayungi secara hukum untuk dapat dijadikan pedoman di seluruh Indonesia.

Kedua, penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM koperasi. Pada konteks ini, Pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih masif yaitu melalui pelatihan manajemen koperasi, pelatihan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, pengelolaan dan pengembangan usaha, serta pemahaman regulasi khusus Koperasi Desa Merah Putih. Pelatihan tidak cukup bersifat umum, melainkan harus dirancang spesifik sesuai dengan kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih sebagai koperasi desa baru yang berbeda dari koperasi pada umumnya. Pendampingan lapangan yang berkesinambungan menjadi kunci, agar pengurus mampu mengatasi persoalan teknis sehari-hari serta menginternalisasi prinsip tata kelola koperasi yang baik.

Namun, meski tidak terkhusus untuk Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya telah melakukan pelatihan dan

pendampingan untuk pengembangan koperasi. Hal tersebut telah dilaksanakan secara periodik oleh Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Barat dalam rangka mengembangkan koperasi adalah memberikan pendidikan manajemen, literasi keuangan, dan teknologi untuk pengurus dan anggota koperasi untuk menunjang tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kegiatan pendampingan dan pelatihan koperasi yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Barat salah satunya berupa Pelatihan Perkoperasian tentang Manajemen Laporan Keuangan, dan Akuntansi, Manajemen Perkoperasian, dan Digitalisasi Koperasi se-Kalbar. Pada 10 Juni 2024, Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat menggelar Pelatihan Perkoperasian yang mencakup manajemen laporan keuangan, akuntansi, manajemen perkoperasian, dan digitalisasi koperasi. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan koperasi dari berbagai kabupaten/kota di lingkup Kalimantan Barat. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman serta kompetensi SDM koperasi di bidang keuangan dan manajemen.

Gambar 3. 4 Kegiatan Pelatihan Koperasi oleh Dinas Koperasi UKM Kalbar



Sumber: Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat

Kegiatan ini dapat disesuaikan dengan konteks Koperasi Desa Merah Putih dan ditambah tingkat prioritasnya dengan didukung oleh anggaran yang tersedia untuk akselerasi berjalannya seluruh Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Kalimantan Barat.

Ketiga, percepatan implementasi pembiayaan eksternal. Regulasi PMK Nomor 49 Tahun 2025 sudah menyediakan akses pinjaman hingga Rp 3 miliar per koperasi, namun implementasi masih menunggu juknis resmi. Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu mendorong percepatan penerbitan petunjuk teknis, sekaligus memberikan bimbingan penyusunan proposal pembiayaan agar koperasi siap memanfaatkan skema ini ketika sudah berjalan. Bank Indonesia bersama Bank Himbara selaku pelaksana aktivitas moneter di Indonesia pun perlu ikut terlibat dalam akselerasi implementasi pembiayaan koperasi ini. Dukungan teknis yang proaktif akan sangat membantu Koperasi Desa Merah Putih yang masih dalam tahap pengumpulan modal anggota.

Keempat, penguatan partisipasi anggota koperasi. Upaya sosialisasi perlu diperluas dengan menekankan manfaat konkret menjadi anggota aktif, baik dalam bentuk akses usaha, simpan pinjam, maupun jaminan keberlanjutan ekonomi desa. Pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota perlu mendukung Pemerintah Desa dengan berbagai program yang dapat meningkatkan partisipasi anggota.

Secara keseluruhan, rekomendasi ini menekankan bahwa percepatan kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat membutuhkan kombinasi strategi: kejelasan *roadmap*, penguatan SDM melalui pelatihan dan pendampingan spesifik, fasilitasi pembiayaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat desa. Peran aktif seluruh entitas pemerintahan serta instansi lain yang terkait akan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan koperasi desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berbasis gotong royong.



BAB IV

Kesimpulan & Rekomendasi



Humas Kanwil DJPb Kalbar
Perbatasan Entikong

PLBN ENTIKONG

PLBN Entikong kerap disebut sebagai pos lintas batas pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1989. PLBN Entikong dikelola Provinsi Kalimantan Barat dan kini berada dalam naungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri.

Source: bnpp.go.id

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada setiap Bab, dapat disimpulkan poin-poin sebagai berikut:

4.1.1. Analisis Ekonomi Regional

1. Ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II tahun 2025 tumbuh sebesar 5,59% secara yoy dan tumbuh sebesar 1,94% secara qttq. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat secara yoy dan qttq berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian Kalimantan Barat masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT).
2. PDRB ADHB Kalimantan Barat triwulan II tahun 2025 sebesar Rp81.108,71miliar, sedangkan PDRB ADHK Kalimantan Barat triwulan II tahun 2025 sebesar Rp402.263,86 miliar.
3. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada tiga komponen pengeluaran diantaranya komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang yang menyumbang laju pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 104,24%; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 54,76%; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) yang menyumbang laju pertumbuhan sebesar 10,47%; dan disusul oleh Komponen PMTB sebesar 8,6%; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,44%. Satu komponen mengalami kontraksi, yaitu Komponen Pengeluaran Pemerintah sedalam 0,31%.
4. Tingkat inflasi Kalimantan Barat mencapai 1,20% secara yoy pada Juni 2025 dan berada pada dibawah capaian inflasi nasional sebesar 1,87% secara yoy. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi terbesar baik secara yoy maupun mtm. Komoditas udang basah dan ikan tongkol menjadi komoditas dengan frekuensi terbanyak sebagai penyumbang inflasi dalam 6 bulan terakhir (Januari-Juni 2025).
5. Nilai neraca perdagangan Kalimantan Barat secara akumulatif mencapai surplus US\$380,51 pada April s.d. Juni 2025. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 17,51% dibandingkan nilai akumulatif pada triwulan II Tahun 2024 yang mencapai US\$ 323,81 juta
6. Persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat pada Maret 2025 sebesar 6,16%, dan selalu berada di bawah persentase kemiskinan nasional sejak tahun 2020 s.d. 2025. Jumlah penduduk miskin pada Maret sebesar 330,95 ribu orang, turun 3,04 ribu orang terhadap September 2024.
7. Pada Maret 2025, koefisien rasio gini di Kalimantan Barat sebesar 0,316, masih terjaga dibawah rata rata nasional. Angka ini naik 0,002 poin jika dibandingkan dengan rasio gini September 2024 yang sebesar 0,314. *Gini ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,348 dan di daerah perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,267.
8. TPT Kalimantan Barat periode Februari 2025 mencapai 4,23%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang pengangguran. TPT di Kalimantan Barat selama tahun 2021 hingga 2025 mengalami tren fluktuatif cenderung menurun dan berada di bawah TPT nasional sebesar 4,76%.
9. NTP di Kalimantan Barat mengalami tren penurunan selama Triwulan II Tahun 2025, namun selalu menempati posisi tertinggi se-regional Kalimantan. Capaian NTP Kalimantan Barat sepanjang triwulan II tahun 2025, selalu lebih besar dari 100. Secara umum, jika NTP >100 maka petani mengalami surplus yang mengartikan bahwa harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya.

10. NTN Kalimantan Barat juga menunjukkan tren fluktuatif selama tahun tiga tahun terakhir hingga triwulan II 2025 dengan nilai NTN pada bulan Juni 2025 mencapai 101,44. NTN di bawah 100 mengartikan bahwa kenaikan harga produksi nelayan lebih rendah daripada kenaikan harga konsumsinya.
11. IPM Kalimantan Barat tahun 2024 mencapai 71,19 (kategori tinggi), namun masih berada di bawah capaian IPM nasional. Tingkat IPM Kalimantan Barat selama periode 2022 – 2024 mengalami tren kenaikan.

4.1.2. Analisis Fiskal Regional

- 1) Sampai dengan akhir triwulan II 2025, Pendapatan Negara dan Hibah di regional Kalimantan Barat telah terealisasi Rp 5.639,23 miliar atau 45,50% dari target. Capaian Pendapatan Negara dan Hibah tersebut mampu tumbuh 5,75% secara yoy yang didukung oleh meningkatnya realisasi PPN, Pajak Lainnya, Cukai, Bea Keluar dan PNBK.
- 2) Penerimaan Negara dan Hibah tersebut masih didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar 88,88% terkhususnya pada pos PPN dan PPh. Pada tahun 2025, terdapat kebijakan deposit pajak yang termasuk dalam komponen Pajak Lainnya. Deposit pajak memiliki potensi untuk dipindah bukukan ke akun pajak tertentu.
- 3) *Tax Ratio* di Kalimantan Barat sebesar 3,13% mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan perpajakannya.
- 4) Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp13.507,96 miliar atau 42,70% dari pagu. Penyerapan belanja tersebut mengalami kontraksi 7,45% secara yoy sejalan dengan penurunan pagunya yang dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi belanja pemerintah dan pencadangan TKD.
- 5) Secara lebih rinci, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terserap Rp3.516,67 miliar memberikan kontribusi terhadap Belanja Negara sebesar 26,03%. Sedangkan, Transfer Ke Daerah (TKD) mampu tersalurkan Rp9.991,29 miliar dan memberikan kontribusi terhadap Belanja Negara sebesar 73,97%.
- 6) Belanja modal masih menjadi pos dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang memiliki tingkat persentase yang terendah karena (1) pelaksanaan pembayaran masih menunggu pihak ketiga untuk mencapai target progres pekerjaan; (2) blokir anggaran dalam rangka efisiensi belanja pemerintah; (3) *timeline* pelaksanaan kegiatan yang mengalami kemunduran.
- 7) Penyaluran DAK Fisik di lingkup Kalimantan Barat memiliki tingkat persentase terendah jika dibandingkan dengan pos TKD lainnya dan mengalami kontraksi 48,85% secara yoy. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan pencadangan DAK Fisik, keterlambatan penerbitan petunjuk teknis pada bidang Pendidikan, serta kebiasaan pemerintah daerah yang cenderung mengunggah dokumen pada saat mendekati batas akhir penyaluran.
- 8) APBN Regional Kalimantan Barat TA 2025 dialokasikan ke dalam sembilan fungsi, dengan porsi terbesar pada Fungsi Pelayanan Umum, disusul Ketertiban dan Keamanan serta Pertahanan. Sebagian besar pagu dan realisasi belanja negara per fungsi mengalami kontraksi, kecuali Fungsi Pertahanan serta Ketertiban dan Keamanan yang masih tumbuh secara pagu. Namun, dari sisi realisasi, seluruh fungsi tercatat mengalami kontraksi secara yoy.
- 9) Posisi defisit APBN s.d. triwulan II tahun 2025 menyempit 15,06% secara yoy. Pendapatan negara yang tumbuh positif serta penyerapan belanja yang dikelola semakin efisien dan tepat sasaran akan mendukung optimalisasi peran fiskal.
- 10) Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan penyerapan belanja yang optimal dan berkualitas di Kalimantan Barat, yakni:
 - Terjadi pola *back-loaded expenditure* di hampir seluruh satuan kerja.

- Terjadi kondisi pagu minus Belanja Pegawai karena adanya penambahan formasi CPNS dan PPPK yang belum diperhitungkan.
 - Penyetoran PNPB dari Kementerian/Lembaga masih belum optimal sehingga pelaksanaan belanja yang bersumber dari PNPB belum berjalan secara optimal.
 - Terdapat Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada tahun anggaran berjalan.
 - Masih terdapat blokir anggaran pada program prioritas dalam rangka efisiensi anggaran.
- 11) Pendapatan Daerah konsolidasi Kalimantan Barat s.d. triwulan II 2025 terealisasi 31,81% dari target yang telah ditetapkan, namun terkontraksi sedalam 12,39% secara yoy.
 - 12) Implementasi kebijakan opsen per 5 Januari 2025 berdampak pada besaran Transfer Antar Daerah, karena terjadi perubahan mekanisme pencatatan dari sebelumnya tercatat dalam komponen Transfer Antar Daerah menjadi bagian dari PAD.
 - 13) Rasio derajat desentralisasi fiskal di Kalimantan Barat (konsolidasi) mencapai 21,11% atau berada pada kategori Cukup. Sedangkan, Rasio Kemandirian Fiskal di Kalimantan Barat (konsolidasi) berada pada pola hubungan "Konsultatif".
 - 14) Belanja Daerah konsolidasi Kalimantan Barat telah terealisasi atau 26,06% dari pagu yang telah ditetapkan dan terkontraksi sedalam sebesar 10,74% secara yoy. Struktur Belanja Daerah Kalimantan Barat pada triwulan II tahun 2025 didominasi oleh Belanja Operasi dan diikuti dengan Belanja Transfer.
 - 15) Sejalan dengan Belanja Modal Pemerintah Pusat, Belanja Modal pada Pemerintah Daerah juga menunjukkan tingkat penyerapan terendah dibandingkan pos belanja lainnya. Dari sisi alokasi, porsi Belanja Modal Tahun 2025 hanya sebesar 15,10% dari total Belanja Daerah.
 - 16) Realisasi Belanja Daerah Kalimantan Barat pada triwulan II 2025 di dominasi oleh empat fungsi

yakni Pelayanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Kesehatan serta Pendidikan. Secara akumulatif, keempat fungsi tersebut telah memberikan kontribusi 93,08% terhadap realisasi Belanja Daerah lingkup Kalimantan Barat.

- 17) Penerimaan Pendapatan Daerah yang lebih tinggi dibandingkan realisasi Belanja Daerah menyebabkan APBD Konsolidasi Kalimantan Barat berada pada kondisi surplus. Namun, surplus hingga triwulan II 2025 tercatat menyempit sebesar 35,37% secara yoy. Meskipun demikian, pembiayaan pada APBD konsolidasi tetap berjalan dan menghasilkan SILPA sebesar Rp1.504,35 miliar.
- 18) Isu, tantangan dan kendala yang terdapat dalam Belanja Daerah lingkup Kalimantan Barat meliputi:
 - Pencatatan dan pelaporan realisasi di beberapa pemerintah daerah belum dilaksanakan secara *real time*.
 - Terjadinya pergantian pimpinan sehingga diperlukan waktu untuk adaptasi.
 - Kompleksitas dalam penyusunan regulasi dan diperlukannya waktu untuk implementasinya.
 - Ketidaksesuaian OPD/SKPD dalam merealisasikan anggaran yang telah disusun.
 - Mekanisme kegiatan yang tidak direncanakan secara matang.
 - Alokasi anggaran terkait dengan layanan dasar kepada masyarakat yang masih tergolong rendah.
 - Kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian kembali terhadap alokasi anggarannya.
 - Terbatasnya pihak ketiga/penyedia yang terdaftar dalam *platform* belanja pemerintah.
 - Pemenuhan dokumen oleh pihak ketiga membutuhkan waktu yang panjang.
- 19) Pendapatan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Daerah di regional Kalimantan Barat sampai

dengan triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp7.707,01 miliar, terkontraksi 6,07% secara yoy.

- 20) Struktur Pendapatan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Daerah di regional Kalimantan Barat tidak mengalami perubahan signifikan, masih didominasi oleh Pendapatan Perpajakan sebesar 85,20%, diikuti oleh PNPB sebesar 14,80%.
- 21) Belanja Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Daerah di regional Kalimantan Barat terealisasi Rp13.507,92 miliar, namun mengalami kontraksi 13,68% secara yoy. Struktur belanja masih didominasi oleh pos Belanja Pegawai dan diikuti dengan Belanja Barang dan Jasa.
- 22) Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Daerah di regional Kalimantan Barat berada pada posisi defisit Rp5.800,91 miliar dengan pembiayaan sebesar Rp34,60 miliar. Angka defisit tersebut menyempit 22,07% secara yoy.
- 23) Hingga Juni 2025, terdapat 59 mitra SPPG di Kalimantan Barat dengan total penerima manfaat sebanyak 160.823 jiwa. Kota Pontianak tercatat sebagai daerah dengan jumlah mitra SPPG dan penerima manfaat terbanyak di wilayah tersebut.
- 24) Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan realisasi Program MBG terbesar di Regional Kalimantan. Hal tersebut dipengaruhi oleh:
 - Kondisi geografis, dimana menjadi provinsi terluas kedua setelah Kalimantan Tengah.
 - Jumlah Penduduk Kalimantan Barat merupakan yang terbesar di regional Kalimantan pada tahun 2024.
 - Usia penduduk, kelompok Balita, Sekolah, dan Lansia di Kalimantan Barat lebih banyak dibandingkan wilayah lain di Regional Kalimantan.
 - Jumlah sekolah dan siswa di Kalimantan Barat merupakan yang tertinggi di regional Kalimantan.
- 25) Berdasarkan hasil uji *Repeated Measures* ANOVA, dapat disimpulkan bahwa implementasi MBG di Kalimantan Barat tidak

memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan harga bahan pokok. Ketidadaan pengaruh tersebut dipengaruhi oleh adanya rangkaian *festive season* yang berlangsung sejak triwulan IV 2024 hingga triwulan II 2025, dan jumlah penerima manfaat MBG yang masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

- 26) Sesuai dengan hasil Uji Kruskal-Wallis, terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat inflasi komponen makanan, minuman, dan tembakau di Kalimantan Barat selama periode Januari hingga Juni 2025, yang mengindikasikan pengaruh implementasi program MBG terhadap inflasi.
- 27) Berdasarkan hasil uji *Repeated Measures* ANOVA, tidak terdapat perubahan capaian NTP setelah implementasi program MBG di Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan oleh waktu implementasi program yang masih tergolong singkat serta indikasi adanya ketergantungan pasokan bahan pangan dari daerah lain.
- 28) Isu, kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program MBG di Kalimantan Barat meliputi:
 - Geografis Kalimantan Barat yang luas dan terdapat daerah yang cukup sulit untuk dijangkau dengan karakter yang berbeda di tiap wilayah, menjadi tantangan sendiri dalam perluasan program MBG.
 - Masih banyak siswa dari jenjang SD/MI s.d jenjang SMA/SMK/MA yang belum terlayani/mendapatkan MBG sehingga diperlukan perluasan cakupan sekolah khususnya di daerah terpencil/perbatasan..
 - Munculnya permasalahan sampah akibat volume dapur MBG yang harus beroperasi setiap harinya.
 - Kebutuhan perlindungan asuransi bagi petugas dapur SPPG sebagai perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja.
 - Tingginya *turnover* (penggantian) tenaga kerja khususnya yang bekerja di dapur akibat beban kerja yang tinggi

4.1.3. Analisis Tematik : Mengukur Kesiapan Koperasi Merah Putih (Analisa Indikator Di Kalimantan Barat)

- 1) Pembangunan koperasi di tingkat desa merupakan salah satu strategi penting untuk memperkuat basis ekonomi kerakyatan. Kehadiran pemerintah melalui program Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan secara nasional pada 21 Juli 2025, termasuk di Kalimantan Barat, menjadi wujud nyata komitmen tersebut.
- 2) Keberadaan sejumlah koperasi *eksisting* yang terus meningkat di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa provinsi ini telah memiliki landasan dan ekosistem yang mendukung dalam konteks implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Dalam kerangka itu, kepastian kesiapan koperasi menjadi hal mendasar, sehingga diperlukan seperangkat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dan memetakan tingkat kesiapan Koperasi Desa Merah Putih secara obyektif.
- 3) Dalam kajian ini dapat dirumuskan tujuh indikator kesiapan koperasi yang dapat dijadikan instrumen evaluasi untuk menilai keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih. Indikator tersebut mencakup: (1) Akta Pendirian, (2) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Struktur Organisasi, (3) Pelatihan dan Pembinaan, (4) Anggota Aktif, (5) Sumber Modal selain Simpanan Anggota, (6) Kantor atau Gedung, dan (7) Dukungan Teknologi. Perumusan indikator didasarkan pada landasan formal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta diperkuat oleh literatur akademis baik internasional (Cook & Burrell, 2009) maupun nasional (Suhartono, 2012; Rusmiati dkk., 2025; Arzewiniga dkk., 2025). Oleh karena itu, indikator-indikator ini dapat dipandang sebagai kerangka yang sah untuk mengukur kesiapan koperasi desa di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.
- 4) Kondisi *eksisting* di Kalimantan Barat memperlihatkan capaian awal yang cukup

menggembirakan. Seluruh Koperasi Desa Merah Putih telah memenuhi indikator dasar berupa akta pendirian dan AD/ART serta struktur organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pondasi legalitas kelembagaan telah terbentuk dengan baik. Namun demikian, pemenuhan indikator lanjutan seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, keterlibatan anggota aktif, akses pembiayaan eksternal, penyediaan kantor atau gedung permanen, dan adopsi teknologi digital masih sangat terbatas. Hingga Agustus 2025, baru Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar di Kabupaten Kubu Raya yang berhasil memenuhi seluruh indikator, menjadikannya sebagai koperasi percontohan nasional.

- 5) Faktor kendala utama yang menghambat pencapaian kesiapan koperasi desa dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) keterbatasan waktu persiapan, mengingat program baru diluncurkan pada Juli 2025 sehingga koperasi masih dalam tahap konsolidasi awal; (2) kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang belum merata antar desa; (3) partisipasi anggota aktif yang masih rendah akibat faktor sosial-ekonomi; dan (4) keterlambatan implementasi kebijakan pembiayaan karena petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum dirilis. Kondisi geografis Kalimantan Barat yang luas serta keterbatasan infrastruktur juga turut memperberat proses pembinaan.
- 6) Studi kasus Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar menunjukkan bahwa indikator kesiapan dapat diwujudkan jika terdapat dukungan kepemimpinan desa yang kuat, konsolidasi anggota yang efektif, serta kemampuan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan dan BUMN. Keberhasilan Jeruju Besar membuktikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki peluang besar untuk berkembang, asalkan didukung dengan

pendampingan yang intensif dan kolaborasi multipihak.

- 7) Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Barat telah menunjukkan capaian awal yang positif, tetapi masih menghadapi berbagai kendala yang wajar sebagai konsekuensi dari kelembagaan baru. Tujuh indikator kesiapan yang dirumuskan dalam kajian ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk menilai, memantau, dan mempercepat proses kesiapan koperasi desa ke depan.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan tersebut, berikut beberapa rekomendasi strategis:

4.2.1. Kinerja Ekonomi dan Fiskal Kalimantan Barat

Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga (K/L):

- 1) Kementerian/Lembaga atau masing-masing eselon I diharapkan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik setiap bulan terhadap progres penyerapan anggaran pada instansi vertikal masing-masing, serta memberikan *early warning* kepada satuan kerja yang realisasi belanjanya belum optimal atau melewati jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Kementerian/Lembaga melaksanakan penguatan koordinasi kepada pihak terkait (BKN dan Kementerian Keuangan) terkait data kebutuhan formasi dan proyeksi penerimaan CPNS/P3K, sehingga kebutuhan belanja pegawai dapat dialokasikan lebih tepat
- 3) Kementerian/Lembaga secara terpusat meningkatkan kesiapan teknis yang adaptif di setiap satker vertikalnya untuk mengatasi tantangan operasional dan memastikan efektivitas penyerapan anggaran.
- 4) Kementerian/Lembaga memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran bagi satuan kerja untuk menyesuaikan strategi dan alokasi dana sesuai dinamika dan kebutuhan di lapangan dengan tetap mengacu pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Satuan Kerja:

- 1) Satuan kerja perlu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa secara matang sejak awal tahun anggaran serta meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankannya, sehingga dapat meminimalisir penumpukan kegiatan dan penyerapan anggaran di akhir periode.
- 2) Satuan kerja menyusun perencanaan belanja yang lebih terstruktur dan realistis berdasarkan proyeksi penyetoran PNB, sehingga tidak terjadi *mismatch* antara kebutuhan belanja dengan ketersediaan MP PNB. Kegiatan penyusunan rencana belanja ini dapat melibatkan pihak-pihak yang memiliki kapabilitas di bidang terkait.
- 3) Satuan kerja mengoptimalkan dan mempercepat kegiatan yang telah memiliki juknis pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran.
- 4) Satuan kerja memetakan kendala dan tantangan penyerapan anggaran sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat mengantisipasi tantangan yang akan terjadi di masa mendatang.
- 5) BGN perlu melakukan akselerasi dengan memperbanyak SPPG yang tersebar merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Setiap SPPG harus dilengkapi dengan dapur dan logistik yang memenuhi standar serta terjaga dengan baik, disertai perhatian terhadap pekerja dapur agar terlindungi dan bekerja optimal. Dengan demikian, makanan yang dihasilkan dapat mencukupi dari segi jumlah, memenuhi standar gizi yang ditetapkan, dan memberikan manfaat nyata hingga ke daerah terpencil maupun perbatasan.
- 6) Cakupan sekolah harus diperbanyak mengingat jumlah sekolah tingkat SD, SMP dan SMA sederajat yang dapat menerima manfaat MBG masih relatif rendah.
- 7) BGN perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, mengingat telah terdapat MoU antara BGN dengan Pemda untuk mendukung Program MBG.

- 8) BGN perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap cakupan MBG dan kualitas makanan, serta perlu adanya survei kepuasan dari penerima manfaat untuk perbaikan kedepannya.
- 9) Pemerintah pusat perlu mengoptimalkan peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja di dapur SPPG, sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja, pekerja tersebut memperoleh perlindungan yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah:

- 1) Optimalisasi pengelolaan ekonomi wilayah khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan melalui strategi hilirisasi.
 - 2) Memfasilitasi sarana produksi dan alat tangkap ramah lingkungan serta program subsidi BBM nelayan. Pemerintah juga memberikan edukasi kepada nelayan sehingga hasil tangkapan laut dapat bernilai tambah.
 - 3) Implementasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bagi kabupaten/kota yang belum membentuk forum tersebut serta penguatan TPAKD *eksisting*. Program kerja TPAKD memiliki peran yang cukup signifikan pada peningkatan IPM, PDRB, dan penurunan angka kemiskinan.
 - 4) *Benchmarking* terhadap wilayah yang memperoleh capaian tinggi pada indikator ekonomi makro daerahnya.
 - 5) Penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam meningkatkan kapabilitas terkait dengan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), dan mengimplementasikan penggunaan *Diagnostic Tools*.
 - 6) Dalam rangka memaksimalkan penggalan potensi pendapatan, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan DJP dan DJBC di wilayah masing-masing melalui pertukaran data terkait potensi perpajakan dan penerimaan bukan pajak.
- 7) Pemerintah daerah direkomendasikan untuk memperkuat strategi optimalisasi aset daerah melalui inventarisasi, penertiban, serta pemanfaatan aset yang lebih produktif dan transparan. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan memperkecil kondisi aset yang *idle*.
 - 8) Mendorong setiap OPD/SKPD Pemda melakukan perencanaan kegiatan yang berbasis pada kebutuhan riil, disertai dengan kajian teknis dan jadwal pelaksanaan yang terukur sejak awal tahun anggaran.
 - 9) Guna mengakselerasi Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim khusus yang akan melakukan monitoring secara berkala penyerapan belanja dan *output* yang dihasilkan oleh OPD/SKPD.
 - 10) Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (IT) untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya teknis/operasional sehari-hari. Dengan demikian, pekerjaan teknis/operasional sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih efisien dan mengurangi pos Belanja Operasional.
 - 11) Pemerintah daerah menyelenggarakan seminar terkait platform belanja pemerintah dengan mengundang penyedia/pihak ketiga. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong minat penyedia/pihak ketiga dalam mendaftarkan usahanya pada platform belanja pemerintah.
 - 12) Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dasar, pemerintah daerah di lingkup Kalimantan Barat dapat melaksanakan *refocusing* anggaran terhadap program/kegiatan yang kurang berdampak dan menyasar langsung ke masyarakat yang kemudian dialihkan ke sektor kesehatan maupun pendidikan.
 - 13) Diperlukan pembuatan peta permasalahan dan strategi penyelesaian oleh masing-masing OPD/SKPD guna untuk mengakselerasi penyerapan Belanja Daerah terkhususnya Belanja Modal yang disusun setiap awal tahun

- sehingga mitigasi risiko dapat dilaksanakan sejak dini.
- 14) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) penyusunan regulasi daerah yang lebih sederhana, terstruktur, dan berbasis waktu guna mempercepat proses legislasi.
 - 15) Melakukan koordinasi aktif dengan kementerian/lembaga teknis terkait agar penyesuaian terhadap regulasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
 - 16) Mengoptimalkan fungsi pengawasan internal dan menyusun jadwal kas yang realistis serta meningkatkan disiplin anggaran di tingkat OPD.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan

- 1) Meningkatkan efektivitas dan frekuensi *High Level Meeting* dengan Pemerintah Daerah bersama Deputy ALCo Regional guna membahas isu-isu fiskal regional di Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat harmonisasi antara APBD dan APBN, sehingga penggalan potensi dapat lebih optimal serta meminimalisir terjadinya program atau kegiatan yang tumpang tindih di daerah.
- 2) Melaksanakan *sharing session* mengenai tata kelola APBN kepada pemerintah daerah sehingga dapat dijadikan *benchmark* dan contoh untuk diadaptasi/diimplementasikan. Praktik tersebut dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas belanja daerah, dengan tetap menyesuaikan pada regulasi pengelolaan APBD, sehingga mampu mendorong terwujudnya sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah secara lebih efektif.
- 3) Kanwil DJPb selaku RCE senantiasa aktif dalam pertemuan yang melibatkan Pemda dengan memberikan pandangan terkait pelaksanaan program prioritas pemerintah di regional Kalimantan Barat.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

- 1) KPPN secara periodik menyampaikan pemberitahuan resmi kepada satuan kerja

apabila terdeteksi adanya kondisi pagu minus pada DIPA. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar satuan kerja segera melakukan langkah tindak lanjut yang diperlukan, khususnya melalui mekanisme revisi anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kendala dalam penyerapan anggaran.

4.2.2. Kesiapan Koperasi Merah Putih Di Kalimantan Barat

Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga (K/L):

- 1) Pemerintah pusat dan daerah perlu menetapkan tahapan yang jelas dan realistis terkait pemenuhan tujuh indikator kesiapan, sehingga terdapat standar yang bisa digunakan untuk monitoring dan evaluasi. Dengan terbentuknya indikator kesiapan sebagai instrumen ukur, *roadmap* yang jelas, dan dukungan multipihak, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.
- 2) Percepatan implementasi pembiayaan melalui PMK No. 49 Tahun 2025. Pemerintah pusat perlu segera menerbitkan petunjuk teknis agar koperasi dapat mengakses skema pinjaman melalui bank pemerintah. Di samping itu, koperasi juga perlu dibimbing dalam menyusun proposal pembiayaan agar lebih siap secara administratif maupun substantif.
- 3) Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan partisipasi anggota koperasi melalui sosialisasi, Sosialisasi manfaat koperasi harus dilakukan secara lebih intensif dengan menekankan nilai tambah konkret yang dapat diperoleh anggota, sehingga keanggotaan tidak sekadar administratif tetapi benar-benar aktif dan produktif.

Pemerintah Daerah

1. Pemerintah daerah perlu aktif memberikan pelatihan dan pendampingan yang spesifik

untuk koperasi desa, terutama dalam aspek manajemen kelembagaan, akuntabilitas keuangan, serta literasi digital.



Halaman ini sengaja dikosongkan



DAFTAR PUSTAKA

- Adissta Mega Christia, B. I. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 149-163.
- Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN). Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan.
- Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan.
- Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI). Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan.
- Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Pelaksanaan Anggaran (SINTESA). Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan.
- Aplikasi Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan.
- Arzewiniga, A., dkk. (2025). Teknologi dan daya adaptif koperasi desa. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 30(1), 45-60.
- Azwar. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1-25.
- Bachtiar; Arioma. (2022). Analisis Perhitungan Potensi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Dengan Metoda *Stochastic Frontier Analysis* (SFA). *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara*, 5 (2), 128-141.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2025). *Berita Resmi Statistik*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat 2023*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2025). *Berita Resmi Statistik*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2024). *Statistik Potensi Desa*. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik.
- Cook, M. L., & Burrell, M. J. (2009). *A cooperative lifecycle framework*. University of Missouri, Department of Agricultural Economics,
- Dwipradnyana, I. M., Pratiwi, I., & Diatmika, I. (2020). Strategi Pengembangan Koperasi Di Era Digital Pada Koperasi Yang Ada Di Provinsi Bali. *Majalah Ilmiah Untab*, Vol. 17 No. 2, 112-116.
- Endah, K. (2016). Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 797-804.
- Handayani, C. A., Isfahani, R., & Widodo, E. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel. *Indonesian Journal of Applied Statistics Volume 2 No. 1*, 10-20.
- Hasanah. (2021). Pemetaan Sektor Unggulan di Kota Pontianak Dengan Metode Tipologi Klassen dan Location Quotient. *Prosiding Seminar Nasional SATIESP 2021*, 156-163.
- Hastuti, Proborini. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 784.
- Hijrawati. (2022). Analisis Regresi Data Panel Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2020; *Jurnal Matematika, Komputasi dan Statistika*, 2(3), 1-9.
- Husnatarina, F. (2021). Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Koperasi. Pengabdian Kampus : *Jurnal Informasi Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(2), 27-31.

- Kusmanto, Heru. (2016). Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 25: 13-23.
- Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat. (2025). *GFS Kantor Wilayah Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2025*. Pontianak: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat. (2025). *Data dan Realisasi Penerimaan Bea Cukai di Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan II Tahun 2025*. Pontianak: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- Kanwil DJP Kalimantan Barat. (2025). *Data dan Realisasi Perpajakan di Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan II Tahun 2025*. Pontianak: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2025). *Informasi APBN 2025*. Jakarta Pusat: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). Siaran Pers: Peran koperasi dalam perekonomian nasional. Jakarta.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Barat.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan.
- Mustabsyirah. (2021). Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Putra, Andre., & Melti Roza Adry. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan di 6 Negara Asean. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 11 (2): 120-127.
- Putra, G. A. (2022). Motivasi dan kendala Percepatan Penyaluran Kas Daerah. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 175-191.
- Rahmadi. (2020). Analisis Faktor Kegagalan Pengelolaan Koperasi Di Kabupaten Pati. *Jurnal Stie Semarang*, 12(3), 135-15.
- Ritonga, A. Anshari, dkk. (2004). *Kebijakan Fiskal (Pemikiran, Konsep, Dan Implementasi)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rusmiati, R., dkk. (2025). Inovasi digital dan kinerja koperasi di Indonesia. *Jurnal Rimba*, 15(2), 123–137.
- Salsa, Shabila Siti., & Darya Setia Nugraha. (2022). Pengaruh Umur Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estat Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2 (03): 692-703.
- Saefulloh, M., Fahlevi, M., & Centauri, S. (2023). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3.
- Saefulloh, E., Wasman, & Asih, D. (2018). Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 3, No. 2*, 200-210.
- Salim, A., Fadilla., & Punamasari. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7:17.
- Septianingsih, Amin. (2022). Permodelan Data Panel Menggunakan *Random Effect Model* Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Umum Harapan Hidup Di Indonesia; *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika*, 3(3), 525-536.
- Suhartono. (2012). Kelembagaan koperasi dalam perspektif pembangunan ekonomi. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10(3), 530–537.
- Suliantoro, I. (2022). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Tegal Berdasarkan PDRB Tahun 2016-2021. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.2*, 168-181.
- Suryani, T. (2013). Analisis Peran Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang (Analisis Tabel Input Output Kabupaten Pemalang Tahun 2010).

- Suprayitno, B. (2007). Kritik terhadap Koperasi (Serta Solusinya) sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 4(2), 14-35.
- Syaiful, M. (2016). Strategi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 96-110.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.
- Priyatmo, Tri. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Aset Tetap Dan Ekuitas Pemerintah Daerah Di Provinsi Riau; *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 156-168.
- Putri, N. E., & Rizaldi, A. (2021). Perkembangan Koperasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0 di Era Globalisasi. *Akuntansi Bisnis dan Keuangan Vol.1 No.5*.
- Qodriyatun. (2024). *Komitmen Indonesia Menghentikan Deforestasi Pada Tahun 2023*. Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025.
- Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Yuda, M. Agung Patra., & Idris. (2022). Analisis Kepadatan Penduduk, Perumbuhan Ekonomi dan Anggaran Lingkungan Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 4 (2): 53-62.



Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat

JL. K. Sasuit Tubun No.36, Akcaya, Kec. Pontianak Sel.,
Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78121

 @djpbkalbar